

**ANALISIS KEHIDUPAN EKONOMI PETANI MITRA PTPN XIV
PABRIK GULA TAKALAR**

SKRIPSI



AHMAD

NIM. 1195040041

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2018

**ANALISIS KEHIDUPAN EKONOMI PETANI MITRA PTPN XIV
PABRIK GULA TAKALAR**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Ekonomi Pada
Universitas Negeri Makassar**

AHMAD

NIM. 1195040041

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing yang ditunjuk berdasarkan Surat Persetujuan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, Nomor : 4266/UN/36.22/PL/2018, untuk membimbing Saudara:

Nama : Ahmad

Nomor Stanbuk : 1195040041

Prodi : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Kehidupan Ekonomi Petani Mitra PTPN XIV
Pabrik Gula Takalar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan dapat diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.

Makassar, 02 Agustus 2018

Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Dinar, SE., MS
NIP. 19591217 198702 1 002

Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd
NIP. 19850906 201012 1 007

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh Ahmad dengan Nomor Induk Mahasiswa 1195040041, berjudul Analisis Kehidupan Ekonomi Petani Mitra PTPN XIV Pabrik Gula Takalar, telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: 4440/UN36.22/KM/2018 tanggal 15 Agustus 2018, untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar pada hari Rabu, 15 Agustus 2018.

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar

Dr. H. Muhammad Azis, M.Si
NIP. 19591231 198601 1 005

Panitia Ujian :

- | | | |
|------------------|-------------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Muhammad Azis, M.Si. | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : Sahade, S.Pd., M.Pd. | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Nurdiana, S.Pd., M.Si. | (.....) |
| 4. Pembimbing I | : Muhammad Dinar, S.E., M.S. | (.....) |
| 5. Pembimbing II | : Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd. | (.....) |
| 6. Penguji I | : Muh. Ihsan Said Ahmad, SE., M.Si. | (.....) |
| 7. Penguji II | : Dr. H. Thamrin Tahir, M.Si. | (.....) |

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama	: Ahmad
NIM	: 1195040041
Program Studi	: Pendidikan Ekonomi
Judul Skripsi	: Analisis Kehidupan Ekonomi Petani Mitra PTPN XIV Pabrik Gula Takalar

Dengan pembimbing masing-masing :

- 1. Muhammad Dinar, SE., MS**
- 2. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd**

Benar adalah hasil karya sendiri, bebas dari hasil jiplakan/plagiat. Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab moral untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Agustus 2018

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Pendidikan Ekonomi FE UNM

Yang Membuat Pernyataan,

Muhammad Dinar, S.E., M.S
NIP. 19591217 198702 1 002

Ahmad
NIM. 1195040041

MOTTO

“Suatu hari nanti, pasti akan muncul cahaya kemerdekaan. Pintu kebebasan akan terbuka. Saat itulah, yang hina berubah menjadi mulia ”-Sympati Dimas Rafi’i

“Tidak ada kemenangan yang lebih besar, dari pada lepas dari dunia dan menjadi orang yang merdeka”

*“Alangkah indah kehidupan tanpa merangkak-rangkat dihadapan orang lain”-
Pramoedya Ananta Toer*

PERSEMBAHAN

“untuk bumi persada”

Semoga karya kecil ini bermanfaat

ABSTRAK

Ahmad, 2018. *Analisi Kehidupan Ekonomi Petani Mitra PTPN XIV Pabrik Gula Takalar.* Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Pembimbing I Muhammad Dinar, SE., MS dan Pembimbing II Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kehidupan ekonomi petani mitra PTPN XIV Pabrik Gula Takalar terkhusus di desa Ko'mara yang menjadi pusat perhatian peneliti dan pola kerjasama kemitraan yang terbangun antara petani dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi kehidupan ekonomi petani sebelum adanya PTPN XIV Pabrik Gula Takalar, bersumber dari pemanfaatan lahan pertanian berupa sawah dan kebun, kehidupan petani juga masih tergolong cukup sejahtera di mana masyarakat tidak ada yang kesulitan sama sekali dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena kontrol tanah sepenuhnya di kuasai oleh petani. Setelah masuknya PTPN XIV Pabrik Gula juga merupakan masa-masa sulit bagi petani, dimana, sulitnya pekerjaan, kehilangan tanah pertanian dan perkebunan menjadi lahan perkebunan tebu, dan kesejahteraan yang makin rendah dengan demikian kehadiran industri gula justru menjadi petaka atas kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak sedikitnya anak dari petani yang putus sekolah, dan juga tidak sedikit masyarakat yang harus meninggalkan kampung menuju ke kota ataupun merantau ke luar negeri untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. PTPN XIV sebagai industri nasional justru mempraktekkan monopoli tanah, disisi lain banyak petani yang kehilangan tanah. sehingga PTPN XIV yang ada di polongbangkeng utara juga bisa disebut sebagai tuan tanah tipe baru. Adapun pola kerjasama yang terbangun antara petani dengan PTPN XIV adalah pola kerjasama kontrak perjanjian pengolahan lahan dengan menanam tebu dengan sistem bagi hasil.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya yang tiada henti-Nya, sehingga skripsi dapat di selesaikan. Skripsi ini berjudul “ *Analisis kehidupan Ekonomi Petani Mitra PTPN XIV Pabrik Gula Takalar*”. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada program studi pendidikan ekonomi fakultas ekonomi universitas negeri makassar.

Banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi oleh penulis dalam menyusun karya ini, namun semua itu bisa teratasi berkat rahmat Allah. Do’a, dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengaturkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada bapak saya tercinta Muhammad Yahya yang dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati dalam memberikan dukungan moril dan materil, dan tidak lupa kepada ibunda saya Alm. Rahmatiah, Semoga engkau di tempatkan disisi yang muliah sebagaimana janji Allah kepada seluruh Ibu yang baik di dunia. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, Khususnya Program Studi Pendidikan Ekonomi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan program Sarjana.
2. Bapak Dr. Muahammad Azis, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

3. Bapak Muhammad Dinar, SE., M.S. Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, sekaligus sebagai Pembimbing I yang dengan senang hati memberikan nasehat, dan memberikan masukan yang baik untuk penulis.
4. Bapak Muhamaad Hasan, S.Pd., M.Pd. Selaku pembimbing II yang dengan senang hati dan penuh semangat memberikan nasehat agar karya tulisan ini segera selesai dengan baik.
5. Bapak Muh. Ihsan Said, SE., M.Si Selaku Penanggap I yang memberikan masukan agar karya tulis ini lebih baik.
6. Bapak Dr. H. Thamrin Tahir, M.Si Selaku Penanggap II yang memberikan masukan agar tulisan ini jauh lebih baik.
7. Terimah kasih kepada saudara-saudariku angkatan 2011 yang tetap memberikan semangat agar segera menyelesaikan studi.
8. Kepada Kawan-kawanku di keluarga Besar Front Mahasiswa Nasional yang mendukung penuh upaya penyelesaian skripsi ini dan juga kawan-kawan di Aliansi Gerakan Reforma Agraria Sul-Sel yang banyak memberikan masukan tentang cara hidup bersama petani.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi bagi pembaca, dan semoga kebaikan dan keikhlasan serta bantuan dari semua pihak bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Makassar, Juli 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	8
BAB II.....	9
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Pikir	33
BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Tipe dan Dasar Penelitian	36
B. Informasi Penelitian	36
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
D. Batasan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Identitas dan Informasi dari informan.....	44
C. Kondisi Kehidupan Ekonomi Petani Sebelum dan Setelah Adanya PTPN XIV ...	67
1. Kondisi Kehidupan Ekonomi Petani Sebelum Adanya PTPN XIV	67
2. Kondisi Kehidupan Ekonomi Petani Setelah Adanya PTPN XIV.....	70
3. Kondisi Kehidupan Ekonomi Petani Saat Ini	73
D. Pola Kerjasama Kemitraan Antara Petani Dengan PTPN XIV	77
1. Embrio Lahirnya Kerjasama Kemitraan	77
2. Pembahasan; Lahirnya Kerjasama Kemitraan; Suatu Resolusi Atas Konflik ...	89
3. Pola Kemitraan yang Terbangun Antara Petani Dengan PTPN XIV	92
4. Dampak Kerjasama Kemitraan Terhadap Kehidupan Ekonomi Petani.....	102
E. Kelebihan dan Kekurangan Pola Kerjasama Kemitraan yang Terbangun dan Keberlanjutannya.	105
BAB V	108
KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
4.1	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2018	43
4.2	Distribusi Penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan	44
4.3	Survei kepemilikan Lahan RT di desa Ko'mara yang bersengketa dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar	71
4.4	Status Kepemilikan Lahan setelah bersengketa dengan PTPN XIV di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2018	74
4.5	Hasil Produksi, Biaya&Pendapatan Padi tahun 2017	77
4.6	Data HGU & HGB PTPN XIV Pabrik Gula Takalar	82
4.7	Daftar nama kelompok tani dan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL)	96
4.8	Realisasi luas lahan dari 2 kelompok tani di desa ko'mara yang menjalin kerjasama dengan PTPN XI Pabrik Gula Takalar tahun 2016	97
4.9	Berita-berita media mengenai rendemen tebu Pabrik Gula Takalar dari tahun 2015-2017	99
4.10	Luas Lahan Tebu kerjasama Kemitraan di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tahun 2018	102
4.11	Hasil dan Biaya Produksi Tebu pada tahun 2017	103
4.12	Utang pengolahan lahan dan biaya bibit petani yang melakukan kerjasama dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar	105

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
2.1	Pola Kemitraan Sederhana	29
2.2	Pola Kemitraan Tahap Madya	30
2.3	Pola Kemitraan tahap utama	31
2.4.	Skema Kerangka pikiran	35
3.1	Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Hubermen	40
4.1	Pola Kerjasama Bagi Hasil	101

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkebunan di Indonesia pada dasarnya satu bagian dari pengembangan dalam bidang pertanian yang tidak hanya untuk tujuan pemenuhan kebutuhan barang konsumsi seperti pada pertanian tradisional, akan tetapi lebih dari itu merupakan usaha memajukan produksi pertanian untuk tujuan optimalisasi dalam mengolah alam (tanah/lahan) dengan tenaga kerja yang dimilikinya untuk menunjang kehidupan manusia yang lebih layak secara ekonomi.

Perkebunan di Indonesia selain memiliki tujuan untuk optimalisasi sumber daya alam yang ada, juga memiliki peran dalam menjawab suatu pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih maju, di tengah manusia Indonesia yang memiliki jumlah yang tidak kurang dari 262 juta jiwa, dengan melakukan beberapa fungsinya seperti; penyerapan tenaga kerja secara langsung atau setidaknya mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun secara nasional. Perkebunan yang umumnya terletak di pedesaan juga untuk pembangunan ekonomi, di harapkan dapat berperan besar dalam mewujudkan strategi pembangunan ekonomi yang berkeadilan, terutama untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa yang besar dan mengurangi pula tekanan permasalahan di kota yang sebagian terjadi juga karena masyarakat miskin desa yang mencoba mencari penghidupan di kota.

Perkebunan di Indonesia umumnya terdiri dari perkebunan skala kecil dan perkebunan skala besar. Secara historis, perkebunan umumnya berawal dari

penguasaan turun-temurun satu keluarga yang bermula dari kumanal kecil dengan cara melakukan pembukaan lahan menjadi satu hamparan pertanian, dari proses perkebambagan yang panjang itu, timbul satu keinginan yang lebih besar pada satu kelompok dengan adanya bentuk pembagian dengan cara-cara penaklukan alam dan manusia untuk menguasai suatu tanah (klasik) dimana penggunaan kapital (modal) belum menjadi hal yang utama dalam pengembangannya, lain halnya dengan perkebunan skala besar yang perkembangannya juga merupakan bagian dari penguasa tanah (klasik) atau berasal dari pengembangan pedagang-pedangan kecil dan membentuk satu corak ekonomi baru dalam sistem yang berlaku dengan model penguasaan perseorangan, swasta, dan negara dengan penggunaan kapital (modal) terus beriringan dengan sumber daya lainnya.

Ismar (2015), menggambarkan tentang perusahaan perkebunan yang ada di Indonesia, bahwa perkebunan skala besar di Indonesia terdiri dari perusahaan perkebunan milik swasta (lokal dan asing) dan perkebunan milik negara. Hadirnya perusahaan perkebunan bermodal besar (negara dan swasta) tersebut adalah peruntukan produksi komoditi pasar dan bahan baku untuk industri seperti karet, tebu, sawit, dan lain-lain. Satu mandat dari negara untuk memberikan kepada individu yang memiliki modal kuat untuk mengelola sumber-sumber agraria yang ada.

Dimas (2016), dalam kaitannya dengan salah satu perkebunan besar yang dimiliki negara menggambarkan bahwa, salah satu perkebunan milik negara yang juga memiliki topangan modal yang besar adalah PTPN. PTPN merupakan perusahaan perkebunan yang memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup besar

dengan kualifikasi masing-masing kebutuhan perusahaan perkebunan , dan PTPN sendiri terdiri dari PTPN I sampai XIV yang juga memiliki beragam komoditi seperti karet, sawit, tebu, teh, kakao dan lain-lain. Selain dengan topangan modal yang besar dan menanam beberapa jenis komoditi, PTPN juga memiliki luas tanah $\pm 1,5$ Juta Ha yang tersebar di seluruh Indonesia.

Akan tetapi, Kehadiran perkebunan di tengah-tengah masyarakat Indonesia juga tidak selalu berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka masyarakat sekitar perkebunan. Posisi petani yang berdampingan dengan perkebunan umumnya hanya menjadi objek sarana perkebunan yang dinilai atas tenaga dan kesediaannya dalam menjalankan segala teknologi milik perkebunan atau cenderung menjadi pekerja lepas harian. Atas kondisi tersebut, akhirnya tidak sedikit masyarakat sekitar perkebunan yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara normal dan berkelanjutan, keterbatasan partisipasi anak-anak terhadap pendidikan terhutang rendah, pola hidup masyarakat individual, dan banyak masyarakat meninggalkan kampung halaman secara sendiri-sendiri demi mencari alternatif pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.

Fakta-fakta di atas terutama pada kemiskinan masyarakat, lebih banyak disebabkan karena banyak perusahaan perkebunan cenderung bertindak dan fokus sebagai penguasa tanah dalam jumlah yang sangat besar mencapai ribuan bahkan jutaan hektar. Di sisi lain petani yang merupakan pekerjaan mayoritas rakyat Indonesia, menguasai tanah dengan rata-rata kurang dari 0,3 Ha per kepala keluarga atau banyak petani sama sekali tidak bertanah.

Kondisi tersebut menyebabkan kemiskinan yang melanda kaum tani semakin akut, khususnya kaum tani di pedesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) Per-September 2017 menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia mencapai 26, 58 juta jiwa (10, 12 %), dengan persebaran di pedesaan sebanyak 16, 31 juta dan di perkotaan 10,27 juta jiwa. Di depesaan nilai tukar petani terus mengalami kemerosotan hingga 0,61% akibat dari belanja kebutuhan hidup dan biaya produksi pertanian yang tinggi, sedangkan upah real buruh tani hanya Rp. 37, 259, sedangkan tingkat kebutuhan hidup keluarga petani mencapai 3,5 hingga 4 juta rupiah perbulannya.

Berbagai upaya penyelesaian masalah terutama pada penyelesaian kemiskinan masyarakat sekitar perkebunan terus di upayakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun perusahaan secara langsung, seperti yang terjadi pada perkebunan pada umumnya, misal penyelesaian masalah lewat kemitraan. Kemitraan adalah bagian dari kerjasama yang memposisikan pihak petani sama pada posisinya dengan perusahaan besar yang menaunginya. Dalam pendekatan penyelesaian masalah terutama kemiskinan lewat program Kemitraan ini adalah hal yang menarik perhatian jika melihat posisi yang tidak berimbang untuk melakukan suatu bentuk kemitraan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa terkadang posisi petani terasing oleh perusahaan perkebunan yang hanya menjadikan mereka objek setara dengan sederetan teknologi milik perusahaan perkebunan, karena pada dasarnya kemitraan bisa diartikan sebagai kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya di tujukan untuk kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama,

dimana pembagian keuntungan dan kerugian didistribusikan diantara pihak yang bermitra.

UU No.39 Tahun 2014, tentang kemitraan usaha perkebunan, menggambarkan jenis dan polakemitraan bisa berbentuk, Perkebunan inti Rakyat, Tebu Rakyat intensifikasi, Inti plasma, model sub kontrak, model Kerjasama Operasional Agrobisnis (KOA), dan lain-lain. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1997, tentang kemitraan dalam ketentuan umum, Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada didalamnya yaitu prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Hal yang terjadi dalam perkebunan PTPN XIV PG. Takalar, Perusahaan menjalankan sistem produksi yang tidak terfokus pada produksi gula semata, akan tetapi lebih cenderung menjadi penguasa lahan luas yang tentu menjadi satu masalah bagi masyarakat petani disekitaran perusahaan perkebunan, karena selain mereka yang tidak memiliki kualifikasi bisa menjadi tenaga kerja didalamnya, juga menjadi objek sasaran pengambil alihan tanah petani menjadi lahan perkebunan untuk ditanamai tebu sebagai bahan baku gula.

Hasil penelitian Budianto (2015), menjelaskan bahwa tanah yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat sebagai pertanian skala kecil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat Polombangkeng, sampai dengan adanya pembebasan lahan yang dimulai sejak tahun 1978-1979 oleh PT. Madu

Baru. Pada tahun 1982 pembebasan lahan dilanjutkan oleh PTP XXIV-XXV. Tahun 1996 Pemerintah mendirikan PTPN XIV yang khusus bergerak di perkebunan dan pertanian di kawasan timur Indonesia. Sejak saat itu, pengelolaan perkebunan tebu dan industri gula di Takalar sepenuhnya di kelola oleh PTPN XIV. Sejak dari PT. Madu Baru Hingga PTPN XIV telah mengalami berbagai masalah, seperti bersengketa dengan masyarakat sekitar perkebunan atas tanah. Sehingga pada tahun 2009, perusahaan bersama pemerintah mencoba mendorong satu bentuk perjanjian yang disebutnya sebagai perjanjian program kontrak kemitraan. Masyarakat (Petani) yang bersengketa maupun yang tidak beberapa menjalin kerja sama dalam hal penanaman tebu sebagai bahan baku pabrik gula lewat skema kemitraan.

Dalam perkebangannya, kemitraan menjadi pertayaan akan hal pemenuhan kehidupan ekonomi bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama kebututuhan akan rumah tangga petani yang ada di Polongbangkeng Utara. Hasil wawancara langsung pada hari sabtu, 29 Juli 2017 dengan salah satu warga yang biasa di panggil Dg. Nyaling, berasal dari Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara mengajukan sebuah argumen untuk menggambarkan kemitraan yang terbangun antara perusahaan perkebunan PTPN XIV PG. Takalar, dengan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani yang ada di Desanya. Dia berpendapat bahwa, dasar lahirnya kemitraan pada awalnya adalah bagian dari pemecahan sengketa lahan dengan perkebunan, kami mengambil lahan dan menanam tebu agar kiranya sengketa yang ada bisa terselesaikn dengan harapan pemenuhan akan kebutuhan subsisten dapat kami

pemenuhi, kami menanam tebu dan hasil keringat kami di bagi kepada perkebunan, Modal harus kami sediakan sendiri yang menurut kami itu sangat besar, tebu yang saya tanam di lahan tidak lebih dari 1 Ha misalnya, setidaknya harus melalui proses pengerjaan panjang dan butuh dana besar.

Atas dasar gambaran informasi tersebut, peneliti menyakini penting untuk melakukan suatu penelitian yang bisa melahirkan fakta empiris sejauh mana kemitraan berdampak atas kerja produksi petani dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama pada pemenuhan pokok yang juga merupakan dasar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang berdampingan dengan perkebunan. Dalam berbagai penjelasan diatas maka sasaran pokok penelitian ini adalah melihat kehidupan ekonomi sebelum dan setelah adanya perkebunan dan pola mitra yang terbangunan antara petani dengan perkebunan PTPN XIV PG. Takalar. Adapun formulasi judul penelitian yang diangkat adalah:

“Analisis Kehidupan Ekonomi Petani Mitra PTPN XIV Pabrik Gula Takalar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana kehidupan ekonomi petanisebelum dan setelahadanya PTPN XIV Pabrik Gula Takalar?
2. Bagaimana pola kerjasama kemitraan yang terbangung antara petani dengan PTPN XIV Pabrik GulaTakalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dikemukakan beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan kehidupan ekonomi petani sebelum dan setelah adanya PTPN XIV PG. Takalar.
2. Untuk menganalisa pola kemitraan antara petani dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a) Memperkaya agumentasi ilmiah mengenai kehidupan ekonomi petani yang berada disekitaran perkebunan khususnya pekebunan milik negara
 - b) Memperkaya argumentasi ilmiah mengenai pola kerjasama kemitraan yang terbangun antara petani dengan perkebunan
2. Manfaat praktis
 - a) Menjadi masukan bagi berbagai pihak yang dalam penyelesaian konflik sengketa lahan petani vs pekebunan dengan memperhatikan kondisi ekonomi petani secara utuh
 - b) Menjadi acuan bagi berbagai pihak yang terkait dengan usaha-usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan.
 - c) Menjadi bahan atau referensi untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian dan kerangka pemikiran penelitian. Selain dapat digunakan untuk menunjukkan di mana letak permasalahan penelitian dan kerangka pemikiran penelitian yang akan dikaji, kajian pustaka juga dapat digunakan untuk memeriksa dan mengukur sejauh mana penelitian-penelitian lain telah membahas topik penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, agar lebih sistematis, bagian kajian pustaka dibagi dalam beberapa bagian. *Pertama*, Kerangka teori : Tentang Sistem Ekonomi sebagai Basis Kehidupan, Petani dan masalah pertanian di indoneisa, Konsep pembangunan pertanian kontrak/Mitra dan *Kedua*, kerangka pemikiran penelitian.

1. Sistem Ekonomi sebagai Basis Kehidupan

Ekonomi merupakan salah satu ilmu social yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan Produksi, distribusi, dan komsumsi terhadap barang dan jasa. Xenophon dalam Deliarnov (2011:12) Memberikan Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan nomos yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Ekonomi juga merupakan basis materil yang menentukan perubahan produktif dalam masyarakat. Sederhananya, jika basis materilnya adalah penghisapan maka politik, hokum, seni, kebudayaan yang terbangun juga dalah

penghisapan begitupun sebaliknya, jika basis kehidupan materilnya adalah kolektif maka semuanya akan bersandar pada kolektif. Maka dalam aturan keluarga dalam hubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi akan sangat di tentukan dengan sistem ekonomi yang berlaku.

Di dalam sistem ekonomi dunia yang pernah ada, setidaknya sudah beberapa kali mengalami pergantian fase, mulai dari sistem ekonomi komunal, perbudakan, feodal, kapitalis, hingga beberapa Negara ada yang memakai sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi di butuhkan kemampuan dan refensi yang benar-benar kuat untuk menjelaskan itu semua, untuk itu, di dalam pembahasan ini hanya akan mengambil dari perkembangan sistem ekonomi feodal dan sistem ekonomi kapitalis secara umum yang di anggap paling mendekati penelitian yang di angkat, di antaranya sebagai berikut :

a. Sistem Ekonomi Feodal

Dalam hukum perkembangan masyarakat, sistem ekonomi feodal juga menempati urutan ketiga dari fase perkembangan yang pernah ada. Sistem ekonomi feodal tidak bisa di lepaskan dari penguasaan tanah oleh tuan tanah. Umumnya, ciri-ciri feodal di dalam sistem ekonomi lebih bisa ditemukan di masa pemikiran kaum skolatisi yang salah satu tokohnya adalah Thomas Aquinas di dalam W.I.M. Poli (2010:20) membenarkan jika ada yang meminjamkan tanahnya untuk di oleh maka dia pantas untuk memperoleh sewa tanah karena tanah itu sendiri bernilai. Hal ini memberikan gambaran bahwa sistem penguasaan sasaran produktif berupa tanah adalah yang terpenting di masa pemikiran ini, terlebih di masa ini juga mengambil sistem politik kerajaan di mana raja bertindak sebagai

penguasa tanah yang paling luas dan menjadikan kaum tani memiliki kewajiban kerja di lahan milik tuan tanah dan kewajiban menyerahkan sebagian hasil produksinya kepada tuan tanah “raja” sebagai wujud dari kepatuhan terhadap raja. di padukan dendi mana seseorang yang memiliki tanah “tuan tanah” tanpa harus terlibat didalam kerja produksi tetap bisa menikmati keuntungan dalam berbagai bentuk seperti halnya penyerahan hasil produksi, sewa tanah, pajak, dan lain sebagainya.

Sejarah sederhana ciri-ciri sistem ekonomi feodal juga akan di gambarkan oleh Institute For National and Democracy Studies (INDIES), Ciri *pertama* adalah adanya monopoli tanah, dengan bahasa lain sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang merupakan minoritas dalam masyarakat. *Kedua*, Dasar ekonomi mencukupi kebutuhan sendiri, atau sederhana produksi dilakukan kaum tani dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan membayar sewa tanah kepada tuan tanah yang menguasai tanah. dan yang *Ketiga*, Produksi dalam skala kecil dan mandiri, petani tergantung pada alat produksi sederhana yang dikembangkan untuk memproduksi secara sendiri-sendiri, karena penguasaan tanah yang terbatas dan kecil-kecil, maka produksinya kecil dan terbatas. Tuan tanah yang menguasai tanah secara monopoli hanya berkepentingan untuk mendapat produk lebih dari tanah-tanah yang kerjakan oleh kaum tani sehingga tidak pernah memikirkan bagaimana pengembangan produksi melalui peningkatan teknik pertanian.

Di zaman ekonomi feodal juga, uang kertas dan logam mulai berkembang sebagai alat tukar (transaksi) atas barang. Mulailah berkembang ekonomi perdagangan ketika itu. Atau dikenal juga fase merkantilisme Modern,

Perdagangan berkembang begitu pesat dan melahirkan kelas baru dalam masyarakat yaitu kaum pedagang. Kemudian mulai terjadi persaingan untuk memperebutkan pasar atau jalur perdagangan. Perubahan cepat dari adanya persaingan bebas dari para pedagang yang mengharuskan mereka harus lebih mahir di banding para tuan tanah yang hanya mengandalkan warisan yang ada sebelumnya untuk mengabdikan kepada kerajaan terutama oleh bangsa Eropa pada abad XI-XIII mendorong peperangan lebih besar baik antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya dan kerajaan melawan pemberontakan kaum tani, dan perubahan di bidang teknologi semakin berkembang lebih maju, puncaknya adalah pembangunan industri-industri terutama Inggris di akhir abad 16 dan disebut juga dengan revolusi ekonomi dan revolusi industri. Perubahan dari industri-industri kecil di gantikan dengan industri pabrik yang jauh lebih maju, selanjutnya revolusi industri dan revolusi Prancis di tahun 1789 yang menggantikan secara menyeluruh sistem feodal masuk ke dalam sistem kapitalis.

b. Sistem Ekonomi Kapitalis

Didalam pembahasan sistem ekonomi kapitalis juga hanya akan di gambarkan secara umum saja seperti didalam pembahasan sistem ekonomi feodal sebelumnya, bahwa sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah bentuk ekonomi yang mengacu pada perkembangan industri yang didalamnya melahirkan kelas baru didalam masyarakat yaitu kelas buruh dan borjuasi. Sistem kapitalisme jika dikaji secara teoritik, pada dasarnya berakar dan bersumber pada pandangan filsafat ekonomi klasik, terutama ajaran Adam Smith. Selain Smith yang mempelopori teori ekonomi klasik, ada pula nama-nama lain yang masuk kedalam mazhab

ekonomi klasik seperti David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Para tokoh besar dalam pemikiran kapitalisme berpendapat bahwa sumber kemakmuran dari masyarakat adalah dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pasar, sehingga segala sesuatu yang menghambat perkembangan pasar harus dipangkas. Dalam liberalisasi ekonomi yang nantinya melahirkan suatu tatanan masyarakat dalam kurungan dunia kapitalistik sangatlah mengedepankan kompetisi yang individual. Beberapa pandangan dari para ekonom liberal. Pertama, dalam kehidupan bermasyarakat haruslah berpegang kepada *laissez-faire*, yakni kepercayaan akan kebebasan dalam bidang ekonomi yang memberi isyarat perlunya membetasi atau memberi peranan minimum kepada pemerintah dalam bidang ekonomi. Kedua, kepercayaan akan ekonomi pasar yang diletakan di atas sistem persaingan atau kompetisi bebas dan kompetisi sempurna. Ketiga, mereka percaya pada kondisi ekonomi yang akan berjalan lancar dan selalu akan mengalami atau dapat beradaptasi jika tidak ada intervensi dari negara.

Kemudian di fase awal kapitalisme ini, ekonomi pasar sangat berkembang. Fase perkembangan kapitalisme persaingan bebas dimulai sejak 1860-1870. Sesuai dengan watak dasarnya yang eksploitatif, ekspansif dan akumulatif, perkembangan persaingan bebas kapitalisme mulai mengalami transisi (1873-1890) ketika sebagian besar kapitalis kecil dan perusahaan kecil runtuh dan mulai diakuisisi atau dimerger dengan perusahaan kapitalis besar. Dan sejak 1900-1903 mulai terjadi krisis dimana kapitalis kecil runtuh dan berkembangnya kapitalisme monopoli yang melakukan pengakuisisian kapitalis kecil oleh kapitalis besar dalam suatu negara, serta pada dewasa ini bahkan lintas negara. Disinilah

kemudian terjadi disebut fase imperialisme sebagai tahap tertinggi dari kehidupan masyarakat kapitalistik atau dapat dikatakan zaman globalisasi.

Ulyanov, V.I (2017:5-11) Imperialisme adalah tahap kapitalisme monopoli yang ditandai oleh 5 ciri penting yaitu :

- a. Konsentrasi produksi dan kapital telah berkembang menuju sebuah tahapan tinggi sehingga menciptakan monopoli yang memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi. Contohnya dahulu ada sony dan ericsson tapi sekarang sudah bersatu menjadi sonyericsson, mercedes dan benz merupakan perusahaan otomotif yang berbeda tapi mercedes mengakuisisi benz dan berubah menjadi mercedes-benz. Dan hanya ada satu *holdingcompany* dan yang lainnya hanya *branchcompany* (coca cola di swedia, honda di jepang, BMW dan Mercedes Benz ada di jerman tapi kantor cabangnya tersebar di seluruh dunia. Serta, satu perusahaan juga menguasai dari industri hulu dengan hilir.
- b. Perpaduan antara kapital bank dengan kapital industri yang menciptakan basis bagi apa yang dinamakan kapital finans. Contohnya keberadaan World Bank, ADB, IMF, dsb yang berdiri untuk mengumpulkan modal dan modal tersebut berasal dari super profit yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh negara-negara kapitalisme. Dan kapital finans ini digunakan oleh negara imperialis untuk melakukan ekspor kapital dan membangun perusahaan cabang di seluruh dunia yang kelak akan menjadi jalan untuk terbentuknya negara-negara boneka.

- c. Eksport kapital yang berbeda dengan ekport komoditi. Contohnya banyak hutang, bantuan, investasi yang dikucurkan ke negara berkembang atau setengah jajahan dan jajahan dengan dalih pembangunan di negara tersebut. biasanya dengan bungkus perjanjian yang timpang.
- d. Pembentukan formasi kapitalisme monopoli internasional dan pembagian dunia di antara mereka. Contohnya, adanya negara adikuasa/Imperialisme yang pada umum disebut negara dunia pertama dan negara-negara miskin yang selanjutnya disebut dunia kedua dan ketiga.
- e. Pembagian teritori di seluruh dunia di antara kekuatan kapitalis besar telah selesai. Contohnya dapat kita lihat dengan adanya G-7, G-8, G20 dsbnya. dan Sejak PD II tidak ada lagi negara lain yang menjadi kapitalis baru. Dan ini didominasi oleh Imperialisme AS.

2. Petani dan masalah Pertanian di Indonesia

Umumnya, ketika membahas masalah pertanian di Indonesia maka yang akan terlintas adalah kemiskinan petani Indonesia itu sendiri, penyebabnya selalu di yakini karena cara-cara pertanian di Indonesia masih tergolong tradisional dan menggunakan teknologi sederhana, untuk itu butuh upaya dalam melakukan modernisasi dengan pembangunan industry pertanian. Hal itu telah di yakini dan di adopsi oleh Bank Dunia, di mana mempertemukan pertanian modern lewat industry dengan masyarakat agraris akan berdampak positif dalam kemajuan pembangunan pertanian. Akan tetapi, sebelum jauh dalam membahas akan hal tersebut di atas, diskursus mengenai basis ekonomi pertanian di Indonesia sangat

jarang kita temukan, terutama menyangkut hubungan alat produksi dengan petani itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui, alat produksi yang salah satunya adalah “tanah” yang menjadi adalah sesuatu yang tidak bisa di pisahkan dengan petani, karena tanah butuh petani untuk menjaga keberlangsungan seluruh manusia dengan cara bekerja menjaga ketersediaan akan kebutuhan hidup, seperti halnya kebutuhan akan makanan. Dari hal tersebut dapat dilukiskan betapa mulianya hidup bekerja sebagai seorang petani.

Tanah dan petani juga menjadi hal yang krusial dalam sejarah kehidupan manusia, Cantillon dan Mirabeau dalam Prof.Dr.W.I.M. Poli (2010:38) mengambarkannya lebih jauh lagi dalam perkembangan hubungan petani, tanah, dan negara bahwa, Tanah adalah sumber kekayaan suatu negara, yang diolah oleh tenaga kerja yang dimilikinya, dan kekayaan tidak lain adalah sumber penunjang kehidupan yang layak, Ketersediaan makanan merupakan sebab dari perkembangan jumlah penduduk, dan jumlah penduduk menjadi penyebab peningkatan pendapatan nasional. Karena itu, Petani harus dibantu”. Walau pada perkembangannya, pendapat ini kemudian dianggap keliru, khususnya oleh Francis Quesnay yang hidup di mazhab ekonomi yang sama, dan juga beberapa tokoh-tokoh pemikir ekonomi selanjutnya seperti Thomas Robert Malthus dan David Ricardo yang telah memasuki babak ekonomi baru. Dan perkembangannya, pendapat tersebut semakin tenggelang, terlebih pada masa penggunaan uang menjadi modal dan semakin kuat penggunaannya di tengah-tengah masyarakat. Terlebih jauh sebelumnya pertanian juga

Pendapat di atas mencoba meletakkan bahwa tanah adalah hal pokok bagi petani, begitupun sebaliknya, terutama menyangkut kewajiban suatu negara dalam memenuhi segala ketersediaan makanan yang menjadi basis kebutuhan manusia dalam wilayah teritori negara itu sendiri dengan mengandalkan petani. Oleh karena yang paling terpenting untuk di tegaskan, bahwa tanah dan petani adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Akan tetapi, dalam sejarah kaum tani di Indonesia tidak pernah surut dan lepas dari masalah kemerosotan hidup. Mereka terus dijauhkan dari tanah yang menjadi sumber kehidupan utama mereka, dilain sisi tuan tanah juga semakin kuat posisinya, baik dia adalah tuan tanah secara individu, korporasi, maupun negara itu sendiri yang terus memperkuat diri dengan penguasaan tanah yang begitu luas. Sehingga pada akhirnya ketergantungan golongan petani yang terhisap terhadap tuan tanah terus mengalami peningkatan. Kehilangan tanah bagi petani perlahan sempit dan terkonsentrasinya tanah di tangan tuan tanah yang penyebabnya bisa dari berbagai macam, Sepertipendapat James C.Scott (1981:122,124), memberikan satu tanggapan mengenai petani yang ada di Asia Tenggara bahwa, kebutuhan pemilik tanah kecil akan uang tunai untuk biaya produksi, pajak, dan konsumsi yang cenderung mengalami kenaikan yang mantap, menyebabkan petani harus berutang yang sering kali mengakibatkan ia kehilangan tanahnya. Pemilik besar setempat menjadi pemberi kredit bagi pemilik kecil dan yang mengadaikan tanahnya. Apabila mereka tidak mampu membayar menurut persyaratan maka tanahnya menjadi milik si pemberi kredit.

Akibatnya, semakin banyak petani-petani tak bertanah dan tanah terkonsentrasi ke tuan tanah yang umumnya adalah orang memiliki jabatan di dalam satu pemerintahan. Perubahan-perubahan dalam perkembangan materinya terus mengalami peningkatan dan menyebabkan banyak petani tak bertanah berlomba-lomba untuk menggarap tanah milik tuan tanah atau pilihannya hanya bisa menjadi buruh, bermigrasi dan lain sebagainya.

Kesejahteraan petani khususnya golongan petani penggarap, petani kecil, buruh tani akan selalu tergantung pada mekanisme harga pasar yang berlaku pada ketetapan sewa, pajak, bunga yang di berlakukan oleh pemilik tanah dan tuan tanah. Hal ini terjadi di sebabkan hasil-hasil keringat petani dinilai menurut harga-harga yang berlaku untuk keperluan pembayaran sewa, bagi hasil, bunga, dan pajak yang juga mengikuti mekanisme pasar.

Selanjutnya bahwa, hasil panen (pendapatan) sumber-sumber uang tunai seperti upah, harga komoditi-komoditi Primer yang semakin diperlukan oleh petani, cenderung berfluktuasi, sedangkan beban-beban akan penghasilan petani (pajak, sewa, bagi hasil, dll), sekian macam barang konsumsi umpamanya garam, kain, minyak, ikan, dan sebagainya cenderung untuk tidak berubah akan bertambah secara mantap. Dalam kondisi demikian, petani yang tidak bertanah untuk menjadi buruh tani saja harus melakukan persaingan di antara mereka.

Pendapat itu kemudian mencoba menggambarkan, adanya penggolongan-penggolongan petani yang disesuaikan dengan kepemilikannya atas alat produksi terutama “tanah”. Dimana petani pemilik kecil, penggarap, buruh tani, dalam memenuhi kebutuhan akan subsistemnya, selalu mendapat tekanan dari tuan tanah

baik dalam model sewa, bagi hasil, dan bunga pinjaman. Selain mendapat tekanan dari tuan tanah petani juga mendapatkan masalah dari kecenderungan berfluktuasi harga-harga barang primer yang ada di pasar. Maka keamanan petani terus mengalami kesulitan untuk mencari jalan keluarnya akibat dari percampuran dua sistem yang berlaku yaitu sistem ekonomi feodal di lain sisi sistem kapitalis yang mempengaruhi suatu barang di pasaran juga ikut menekangnya.

Lebih jauh lagi petani harus di pahami secara menyeluruh, terutama pada status ekonomi dalam penggolongannya. di Indonesia beberapa tokoh dan lembaga menggolongkan petani untuk mampu memahaminya secara pasti. Seperti yang di kemukakan oleh :

Noer Fauzi, (1999: 125) mengutip Jusuf M. van der Kroef dalam Tjondronegoro dan Wirada memaparkan klasifikasian sosial di pedesaan di dasarkan atas seberapa besar petani menguasai tanah. Pengelompokkan kelas sosial di pedesaan yakni meliputi Tuan Tanah, Petani Kaya, Petani Sedang, Petani Miskin, dan Buruh Tani dengan definisi tiap-tiap kelas sebagai berikut:

- 1). Tuan Tanah adalah pemilik-pemilik tanah mulai dari sepuluh Ha ke atas hingga ratusan Ha. Mereka tidak mengerjakannya sendiri, melainkan menyewakan pada pihak lain dengan sewa berupa uang atau hasil bumi secara bagi hasil.
- 2). Petani Kaya adalah orang yang memiliki tanah 5-10 Ha, tetapi ia ikut mengerjakan tanahnya sendiri. Meskipun demikian, mereka lebih senang mempekerjakan buruh tani dari pada pihak lain dengan bagi hasil. Mereka hidup makmur dari eksploitasi tenaga buruh tani.

- 3). Petani Sedang meliputi petani yang memiliki tanah 1-5 Ha. Mereka mengerjakan tanahnya sendiri dengan alat pertaniannya sendiri. Hasil dari perolehan dari usaha taninya mampu menghidupi keluarganya.
- 4). Petani Miskin dicirikan dengan pemilikan tanah yang sempit yakni kurang dari 1 Ha. Kehidupannya tidak cukup hanya dari hasil taninya. Karenanya, petani miskin mengerjakan tanah petani kaya atau tuan tanah dengan cara sebagai buruh atau bagi hasil.
- 5). Buruh Tani adalah mereka yang pada umumnya tidak memiliki alat produksi sama sekali. Kehidupannya bergantung pada tenaga yang ia jual terutama pada petani kaya.

Akan tetapi berbeda dengan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), sebuah Organisasi yang menghimpun petani, nelayan, suku bangsa minoritas, memiliki definisi yang berbeda terkait petani ada dalam sistem pertanian. Berdasarkan kerja dan beban produksi yang dimiliki oleh petani, AGRA mengelompokkan petani menjadi empat kelas atau golongan utama yaitu:

- 1).Tani kaya adalah kelas penguasa tanah cukup luas dan memiliki alat kerja yang lebih serta menjalankan penghisapan feodal di pedesaan meski pun terlibat kerja secara langsung yang dapat mencapai 15 persen dari kerja yang terserap dalam keseluruhan produksi di tanahnya. Sebagian besar hidup dan kekayaannya diperoleh dari membeli tenaga buruh tani, tani miskin dan tani sedang bawah.
- 2).Tani sedang adalah kaum tani yang menguasai tanah dan alat kerja lainnya yang cukup di pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya. Dalam keadaan sekarang tani sedang dapat digolongkan dalam tiga lapisan. Yaitu:

- a. Tani sedang lapisan atas menguasai tanah dan alat kerja yang cukup. Kelas ini secara aktif bekerja dalam produksi di atas tanahnya sendiri dan juga membeli tenaga kaum tani lainnya sekitar 10-15% dari kerja yang terserap dalam produksi karena keluasaan tanahnya. Karenanya, kelas ini juga menjalankan beberapa bentuk penghisapan feodal seperti upah buruh tani yang murah dan beberapa berprofesi sebagai tengkulak dan riba meski pun terbatas. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk menjadi petani kaya.
- b. Tani sedang lapisan tengah Seperti halnya tani sedang lapisan atas, kelas ini menguasai tanah dan alat kerja lainnya di pedesaan dalam ukuran yang cukup untuk kehidupan keluarganya. Ia ambil bagian dalam produksi atas tanahnya secara penuh dan memobilisasi seluruh keluarganya untuk kepentingan tersebut. Meski demikian, kelas ini kadang-kadang menggunakan tenaga kerja kaum tani lainnya dan menjual tenaga kerjanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
- c. Tani sedang lapisan bawah menguasai tanah, alat kerja serta kapital yang terbatas untuk memproduksi. Mereka mengerjakan tanahnya sendiri dan tidak melakukan pembelian atas tenaga kerja lainnya. Sebaliknya, ia harus menjual tenaga kerjanya hingga 50 persen

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang terus mengalami kekurangan.

3).Tani Miskin adalah klas yang menguasai tanah sangat kecil begitu juga alat kerjadan kapital yang dimilikinya. Klas ini dapat menjual sebagian besar tenaganya kepada tuan tanah untuk bertahan hidup karena pendapatannya yang sangat minim, bahkan ia harus menjual tenaganya lebih besar lagi untuk melunasi utang-utang. Karenanya, sebagian besar hasil produksi atas tanahnya hanya dipergunakan untuk membayar utangnya kembali kepada lintah darat.

4).Buruh tani adalah mereka yang memiliki tanah lebih kecil dari tani miskin bahkan tidak menguasai tanah sejengkal pun termasuk alat kerja. Mereka menjual seluruh tenaga kerja yang dimiliki pada tuan tanah. Pendapatan tambahan didapatkan dari beberapa pekerjaan sekunder seperti membuat kerajinan secara terbatas, kuli angkut hasil panen, dan menjual tenaga kerjanya pada tuan tanah dan tani kaya. Klas ini bahkan kesulitan memperoleh utang dari para periba karena sama sekali tidak memiliki kepastian atas pekerjaan dan tidak adanya jaminan. Mereka hanya mendapatkan pinjaman apabila mereka sedang menjalankan sebuah pekerjaan.

Dari dua pendapat di atas memiliki perbedaan yang sangat krusial, jika merujuk pada Noer Fauzi maka tuan tanah tetap di golongankan sebagai bagian dari petani akan tetapi, AGRA melihat dengan status beban kerja dan beban produksinya, di mana tuan tanah sama sekali tidak memiliki beban kerja produksi

di dalam satu penguasaan tanah akan tetapi hanya kadang kala terlibat didalam beban biaya produksi atau juga kadang-kadang bertindak sebagai pemodal yang bentuknya bisa berupa pinjaman uang, barang, dan lain sebagainya kepada petani, maka dalam hal ini tuan tanah akan mendapat untung yang lebih besar selain dari untung tanah yang dimilikinya. Maka secara tegas tuan tanah bukanlah petani.

Selain dari pemahaman dasar tersebut di atas, seperti yang telah adopsi oleh bank dunia yang telah di kemukakan lebih awal bahwa kemiskinan petani juga karena sistem pembangunan pertanian di Indonesia masih memakai cara-cara tradisional dan itu butuh upaya yang keras dalam melakukan modernisasi dengan pembangunan pertanian modern lewat industrialisasi. Sektor industri di Negara-negara maju di anggap telah menunjukkan peningkatan produktifitas pada kemajuan pertanian. Hal ini bisa tercapai karena penggunaan teknologi modern juga didalamnya. Selanjutnya salah satu bagian dari itu adalah bagaimana upaya mempertemukan masyarakat agraris dengan masyarakat industrial lewat kesepakatan, inilah kemudian perkembangan pembangunan pertanian yang juga ikut menyertai kaum tani di Indonesia.

3. Pembangunan Pertanian Kontrak/Mitra

Pembangunan teknologi industri di sector pertanian adalah sesuatu yang tidak bisa di elakkan dan itu harus terjadi sebagaimana didalam perkembangan ekonomi secara global itu sendiri dari sistem feodalisme ke sistem kapitalisme-Imperialisme. Akan tetapi dibutuhkan perhatian khusus bagi perkembangan industri di Indonesia itu sendiri. melihat dari perkembangan ekonomi Indonesia yang cenderung hanya menjadi penyedia bahan baku, penyedia tenaga kerja,

menjadi pasar dan menjadi sasaran investasi milik kapitalis-Imperialis didalam sistem ekonomi neoliberal secara global. selain itu, petani yang ada di Indonesia juga masih terstruktur dari golongan yang berbeda-beda seperti dalam penjelasan sebelumnya, yaitu penguasaan sarana produktif masih terkonsentrasi di tuan tanah yang sedikit didalam populasi masyarakat disisi lain petani kecil juga kian terus-menerus kehilangan tanahnya.

Dalam perspektif sejarah perkembangan industri di Indonesia, sejak masuknya Negara-negara eropa melakukan ekspansi dan membangun industri didalam negeri, baik dalam bentuk perkebunan maupun industri lainnya, hanya menjadikan petani terus kehilangan tanahnya dan harus bekerja tanpa dibayar, seperti pada awal pembangunan industri gula perkebunan tebu di masa *Cultuur Stelsel* (sistem tanam paksa) pada 1830-an. Peter Boomgaard, dkk (1996 : 50-52) memberikan gambaran tahun-tahun dimulainya industri gula di Comal, merupakan tahun-tahun miskin bagi daerah pemalang. Proses pengenalan budi daya tebu dan pendirian pabrik yang menuntut banyak buruh, persediaan kayu, dan tanah. Banyaknya sawah yang di Tanami tebu dan tugas kerja berat diluar dari kebiasaan petani mendorong mereka untuk pindah keluar daerah. Selain itu, Pabrik gula di comal juga merupakan factor yang penting dalam proses penebangan hutan. Akibatnya, pada tahun 1838 banyak hutang leyap.

Gelap memudar, lahir gelap yang baru, sistem tanam paksa yang tadinya memaksakan banyak tanah di monopoli industri perkebunan milik belanda dan memaksakan banyak rakyat di mobilisasi untuk bekerja diluar dari kebiasaan manusia lahirlah sistem baru yaitu *Agrarische Wet 1870*(UU Agraria/Hukum

Agraria 1870) sebagai pengganti Sistem Tanam Paksa. Frida, dkk (1997:31) menggambarkan Hukum agraria 1870 juga merupakan kram bagi pemodal besar swasta mendapat lahan untuk membuka perkebunan beskala besar dengan komoditi ekspor dengan kepastian tenaga kerja murah. Hukum Agraria 1870 juga menarik minat bagi tuan tanah local yang memiliki lahan untuk menanam komoditas yang sama di lahan-lahan mereka. Selanjutnya ini menjadi embrio lahirnya *smallholders* (perkebunan rakyat) yang ternyata bekembang baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya sumbangan mereka terhadap total ekspor hasil pertanian Hindia Belanda.

Lebih lanjut perkembangan perkebunan besar dan perkebunan rakyat dalam perkebunan besar memudar pada akhir 1930-an dan awal 1940-an karena Perang Dunia II. Perkebunan di Indonesia praktis berhenti pada saat pendudukan jepang. Setelah Indonesia di nyatakan merdeka secara di jure di tahun 1945 pemerintah melakukan upaya nasionalisasi aset. mengubah semua perkebunan dan pabrik olahan pertanian milik imperialis menjadi milik republik, akan tetapi juga menemui kegagalan. Selain disebabkan karena kekurangan dana untuk mengola juga di sebabkan karena adanya penyerahan kedaulatan melalui konferensi meja bundar pada tahun 1949. Harapan besar pertanian dan perkebunan di Indonesia terutama kaum tani yang tidak bertanah untuk jauh lebih baik belakang hadir Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 atau yang biasa di singkat UUPA yang mengatur tentang penguasaan tanah oleh tuan di sahkan sebagai UU Agraria terbaru, akan tetapi terbukti UUPA di jalankan secara serampangan dan juga belum mengatur

secara spesifik terhadap monopoli tanah yang di kuasai oleh perkebunan besar baik swasta (local dan asing) maupun perkebunan milik Negara itu sendiri. Seperti dalam tulisan Gunawan Wiradi yang berjudul Reforma Agraria dan Pembangunan di Pedesaan menggambarkan bahwa, secara hukum, pengelolaan pertanahan secara garis besar memerlukan dalam empat bidang, yaitu, (a) “Peruntukan” (mana untuk keperluan Negara, mana untuk masyarakat, mana untuk perorangan); (b) masalah cara memperolehnya; (c) masalah hak penguasaan; dan (d) masalah penggunaannya. Hal ini telah memberikan gambaran bahwa UUPA No.5 tahun 1960 juga masih mengalami kekurangan terlebih hal ini tidak berjalan sama sekali di masa Orde Baru.

Kembali Frida, dkk (1997:32) memberikan gambaran tentang pertanian dan perkebunan di Indonesia bahwa, di tahun 1950-1957, pemerintah Indonesia sempat mengembangkan program tebu rakyat. Akan tetapi program ini di tinggalkan karena petani tebu tetap di posisikan sebagai penyewa tanah kepada pabrik gula. Setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965, pemerintah Orde Baru mengubah kebijakan pembangunan yang sebelumnya berorientasi non-kapitalis ke arah pembangunan yang lebih kapitalis. Di sektor pertanian dan perkebunan, program ini dimulai dengan penyelenggaraan Proyek Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), pengembangan kelembagaan dan pengembangan program-program intensifikasi pertanian.

Sejak masa Orde Baru, Bank Dunia mulai gencar memberikan kredit untuk pembangunan di sektor perkebunan dan tidak lepas juga subsector perkebunan rakyat, terutama yang membudidayakan komoditas untuk ekspor. Seperti yang

kembali dikutip dari Frida, dkk (1997:33) yang memberikan gambaran bahwa, Tahun 1973, Bank Dunia mulai memberikan kredit untuk pengembangan subsektor perkebunan rakyat di Indonesia, terutama yang membudidayakan tiga komoditas utama untuk ekspor, yaitu karet, teh, dan kelapa sawit. Ketiga komoditas budi daya ini merupakan primadona ekspor. Dalam hal komoditas lain seperti tebu, kopi, dan kelapa, total produksi yang disumbangkan oleh perkebunan rakyat jauh lebih besar dibandingkan dengan total produksi perkebunan besar dan swasta. Pembangunan dengan pola Perusahaan Inti Rakyat-Perkebunan (PIR-Bun) juga ikut di perkenalkan di tahun `1976 yang konsepnya dibangun atas rangsangan dari Bank Dunia dan di harapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru bagi para petani yang tinggal di sekitar perkebunan dengan pola perkebunan rakyat. Dan di awali dari situ, belakang banyak lahir berbagai penamaan dengan prinsip yang tetap sama, misalnya saja di tahun 1984 lahir Pola Inti-Plasma, dan lebih lanjut akan jelaskan berbagai penggolongan/Tipologi sistem pembangunan perkebunan/pertanian kotrak/mitra dengan bersandar pada prinsip yang sama pula yaitu, saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan di antara sebagai berikut ;

Direktorat Pengembangan Usaha, Departemen Pertanian dalam Puspitawati (2006) memberikan gambaran mengenai beberapa jenis pola kemitraan, yaitu:

1. Pola inti plasma, merupakan hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra bertindak sebagai plasma.

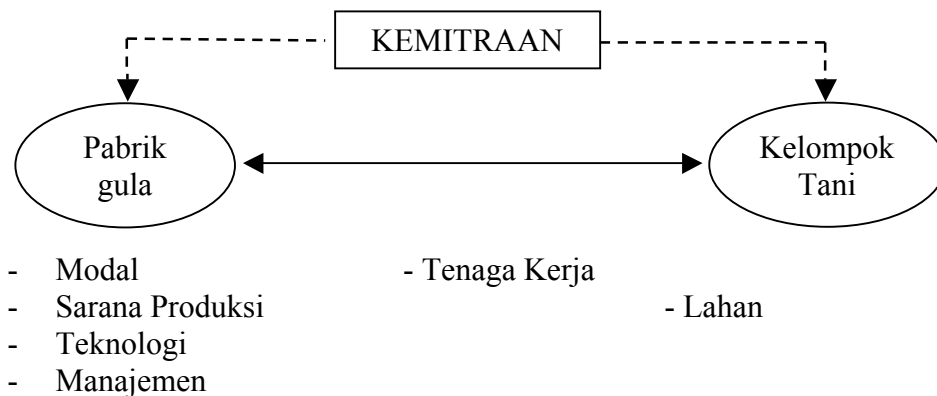
2. Sub-kontrak, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
3. Pola dagang umum, merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
4. Pola keagenan, merupakan hubungan kemitraan yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
5. Pola Sama Operasional Khusus (KOA) Perusahaan mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, biaya atau modal dan sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian.
6. Pola Kemitraan Saham Usaha kecil dan usaha besar saling memberikan saham. Usaha kecil memberikan saham sedikitnya 20 persen dari total keseluruhan saham.

Hafsah (2003) Pola kemitraan secara umum dapat dikembangkan mulai dari yang paling sederhana sampai pola ideal yang mewujudkan saling ketergantungan dan saling bersinergi antara pihak yang bermitra.

a. Pola Kemitraan Sederhana (Pemula)

Kemitraan pola yang paling sederhana adalah pengembangan usaha bisnis biasa yang ditingkatkan menjadi hubungan bisnis dengan adanya ikatan tanggung

jawab masing-masing pihak yang bermitra dalam mewujudkan kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Dalam kemitraan tersebut, pabrik gula mempunyai kewajiban kepada kelompok tani dalam memberikan dukungan atau kemudahan dalam memperoleh permodalan. Adapun bagi kelompok tani mempunyai kewajiban untuk memasukkan hasil produksinya kepada pabrik gula dengan jumlah dan standar mutu sesuai yang telah disepakati bersama. Peran mediator dipegang oleh pemerintah yang diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha.



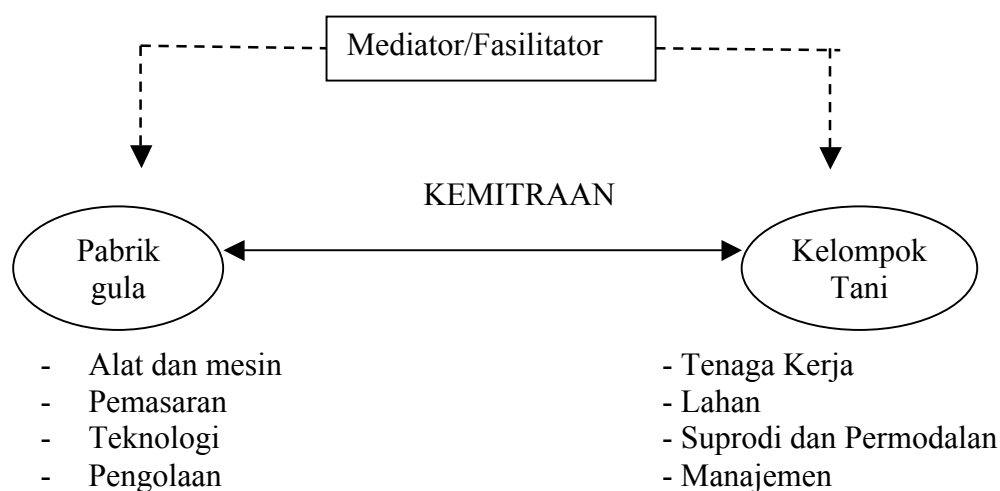
Sember : Hafsah (2003)

Gambar 2.1 Pola Kemitraan Sederhana

b. Pola Kemitraan Tahap Madya

Pola kemitraan ini merupakan pengembangan pola kemitraan sederhana, dimana peran pabrik gula terhadap kelompok tani makin berkurang. Pembinaan masih diperlukan terutama dalam aspek teknologi, mesin pengolah tanah dan

mutu produksi, pengolahan serta jaminan pemasaran. Dalam tingkat madya, kelompok tani telah mampu mengembangkan usaha mulai dari merencanakan usaha sampai pengadaan sarana produksi dan permodalan dalam upaya menjamin kelangsungan kemitraan yang dijalin dengan usaha besar. Sedangkan peran pemerintah tetap sebagai mediator.

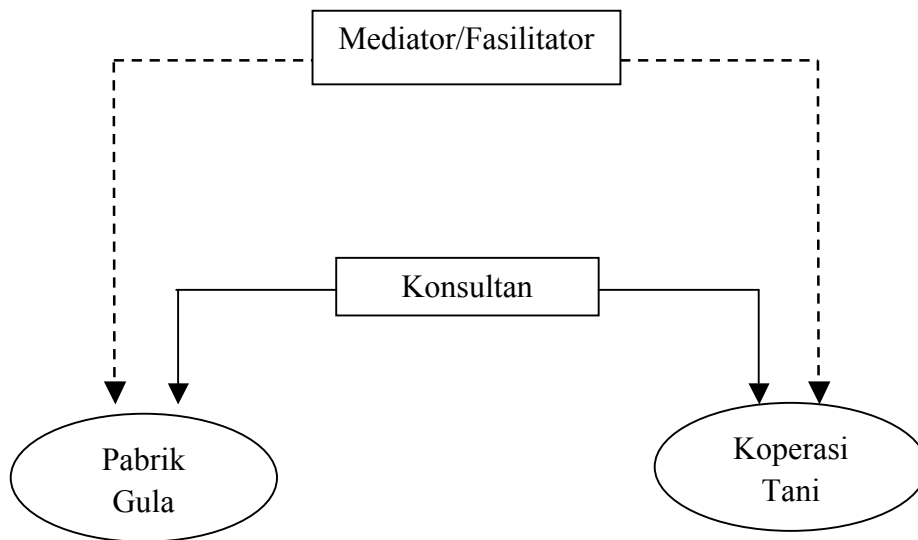


Sember : Hafsah (2003)

Gambar 2.2 Pola Kemitraan Tahap Madya

c. Pola Kemitraan Tahap Utama

Pola ini merupakan pola kemitraan yang paling ideal untuk dikembangkan. Namun, membutuhkan persyaratan yang cukup prima bagi pihak yang bermitra, khususnya pihak kelompok tani karena pola ini membutuhkan organisasi petani yang solid, penguasaan manajerial usaha yang memadai, dan pengetahuan bisnis yang luas. Dalam pola ini, kelompok tani secara bersama-sama patungan dengan pabrik gula atau menanamkan modal dalam bentuk saham. Pola ini memanfaatkan jasa konsultan dalam mengembangkan usahanya. Peran pemerintah sebagai fasilitator dan pembina kemitraan usaha



Sumber : Hafsah (2003)

Gambar 2.3 Pola Kemitraan tahap utama

Fauzan (2015:2), Pola kemitraan merupakan salah satu strategi pembangunan andalan pemerintah yang berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah. Kebijakan ini berisi: aturan main, jaminan hak serta kewajiban perusahaan inti dan plasma, pola hubungan sinergi antara perusahaan inti dan plasma, serta mendudukan peranan pemerintah sebagai pembina dan fasilitator sekaligus pendukung dana program kemitraan.

Kemitraan dengan berbagai pola juga dikembangkan dalam menjalankan usaha perkebunan. Pola kemitraan di sektor perkebunan dilakukan agar masyarakat (Petani) mampu meningkatkan ekonominya dan perkebunan mendapat bahan baku dari pekerjaan petani. Selain itu, Petani kecil (satuan keluarga) di dorong ke modernisasi pertanian di mana perusahaan inti (modern) menjadi penarik (lokomotif), atau pencipta lapangan pekerjaan masyarakat,

sebagai sumber pendapatan, sebagai sarana untuk berusaha, serta sebagai sarana untuk merubah nasib yang lebih baik. Dalam sejarahnya, Pola kemitraan di sektor perkebunan juga ada sejak tahun 1970 an, dikembangkan dalam bentuk tebu rakyat di Jawa Timur dan kemudian menjadi tebu rakyat intensifikasi (TRI). Sektor industri Perkebunan diyakini mampu menunjukkan kepesatan luar biasa, dalam hal efisiensi dan peningkatan produktivitas. Memperkenalkan masyarakat industri dengan masyarakat agraris dengan menjalin pola kemitraan yang baik.

Akan tetapi kita mengenal Das Sollen, Das Sein yaitu apa yang seharusnya, apa kenyataannya. Seperti pada pembahasan sebelumnya dan juga melihat dari perkembangan pembangunan industri pertanian maupun perkebunan di Indonesia kerap meminggirkan petani yang menguasai tanah sebelumnya. Terlebih di masa orde baru, Banyak kasus klaim tanah Negara atas nama pembangunan dan menggusur tanah klaim masyarakat, Sehingga tidak sedikit memicu konflik yang tidak jarang aparat militer diturunkan untuk mengamankan proses konsolidasi tanah. Sehingga proses pembangunan dari proses konflik itu juga potensial menempatkan petani tidak sebanding dalam proses menjalankan kesepakatan kerjasama. Seperti tetap didalam hasil penelitian Frida, dkk (1997:52-53) menggambarkan bahwa, Proses Kerjasama produksi dan integrasi vertikal, tampaknya potensial menempatkan petani yang sebelumnya menguasai atau memiliki tanah menjadi semata-mata hanya sebagai "pekerja" di atas tanahnya sendiri. Dalam kesepakatan yang berbentuk kontrak produksi, (hampir) semua keputusan berkaitan dengan produksi, pemasaran, dan pengalokasian sumber daya berada pada pihak inti; sementara dalam integrasi vertikal posisi

petani tidak lebih seperti "manajer" atau "buruh upahan" yang diperkerjakan pihak inti. Gambaran ini menjelaskan bahwa petani tidak mempunyai "kekuasaaan" lagi atas tanah yang dikuasainya. Semuanya tergantung pada instruksi yang diberikan pihak inti. Hal ini menegaskan kembali bahwa dalam pertanian kerjasama kontrak, meskipun tidak menguasai tanah secara langsung, pihak inti mempunyai akses besar terhadap tanah yang (sebelumnya) dikuasai atau dimiliki petani.

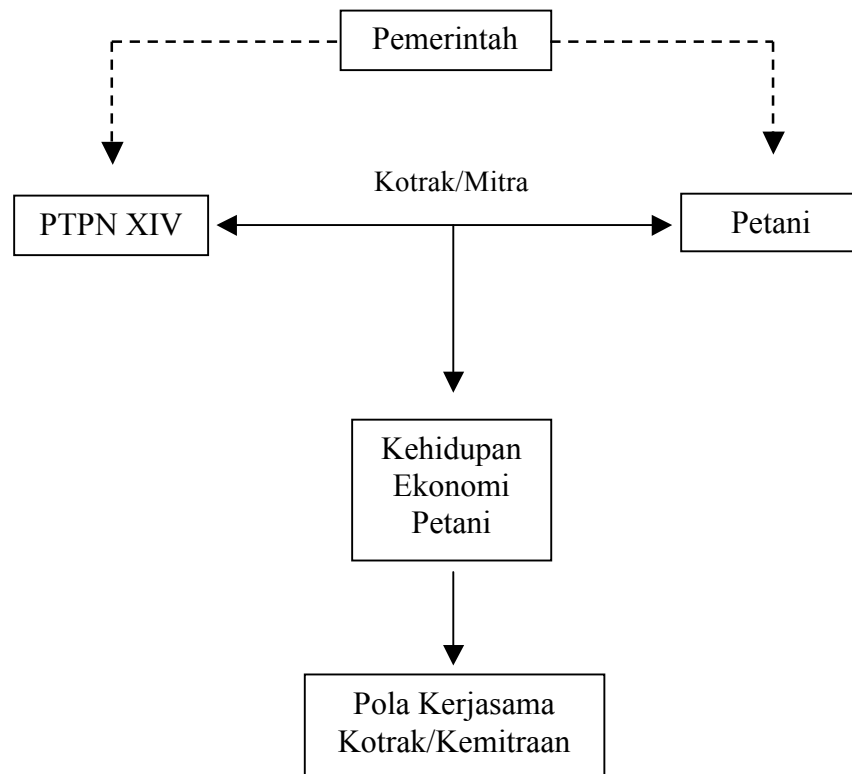
B. Kerangka Pikir

Permasalahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari petani masih menjadi persoalan pokok yang tidak kunjung bisa terselesaikan, salah satu penyebabnya adalah sempitnya lahan, dan tidak adanya lahan petani yang menjadi sumber utama penghidupan mereka. Penyebabnya, karena tanah terkonsentrasi di segelintir tuan tanah dan juga masalah biaya produksi pertanian dan konsumsi sering sekali mengalami peningkatan di pasar yang tidak jarang menjadikan petani-petani berlahan sempit kehilangan tanahnya. Di lain sisi pembangunan industry pertanian dan perkebunan yang pernah ada, seperti halnya pada industry perkebunan PTPN dari I-XIV justru menguasai tanah yang begitu besar. Program pembangunan industry pertanian dan perkebunan kerap meminggirkan petani yang menguasai tanah sebelumnya, sehingga tidak sedikit menimbulkan konflik yang tidak jarang aparat militer diturunkan untuk mengamankan proses konsolidasi tanah.

Lahirnya skema pembangunan pertanian lewat kesepakatan-kesepakatan seperti perkebunan rakyat yang membentuk pola seperti halnya didalam PIR, dan

berbagai model lainnya juga lahir dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan yang dialami petani, terutama menyangkut masalah kemiskinan dengan cara membuka kesempatan keterlibatan petani dalam pembangunan. Akan tetapi, di awal kehadiran program tersebut justru di tinggalkan petani, karena masih menempatkan petani sebagai penyewa tanah atau hanya menjadi pekerja semata dan hampir segala kebijakan yang berhubungan dengan produksi sepenuhnya di atur oleh pihak inti. Hubungan produksi dalam sistem kerjasama kontrak/kemitraan yang bersandar pada prinsip nilai yang didalamnya saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan akan terus di uji seperti halnya yang terjadi antara petani yang ada di Polongbangkeng Utara khususnya di desa ko'mara dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Secara Eksplisit, Skema Kerangka Pikir Penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Skema Kerangka pikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai dasar penelitian. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang menyelidiki secara cermat terhadap suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk ini penelitian ini ditujukan agar dapat memperelajari secara mendalam dan detail kehidupan ekonomi petani baik sebelum dan setelah adanya PTPN dan pola kerjasama yang terbangun antara petani dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran tentang kehidupan ekonomi petani dan pola kerjasama yang terbangun dengan PTPN XIV PG Takalar.

B. Informasi Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah petani yang menjalin kerjasama kemitraan dengan PTPN XIV PG takalar dan bertempat tinggal di kecamatan polombangkeng utara serta berbagai pihak yang mengetahui proses masuknya PTPN di takalar. Alasan Pemilihan kriteria tersebut karena petani merupakan subjek dari penelitian ini sendiri.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dari bulan 22 maret s/d 22 juli 2018.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Ko'mara kecamatan

Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar.

D. Batasan Penelitian

- a. Kehidupan ekonomi petani baik sebelum dan setelah adanya PTPN XIV Pabrik Gula Takalar
- b. Jenis dan pola kerjasama kemitraan yang terbangun antara petani dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar
- c. Petani adalah setiap individu yang menyelenggarakan usaha pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal penelitian ini adalah petani yang bertempat tinggal di desa Ko'mara kecamatan polombangkeng utara, kabupaten takalar yang saat ini bermitra dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar.
- d. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki wewenang dalam melegitimasi lahirnya sistem kemitraan antara petani dan perusahaan yang ada di desa Ko'mara, kecamatan polombangkeng utara, kabupaten Takalar.
- e. Kerjasama Kemitraan/kesepakatan kotrak adalah satu upaya dari dua pihak atau lebih yang bekerjasama dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan. dalam penelitian ini akan menfokuskan pada kehidupan ekonomi petani yang menjalin kesepakatan kotrak/bermitra dengan PTPN XIV PG Takalar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara dengan berbagai informan dikalangan petani tebu dan perusahaan yang ditetapkan sesuai dengan data informasi yang dibutuhkan.

2. Studi Pustaka

Kepustakaan digunakan untuk mencari konsep-konsep dan landasan teori yang digunakan, baik dari buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Konsep tersebut digunakan untuk membantu proses telaah dan analisis penemuan yang didapat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan yaitu dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam kehidupan ekonomi petani baik sebelum dan setelah adanya PTPN XIV Pabrik Gula Takalar. Sekaligus yang berkaitan dengan pola mitra yang terbagun. Data dapat didapat dari hasil pengamatan yang diperoleh dari topik penelitian ini.

4. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap informan di kalangan petani di desa koma kecamatan Polombangkeng Utara Khususnya petani yang bermitra dengan perusahaan Pabrik Gula Takalar.

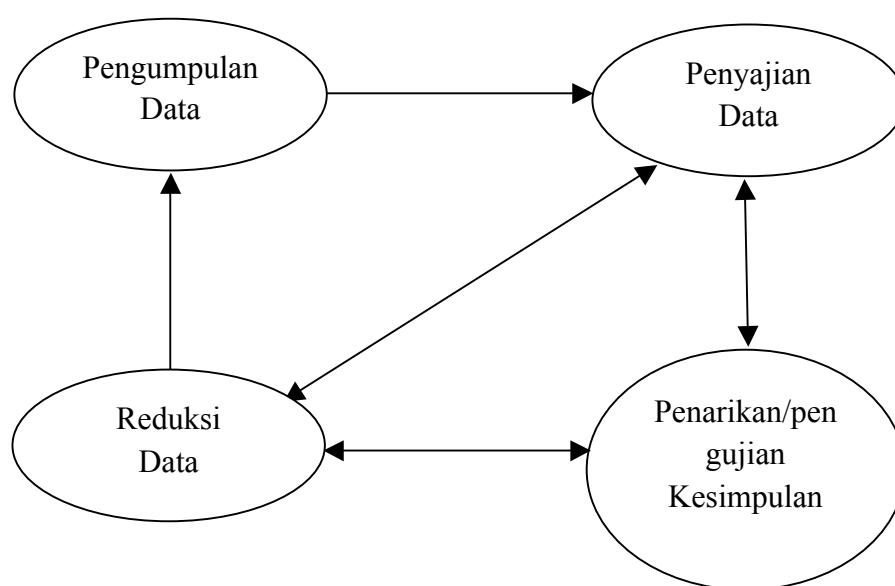
Untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian di perlukan usaha lewat cara-cara atau teknik pengumpulan data seperti yang dijelaskan diatas, sehingga proses penelitian dapat berlanar dengan lancar. Sumber data dan jenis data terdiri dari atas kata-kata dan tindakan. Adapun yang menjadi sumber data Primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang secara langsung di peroleh dari sumbernya, melalui wawancara secara cermat melalui tanya jawab atau interview secara mendalam kepada informan untuk melengkapi hasil wawancara yang dilakukan dari pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang dipeloh dari studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, dokomen-dokemen tertulis, internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Mile dan Huberman yaitu terdapat terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. Pertama, reduksi data, yaitu peroses memilih, menfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstrasikan data dari berbagai sumbur data, misalnya dari hasil catatan lapangan, dokemen, arsip, dan sebagainya. Selanjutnya proses mempertegas, memperpendek, membauang yang tidak perlu, menentukan fokus dan mengatur data sehingga kesimpulan bisa dibuat. Kedua, penyajian data, seperti merakit data dan menyajikannya dengan baik supaya lebih muah dipahami. Penyajian bisa berupa matriks, gambar/skema. Jaringan kerja,

tebel dan seterusnya. Ketiga, menarik kesimpulan/pengujian, proses penarikan kesimpulan awal masih belum kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir dilakukan setelah pengumpulan data berakhir. Pengujian diperoleh lewat proses negosiasi/konsensus antar subjek, berdiskusi dengan sejawad, memeriksa data anantara anggota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat gambar berikut :



Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman

Menurut Ismar (2015 :51) Proses Pemelihan data diatas didukung dengan analisis data kompensional. Teknis analisis kompensional digunakan dalam analisis kualitatif untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kotras satu sama`lain dengan melihat proses awal (Domain) untuk dianalisis secara terperinci.

Analisis kompensional dilakukan setelah peneliti mengumpulkan cukup banyak fakta/informasi yang berasal dari wawancara mendalam dan hasil observasi langsung. Data-data tersebut dipisahkan berdasarkan kontras antar

elemen, kemudian di analisis dengan membentuk domain-domain yang bisa mewadahnya dengan teori dan komponen-komponen dalam teori. Dalam hal ini unsur-unsur yang berkaitan dengan corak produksi rumah tangga petani dalam memenuhi kebutuhan pokoknya yang telah menjadi dampak adanya kemitraan, selanjutnya diklasifikasi berdasarkan penyajian data yang dikaitkan dengan teori. Klasifikasi ini ditunjukkan untuk menfokuskan pada target penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Proses penarikan dan pengujian kesimpulan dilakukan dengan menganalisis data-data yang disajikan dan diklasifikasi dengan diperhadapkan pada teori hingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

Data dan kesimpulan yang dianggap kurang kuat dalam penelitian ini kemudian dilakukan verifikasi kembali terhadap keabsahan data dengan mengumpulkan data kembali di lapangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan ciri dan unsur yang relevan dengan isu dan permasalahan yang dicari sehingga penyelidikan lebih dapat dipusatkan pada hal-hal yang telah dirincikan, sehingga pada akhirnya mampu menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan lapangan dan analisis yang objektif atas situasi konkret.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Ko'mara merupakan salah satu desa dari 12 desa dan 6 kelurahan yang termasuk dalam wilayah kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Desa ini berjarak kurang lebih 12 Km dari ibu kota kecamatan, 20 Km dari ibu kota kabupaten, dan sekitar 50 Km dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Desa Ko'mara memiliki luas wilayah sekitar 20 kilometer persegi atau setara 2.029 Hektar. Desa ini sendiri terdiri dari 5 dusun yakni dusun Malolo, dusun Bontowa, dusun Pammukulu, dusun Tetetanrang, dan dusun Batang Terasa.

Secara administratif, Desa Ko'mara kecamatan Polongbangkeng Utara resmi menjadi desa definitif dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Barugaya
- Sebelah selatan : Desa Lattang
- Sebelah timur : Desa Kale Ko'mara
- Sebelah barat : Desa Timbuseng

Bila dilihat dari topografi desa ko'mara termasuk dataran yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan kebun dengan ketinggian rata-rata mencapai 300 meter dari permukaan laut, adapun luas lahan persawahan seluas 388.00ha, kebun 262.39 ha, hutan rakyat 97.00 ha, sehingga secara umum topografi desa ini juga merupakan dataran dengan bentangan hamparan sawah milik masyarakat dan areal perkebunan tebu yang cukup luas.

2. Kondisi Demografis

Dari Jumlah penghuni desa Ko'mara kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar akan dijabarkan melalui tabel berikut :

Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Laki-laki	837	50,4 %
2	Perempuan	826	49,6 %
	Jumlah	1.665	100 %

Sumber Data : Kantor Desa Ko'mara 2018

Dari tabel 4.1 dapat di lihat bahwa secara keseluruhan penduduk desa Ko'mara dihuni oleh 1.665 jiwa yang terdiri dari 837 jiwa penduduk laki-laki, atau persentase sebesar 50,4 % dan 826 jiwa penduduk perempuan dengan persentase sebesar 49,6 %.

Dari profil desa juga bisa diperoleh informasi, bahwa jumlah penduduk terdiri dari 458 Kepala Keluarga. Jika di lihat dari jumlah penduduk tersebut di atas dengan jumlah 485 KK atau 1.665 jiwa maka bisa dipastikan bahwa desa ko'mara juga termasuk desa yang kategori kepadatan penduduknya kurang padat hal ini terlihat dari kepadatan penduduk yang hanya 1,3 Ha/Penduduk.

Untuk distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya akan di jabarkan juga dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Distribusi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	%
1	Belum Sekolah	99	6%
2	Tidak Sekolah	573	22%
3	TK	52	3%
4	SD	468	28%
5	SMP	218	13%
6	SMA	316	19%
7	Perguruan Tinggi	58	3%
8	Tidak Tamat SD	79	5%
	Total	1,665	100%

Sumber : Kantor Desa Ko'mara 2018

Dari tabel 4.2 dapat kita lihat dari 1.665 jiwa terdapat 99 atau 6 % yang belum sekolah, 573 atau 22 % tidak sekolah, 52 atau 3% baru dibangun sekolah TK, 468 atau 28 % duduk dibangun Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA masing-masing 218 dan 318 atau 13% dan 19 %, Perguruan Tinggi sebanyak 58 atau 3 %, dan yang tidak tamat SD sebanyak 79 atau 5 %.

B. Identitas dan Informasi dari informan

Deskripsi tentang kehidupan ekonomi petanibaik sebelum dan setelah adanya PTPN XIV Pabrik Gula takalar dan pola kerjasama kemitraan yang terbangun di antara petani dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar akan lebih awal membahas tentang identitas dan informasi dari informan yang mengambil dari sisi petani di desa Ko'mara itu sendiri dan pengurus koperasi Cinta Damai Sejahtera yang berkedudukan di desa Timbuseng yang melakukan kerjasama kemitraanserta dorongan yang menjadikan kerjasama kemitraaan itu sendiri bisa terbangun.

1). Pasima, Dg. Ngampa (87 tahun)

Pasima Dg. Ngampa adalah seorang kakek yang tempat tanggal lahirnya disesuaikan dengan ingatan tahun yaitu sekitar tahun 1930-an dan selebihnya mengikuti pemerintah setempat di dalam penetapan administrasi berupa Kartu Keluarga (KK) yang ditetapkan lahir di Malolo, 31 Desember 1930. Di masa mudanya termasuk dalam pejuang pembebasan nasional mengusir belanda, dia mengatakan bahwa masyarakat polongbankeng tergabung dalam pejuang Lipang Bajeng, untuk itulah dia termasuk orang yang menerima gaji vetaran. selain jadi veteran dia juga dulu adalah salah satu anggota STP-Takalar yang aktif dalam memperjuangkan lahannya yang masuk dalam pembebasan lahan oleh perusahaan, sekitar 4 ha lahannya masuk dalam pembebasan lahan dan yang tersisa hanya 20 are lahan pertanian dan tanah yang ditempati rumahnya saat ini. Dia juga saat ini merupakan salah satu anggota kelompok tani Julu Te'ne yang berada di desa Ko'mara.

Dg. Ngampa menceritakan kondisi kehidupan ekonomi saat sebelum dan setelah adanya perusahaan, bahwa saat itu, dia fokus bekerja sebagai petani dan juga mengembala beberapa ekor kerbau. Dalam ingatannya, sekitar 9 ekor kerbau pernah dipeliharanya, pada saat pembebasan lahan dimulai sejak tahun 1981, lahan yang dimilikinya yang terdiri dari sawah dan kebun yang luasnya mencapai 4 ha masuk dalam bagian dari pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan, Selain kehilangan lahan, dia juga menjadi korban atas situasi di mana perampokan marak terjadi di polongbankeng, hampir seluruh kerbau miliknya raip di sikat oleh gerombolan perampok dan selebihnya dia jual untuk mengurangi kerugian. Dg. Ngampa menyakini, situasi ini lahir akibatnya banyaknya masyarakat yang

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat dari tidak adanya sumber penghidupan utama mereka setelah banyaknya lahan masuk dalam pembebasan lahan.

Saat terjadi pembebasan lahan, Dg.Ngampa mengatakan bahwa dia secara terpaksa memberikan lahannya karena juga dijanji hanya akan dikotrak selama 25 tahun, dan dijanjikan lapangan kerja dan apalagi pada saat itu, yang melawan pembangunan akan di tuduh sebagai bagian dari PKI. Dia menunjuk rumahnya, lihatlah rumah yang sudah reok ini, betapa keadaan setelah masuknya perusahaan justru membuat kehidupan saya lebih jauh memprihatinkan, selain menunjuk rumahnya dia juga menunjuk rumah Dg. Sialle yang pas berhadapan dengan rumahnya yang hanya dipisahkan jalanan beraspal yang mulai berkerikil, Dg. Sialle jauh menderita karena tanah yang tersisah tinggal tanah yang ditempati rumahnya saat ini, *ianusanna' kamase-masena talasana, jai ana' nanikatalasi, mingka akkokoji jamangna*. ada juga dari kami diperlakukan tidak manusiawi karena tidak mau tanahnya masuk dalam pembebasan lahan, lahan tetap diukur oleh panitia 9 pada saat itu yang bertugas dalam mengukur dan memberikan ganti rugi lahan dan juga mereka pula yang menentukan secara sepihak ganti rugi yang kemudian di masukkan dalam amplop dan dilemparkan ke depan rumah-rumah warga. Setelah memasuki tahun 2007 kami mulai mempertanyakan masa kontrak perusahaan akan tetapi. mereka telah menganggap bahwa kami telah menjual tanah kami, sehingga ada beberapa peristiwa memanas terjadi, seperti di tahun 2009 adalah peristiwa dimana dirinya bersama dengan masyarakat yang lain berhadap-hadapan dengan polisi saat kami intens meminta pengembalian lahan

karena masa kotraknya kami hitung sudah selesai. Lebih dari 20 orang mendapat surat penangkapan dan sanksi dan adapula yang masuk dalam kurungan sel penjara karena dianggap telah memprokasi dan merusak tanaman tebu saat itu, aparat kepolisian yang menjadi pengamanan saat itu bertindak seperti belanda, bukan menjadi pelindung masyarakat justru melindungi perusahaan dan menembaki kami, saya sendiri pernah ditembak dan memang minta ditembak karena sangat jengkel dengan mereka. Saya mengangkat parang untuk memperjuangkan tanah saya yang sudah lama diambil oleh perusahaan, memasuki tahun 2012, bersama dengan keluarga dan masyarakat lainnya berhasil mengambil alih sebagian lahan, Tidak kurang dari 1 ha dan saya tanami padi hingga tahun 2014, di tahun 2014 perusahaan bersama dengan polisi kembali mengola lahan dan merusak tanaman yang telah kami tanami, hingga pada tahun akhir 2015 di sepakati akan melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan, kerjasama kemitraan yang saya pahami sebelumnya adalah bahwa kami diberikan sepenuhnya kewenangan atas tanah kami dan kami tanami tebu dengan bantuan dana dari pemerintah kabupaten dan bantuan teknis dari perusahaan. Akan tetapi, sampai saat ini tidak semua dari kami mendapat lahan untuk menanam tebu, bahkan setelah kelompok kami mengola lahan itu kembali diambil alih sama perusahaan. Tidak ada niatan untuk benar-benar membantu kami. Dg. Ngampa kembali menggambarkan, sejak adanya kerjasama ini, anak saya yang mengerjakan lahan seluas 0, 63 are harus kesana kemari mencari bantuan pinjaman, tidak murah jika mau menanam tebu, mulai dari pengolahan sampai panen itu butuh biaya yang besar, pas panen tebu saya harus hampir satu minggu baru keluar hasil DO-nya,

bulan sembilan kemarin hasil tebu saya hanya dinilai 2,7 juta sudah di potong bagi hasil yang katanya 45 % -nya masuk dalam perusahaan, padahal biayanya lebih dari 2x lipat dari hasil tebunya, dari informasi yang saya dapat bahwa masa produktif tebu itu selama 5 tahun dan hasil panennya baru akan maksimal ketika penen ketiga sampai kelima. Saya berharap semoga demikian, walaupun harus tidak mendapat apa-apa dalam mengerjakannya selama 2 tahun, kami tidak bisa banyak berharap dari hasil tebu ini, apalagi jika tidak ada bantuan sama sekali. Saat ini saya mengandalkan lahan yang dikerjakan oleh anaknya saya yang seluas 20 are sawah tadah hujan untuk makan sehari-hari.

2). Idris Nyaling (45 tahun)

Idris Nyaling lahir di Bontoa 3 Mei 1973, merupakan kepala keluarga dari seorang istri dan memiliki 5 Anak. Riwayat pendidikannya adalah tamat SMP, Dia menceritakan, bahwa saat dia dibangku kelas 5 SD, pembebasan lahan masyarakat oleh PTP 24-25 membuat orang tuanya harus menyerahkan 4 ha lahan yang terdiri dari sawah dan kebun atau seluruh lahan milik orang tuannya masuk dalam pembebasan lahan saat itu, dan yang tersisa hanya lahan yang ditempati rumah saat ini, orang tuanya mendapat ganti rugi dari pembebasan lahan di kantor desa dan tidak bisa menolak karena kepentingan pemerintah untuk pembangunan, selain itu juga, sosialisasi yang dilakukan pada saat itu yang banyak melibatkan aparat pemerintah termasuk juga aparat TNI saat itu, mengharuskan orang tuanya menyerahkan tanah mereka. Dan tanah juga hanya di kontrak selama 25 tahun dan bisa dipepanjang jika pemiliknya lahan tersebut sepakat nantinya. Dari pembebasan lahan tersebut, mereka juga dijanjikan bahwa perusahaan nantinya

akan memberikan peningkatan kesejahteraan petani karena perusahaan akan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka.

Idris Nyaling mengatakan bahwa sebelum adanya perusahaan, kehidupan ekonomi keluarga tergolong cukup sejahtera, kami 7 bersaudara yang dihidupi dengan luas lahan 4 ha yang dimiliki oleh orang tuanya, saat itu mereka fokus hanya menanam padi dengan bergantian dengan tanaman lain seperti jagung, ubi dan tanaman lain ketika waktu musim kemarau tiba. Selain itu, kakak pertama saya bisa sampai sekolah pendidikan guru (SPG), anak kedua tamat SMA, anak ketiga sampai SMA juga, dan barulah dia hanya tamat SMP dengan kerja keras seperti mengambil bambu dari gunung dan menjualnya sendiri karena pada saat awal masuknya perusahaan saya masih duduk kelas 5 SD dan kedua adiknya hanya bisa tamat SD yang juga setelah masuknya perusahaan. keadaan ekonomi keluarganya mulai terpuruk sejak masuknya perusahaan pabrik gula.

Dia menggambarkan bagaimana perubahan kondisi ekonomi keluarga berdasarkan dari perjalanan hidupnya. Dia menceritakan bahwa sejak lahan mereka masuk dalam pembebasan lahan oleh perusahaan, bapaknya hanya bekerja sebagai buruh tani, sedangkan ibunya bekerja serabutan, sempat beberapa kali ibunya jadi buruh pengaspalan di Gowa dan Takalar, dan kadang-kadang menjadi buruh tebang di perusahaan pas musimnya..

Setelah tamat SMP dia tidak bisa lagi melanjutkan pendidikannya karena tidak ada lagi biaya, akhirnya dia menganggur dan sempat menjadi buruh tebang di pabrik gula selama setahun. Pada tahun 1992 dia merantau ke Mamuju dan bekerja selama satu tahun menjadi buruh perusahaan rotan (PT. Surya). Dia

memutuskan berhenti dan pulang kampung karena upah yang sangat rendah dengan resiko kerja yang berbahaya karna harus menyusuri hutan dari mamuju sampai daerah palu yang masih terkenal saat itu dengan ular-ular besarnya. Pada tahun 1993 harapkan perbaikan nasib muncul ketika dia bersama rekan kerjanya ketika masih di mamuju bertemu dengan seorang perempuan paruh bayah yang sedang mencari tenaga kerja yang akan dikerjakan di Malaysia, tepatnya adalah perusahaan sawit, harapan besar muncul seiring dengan janji manis yang diberikan dan perjalanan yang baik dalam perjalanan awalnya menuju kalimantan. Namun sesampainya di Nunukan kalimantan, perempuan yang menjanjikannya sudah tidak ada (menghilang) dan dia bersama 4 rekannya pada saat itu disekap di sebuah rumah dan dijaga oleh beberapa orang yang bertubuh besar. sehari kemudian mereka diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan perahu cepat, mereka disembunyikan dibagian perut perahu dan ditutupi dengan lantai perahu. Pada saat itu mereka berjumlah delapan orang yang diberangkatkan. Setibanya di daratan, mereka dijemput disebuah dermaga sungai, mereka kemudian dibawa dengan menggunakan mobil melewati hutan dan akhirnya sampai disebuah perusahaan sawit, yang belakang mereka ketahui berada di wilayah Sabah Malaysia. Setelah mendapatkan arahan dari mandor perusahaan barulah dia sadar bahwa mereka telah dijual atau menjadi korban human trafficking. Mandor menyampaikan bahwa mereka harus patuh dan bekerja keras untuk membayar hutang biaya transportasi dan biaya pembelian mereka.

Setelah dua bulan bekerja di perusahaan tersebut sebagai buruh kebun tanpa menghasilkan upah sedikitpun dan mendapat perlakuan yang tidak

manusiawi dari perusahaan, dia bersama 3 rekannya akhirnya melarikan diri. Mereka melarikan diri masuk ke hutan dan berniat kembali ke Indonesia dengan melalui hutan perbatasan dengan bekal beras dan korek api. Setelah 3 hari berjalan dalam hutan, salah satu temannya tidak sanggup lagi berjalan karena luka-luka, akhirnya mereka menghentikan pelarian dan masuk ke sebuah perkebunan sawit yang ternyata masih perusahaan yang sama dengan perusahaan sebelumnya namun berbeda mandor. Mereka memutuskan bekerja di perusahaan tersebut karena mendapat janji perlindungan oleh mandor. Di perusahaan tersebut mereka sudah bisa mendapatkan upah karena sudah terbebas dari hutang, namun beban pekerjaan yang dijalani sangat berat bahkan cenderung tidak manusiawi. Mereka bekerja dari jam 6.30 pagi sampai 6 sore, mereka terus bekerja disepanjang waktu, beristirahat hanya untuk sholat dan makan. Pengawasan dari mandor yang ketat, beristirahat sejenak saja mereka akan langsung mendapatkan teguran dari mandor, bahkan biasa sampai mendapat pemotongan upah.

Setelah satu tahun bekerja di perusahaan tersebut, pada tahun 1994, dia sakit malaria selama satu bulan, dan akhirnya dia dipulangkan ke Indonesia oleh perusahaan. Dia mengatakan bahwa pengalaman tersebut adalah pengalaman paling pahit dalam hidupnya. Di tahun yang sama dia masuk di PT. Barawaja (perusahaan besi) di Makassar, namun tidak sampai satu tahun dia berhenti karena minimnya upah yang dia terima. Pada tahun 1995 dia menjadi tukang becak di Makassar dan di tahun yang sama juga dia menikah, dan tetap menjadi tukang becak. Pada tahun 1998 dia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dan beralih profesi menjadi *pa'gandeng* ubi dan hasil pertanian lainnya dari

polongbangkeng ke Makassar, bermodalkan dengan motor butut yang di beli dengan uang pinjaman.

Sejak saat itu dia mulai membangun rumah yang lebih tepatnya disebut gubuk untuk dia tempati bermukim bersama istri dan anak pertamanya, dia menceritakan bahwa saat itu, mereka menghadapi penderitaan yang luar biasa. Rumah berlantaikan tanah, dinding yang terbuat dari bambu, dan atapnya yang terbuat dari rumput ilalang. Pernah selama 2 hari tidak memiliki beras, dan mereka baru bisa makan setelah mendapatkan beras dari tetangga.

Sejak tahun 1999 dia mulai intens kembali berjualan di pasar pa'baeng-baeng Makassar, profesi yang masih digelutinya hingga saat ini. Sejak dia berjualan keadaan ekonominya sedikit membaik, meskipun masih sering juga menghadapi kesulitan. Hingga tahun 2008, dia mulai intens berjuang atas pengambalian tanah bersama dengan ribuan masyarakat polongbangkeng yang memiliki kondisi ekonomi yang sama dengannya. Di tahun 2012 sudah mampu menguasai lahan dari lahan yang telah habis masah kontraknya, sehingga intensitas bejualan di pasar pa'baeng-baeng mulai dikurangi karena dia sudah bisa bertani.

Idris Nyaling mengatakan bahwa sejak bisa bertani di atas lahan yang sebelumnya dikuasai oleh PTPN, keadaan ekonominya berubah secara baik. Jika sebelumnya penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, saat itu dia telah mampu membiayai pendidikan anak pertamanya pada tahun 2014 sampai kelas 1 SMA, Meskipun baru SMA namun itu telah membuanya sangat bangga, harapan terbesarnnya anaknya kelak bisa lanjut ke

pendidikan tinggi, dia sangat ingin anaknya kuliah hukum agar nantinya bisa mengabdikan kepada perjuangan rakyat, hal itu tidak terlepas dari melihat hukum saat ini yang seolah buta dan menjadi kutukan bagi masyarakat yang memperjuangkan atas sumber kehidupan. Selain itu, dia sedikit demi sedikit membiayai rumahnya, akan tetapi diakhir 2014, tanah itu kembali diambil secara paksa oleh perusahaan dengan cara pengolahan tanaman yang sudah ditanami beberapa jenis tanaman seperti padi dan umbi-umbian, hingga pada tahun itu juga merupakan tahun yang kembali memanaskan antara masyarakat dengan perusahaan.

Idris Nyaling juga mengatakan bahwa keberadaan PTPN tidak pernah memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat, yang terjadi adalah perusahaan tersebut menguasai lahan yang sangat besar, disisi lain masyarakat tidak memiliki lahan, banyak dari masyarakat harus keluar merantau ke daerah lain dan bekerja serabutan, sebagian lagi bertahan yang masih sedikit memiliki lahan dan bekerja sebagai buruh tani dan buruh tebang, Dia tidak mengingkari bahwa saat panen tiba tersedia peluang kerja bagi masyarakat untuk menjadi buruh tebang dan buruh angkut, namun panen tebu hanya satu kali dalam setahun. Sebelum masuknya, perusahaan menjanjikan akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat, mungkin lowongan itulah yang mereka maksud, di mana masyarakat hanya dipekerjakan satu kali dalam satu tahun.

Tentang perjuangan dan lahirnya kerjasama kemitraan, Idris Nyaling mengatakan bahwa, umumnya masyarakat setelah masuknya perusahaan banyak yang berjuang dengan mengambil jalan keluar merantau ke daerah lain maupun ke

luar negeri, dan hampir tidak ada gesekan sampai dengan tahun 2007 karena masyarakat juga menganggap bahwa masa kontrak selama 25 tahun itu berakhir pada tahun 2006-2007. Sampai tahun 2007 perusahaan menganggap bahwa tanah yang telah masuk dalam pembebasan lahan sejak tahun 1981-1982 itu telah diganti rugi sehingga secara otomatis masyarakat tidak memiliki hak lagi untuk tanah, Sejak saat itu pula, masyarakat mulai mengambil alih lahan yang yang tidak bisa dikerjakan oleh perusahaan, karena kenyataannya tidak semua lahan yang masuk HGU yang lebih dari 6 ribu ha tersebut bisa dimanfaatkan secara baik oleh perusahaan, dari proses pengambil alihan tersebut banyak petani yang maksud daftar kriminalisasi, bahkan saya sendiri beberapa kali dibawah ke kantor polisi karena dianggap sebagai prokator, penyerebotan lahan tebu, dan membakar lahan tebu. Sehingga beberapa situasi sering memanas, seperti peristiwa di tahun 2009, peristiwa Pakkkawa namanya yang banyak dari kami di kriminalisasi, dipenjarakan, bahkan 4 orang kenak tembak dari pihak kepolisian yang terlibat dalam pengamanan konsolidasi tanah, kemudian peristiwa Desember 2013 yang juga menjadikan masyarakat bentrok dengan pihak perusahaan dan peristiwa oktober 2014 di mana terjadi bentrokan besar yang juga melibatkan masyarakat dengan pihak perusahaan yang dikawal ratusan aparat Brimob.

Dari berbagai peristiwa yang ada, Idris Nyaling sering terlibat baik dalam sengketa maupun didalam pertemuan-pertemuan dalam rangka mencari jalan keluar, termasuk ketika dia menjadi salah satu perwakilan masyarakat yang melakukan study banding ke Tulung Agung Jawa Timur. Study tersebut adalah kegiatan bersama antara perwakilan organisasi STP-Takalar tempat dia belajar

selama selama ini, kemudian pihak PTPN XIV Pabrik Gula Takalar dan pemerintah kabupatentakalar yang memfasilitasi. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempelajari pola kerja sama yang dipraktekkan di Tulung Agung yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan perusahaan, dalam hal ini di Tulung Agung masyarakat bisa lebih baik kesejahteraannya dan perusahaan juga bisa memproduksi dengan normal dan menghasilkan keuntungan karena disokong oleh masyarakat. Dari studi banding itu, Dg. Nyaling melihatnya karena praktek yang dilakukan adalah HGU perusahaan tidak terlalu besar, sehingga sumber bahan bakunya adalah tebu yang ditanam oleh masyarakat secara mandiri. Kalau seperti itu, kami bisa menerimahnya dengan baik, karena pola kerjasama demikian cukup bisa memberikan ruang kehidupan dan kontrol produksi bagi masyarakat.

Namun dari tahun 2014 wacana program kerjasama kemitraan baru bisa dilakukan pada akhir tahun 2015, lemahnya realisasi menjadikan masyarakat harus melakukan reklamasi lahan sejak awal di beberapa lokasi, yang salah satunya ada di blok K dan N yang berada dalam wilayah desa ko'mara, setelahnya barulah ada dorongan dari pemerintah untuk segera membuatkan satu koperasi yang belakangan menaungi masyarakat yang berada dalam satu bentuk kelompok tani yang menjaring kerjasama dengan perusahaan, hal ini diambil, agar masyarakat tidak menanam tanaman lain selain tanaman tebu, yang justru akan mendorong kembali lahirnya konflik.

Terkait dengan realisasi kerjasama kemitraan, Idris Nyaling mengatakan bahwa kerjasama terbangun di Tulung Agung dengan yang ada disini sangat jauh

berbeda, kalau di Telung Agung masyarakat betul-betul mengola tanahnya dan mendapat perhatian baik dari perusahaan maupun pemerintah setempat, masyarakat di bantu dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan bantuan dana untuk mengola lahan, kalau disini kotrak kerjasama kemitraannya, lahan tetap mejadi kepemilikan PTPN XIV, hal ini terlihat dari draf kotrak kerjasama yang dibuat dan telah berubah dua kali yang juga sampai saat ini belum zah, masalah awalnya adalah, pihak perusahaan mengeluarkan sekitar 125 ha untuk kami kerjakan untuk menanam tebu di lahan BB 40 yang berada di desa Timbuseng. Hingga saat ini, Kotrak kerjasama kemitraan belum juga ditandangi oleh pihak perusahaan dan pemerintah, sehingga proses reklamian tetap kami lakukan di beberapa blok seperti pada blok K dan N yang ada di desa ko'mara.

Saat ini, Koperasi sudah terbentuk dengan nama Koperasi Cinta Damai Sejahtera, terbentuk sejak akhir tahun 2015 dan menaungi beberapa kelompok tani. Idris Nyaling mengatakan, pendirian koperasi selain dari memastikan lahan HGU yang akan di kerjasamakan bisa ditanami tebu oleh masyarakat juga merupakan satu langkah untuk pengucuran bantuan anggaran nantinya, akan tetapi sampai saat ini, kucuran anggaran tidak pernah ada, sehingga mengharuskan kami mencari pinjaman uang yang hanya cukup untuk pengolahan tanahnya. 1 ha tanah setidaknya membutuhkan anggaran minimal 2 juta, belum termasuk bibit yang harganya tidak murah, 1 ton bibit seharga 500 ribu yang belum termasuk biaya mobil angkutnya yang kebanyakan didatangkan dari jenepono. Dalam satu mobil pengangkut setidaknya membutuhkan biaya sekitar 4-5 juta. Hal itu mengharuskan beberapa dari kami, seperti pada kelompok tani kami harus

menanam jagung dilahan pengolahan untuk persiapan biaya bibit nantinya, akan tetapi, jagung yang baru berusia dua bulan harus kami relakan pada saat perusahaan masuk merusak dan mengolah kembali karena tidak sesuai dengan izin kerjasama. Idris Nyaling sendiri memiliki utang yang terbagi atas utang pengolahan sebanyak 2,5 juta dan utang bibit yang tidak kurang dari 3 juta.

Tingginya biaya untuk tanaman tebu, membuat mereka harus terjerat utang, Idris nyaling mengatakan, saat ini luas lahan yang saya tanamai tebu kurang lebih 1,25 ha. Dari luas tersebut setidaknya dari proses pengolahan lahan, biaya bibit, biaya mobil angkut bibit, pemeliharaan berupa pupuk dan racun, biaya tebang dan mobil angkut hasil panen ke pabrik tidak kurang dari 15 juta, itupun belum maksimal dilihat dari hasil panen pertama ini yang hanya menghasilkan 28 ton atau senilai 14 juta dalam sekali panen. Selain dari biaya yang banyak, kerjasama kemitraan ini tidak bisa dikatakan dengan sebutan kerjasama kemitraan karena juga telah diatur sistem bagi hasil di mana pembagiannya 55 % untuk petani dan 45 % untuk perusahaan. Sehingga pada posisinya, kami hanya ditempatkan sebagai pekerja lahan bukan sebagai pemilik lahan. Ini tidak jauh berbeda dengan model *koko* atau bagi hasil penen yang umumnya selama ini diterapkan masyarakat pada jenis lahan padi antara pemilik lahan dan pekerja lahan yang ada di polongbangkeng. Kalau mengharap penghasilan dari sini, kami betul-betul tidak akan bisa makan. Apalagi harapan untuk membiaya pendidikan anak, anak pertama yang saya harap bisa lanjut ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan hukum secara terpaksa harus hanya bisa sampai tamat SMA saja, anak kedua hanya tamat SMP dan tidak melanjutkan lagi ke tingkat SMA,

Untuk itu, beberapa jenis pekerjaan saya lakukan seperti pekerjaan sebelumnya yaitu berjualan buah-buahan di pasar pa'baeng-baeng kembali saya lakukan, intesnya pada saat bulan puasa seperti yang akan datang, pekerjaan penggemukan sapi juga kadang saya lakukan dan mengerjakan sawah orang lain yang sudah memasuki 3 tahun seluas 25 are belakang ini.

3). Ahmad, Dg. Ila (66 Tahun)

Ahmad Dg. Ila lahir tanggal 23 Maret 1952, adalah salah satu informan peneliti yang bertempat tinggal di desa timbuseng, beragama islam, berpendidikan terakhir PGA selama 4 tahun. Ahmad Dg. Ila merupakan kepala rumah tangga dari seorang istri dan memiliki 4 anak, 2 laki-laki dan perempuan, semua anaknya telah menikah. Selain bertani dia juga merupakan pensiunan staf administrasi sekolah pada tahun 1980 sampai 2008, dari tahun 2007 melakukan perjuangan atas tanah hingga pada pembentukan organisasi Serikat Tani polongbangke (STP) Takalar dan menjadi salah satu pimpinan organisasi yang menjadi alat perjuangan masyarakat polongbangkeng atas tanahnya tahun 2009-2015. Saat ini Dg.Ila adalah bendahara koperasi Cinta Damai Sejahtera sejak pembentukannya tahun 2015 silang. Dg.Ila mengatakan bahwa pembentukan koperasi adalah bagian dari penyelesaian masalah masyarakat yang terhimpit dengan masalah pemenuhan akan kebutuhan pokok dalam keluarga karena tanahnya menjadi lahan yang masuk dalam pembebasan lahan sejak tahun 1978 oleh PT. Madu Baru yang kemudian bermasalah dan akhirnya dilanjutkan oleh PTP. 24-25 di tahun 1982 dan sekarang menjadi PTPN XIV. Sejak masa pembebasan lahan, banyak masyarakat yang sesungguhnya tidak sepakat, berbagai penelohan dan mendorong

lahirnya sengketa masyarakat dengan pihak PTPN. Selain itu disisi PTPN juga banyak melibatkan pihak termasuk aparat kepolisian dalam mengintervensi, intimidasi, kriminalisasi, pemenjaraan, dan penembakan terhadap masyarakat yang berjuang atas tanahnya hingga pada pertengahan tahun 2015. Dari konglik sengketa lahan, berbagai upaya penyelesaian masalah dilakukan, yang salah yang pernah dilakukan di tahun 2009 oleh perusahaan terhadap beberapa kelompok masyarakat adalah melakukan kerjasama dengan istilah program tebu rakyat, dan berbagai upaya lainnya seperti melakukan study banding yang pernah dilakukan di Tulung Agung Jawa Timur, yang mengikutsertakan masyarakat yang bersengketa untuk memahami satu kerjasama kemitraan yang dijalankan di daerah jawa tersebut, hingga pada akhirnya pada tahun 2014 disepakati akan menjalin kontrak kerjasama kemitraan seperti halnya yang telah dipelajari dari studi banding, kemudian realisasikannya akan di fasilitasi oleh Pemerintah kabupaten dalam pembentukan koperasi dan pembentukan Gapoktan (kelompok tani) untuk Daftar Calon Lahan/Calon petani yang akan menjadi mitra perusahaan dalam memenuhi pasokan tebu. Pembentukan Koperasi selanjutnya adalah sebagai penyalur anggaran dana dari pemerintah kabupaten takalar untuk membiayai segala kebutuhan petani dalam proses menanam tanaman tebu, selain dari koperasi memiliki salah satu tujuan untuk penyaluran anggaran, koperasi juga harus mampu didorong dalam kesepakatan-kesepakatan anggota yang didalamnya melakukan usaha mandiri sendiri diluar dari pembahasan tebu tersebut. Akan tetapi, selaku bendahara koperasi, sampai di tahun 2018 ini, fasilitasi pelatihan-pelatihan dalam koperasi sama sekali tidak pernah berjalan dan tak sepersen pun

anggaran dari Pemerintah Kabupaten Takalar yang masuk untuk kepentingan petani yang mejadi mitra perusahaan. Alhasil dari ketidaktahuan menjalankan koperasi dengan baik, kami jalankan dalam bentuk penetapan iuran anggota, selebihnya tak ada lagi, melihat dari banyaknya anggota yang tidak menanam tebu karena tidak memiliki biaya dan sudah banyak anggota yang fokus dalam mencari nafkah dari berbagai pekerjaan seperti kembali merantau ke daerah lain karena tidak memiliki lahan sama sekali, hal ini tergambar dari salah satu Desa Parang Luara' yang keanggotaan koperasi juga banyak disitu.

Saat ini, anggota koperasi yang tidak menanam tebu sangat banyak, harapan terbesarnya hanya bisa menunggu kembali lahannya dikembalikan pada saat masa HGU perusahaan habis di tahun 2023-2024 yang akan datang. Dg. Ila menggambarkan bahwa Kotrak Kerjasama kemitraan juga masih berbentuk Draf semata, berbagai upaya yang kami lakukan untuk adanya penandatanganan Draf yang dibua perusahaan sendiri dan mengganti beberapa isi drafnya yang memberatkan petani. Petani yang sudah terlanjur menanam tebu harus terjerat dalam utang pinjaman karena biaya yang besar untuk menghasilkan tegaknya tebu di atas lahan, selain itu petani dihadapkan pada sistem bagi hasil yang sangat merugikan, keterlibatan perusahaan dalam memberikan bantuan manajemen dan teknis budidaya tebu juga tidak ada sama sekali, padahal itu sangat penting untuk membantu produksi petani bisa jauh lebih baik. Dalam isi draf yang ada mewajibkan perusahaan memfasilitasi petani dalam berbagai bentuk pelatihan-pelatihan teknis dalam memberdayakan tebu untuk kepentingan pasokan pabrik. Kata Dg. Ila, salah satu isi drafnya birisi tentang pembagian 45 % untuk

perusahaan dan selebihnya untuk petani. Penandatanganan dan proses menjalankan bantuan kepada petani sama sekali tidak ada, akan tetapi pas panen tiba bagi hasil tetap ada dengan cara pemotongan yang kisarannya kami tidak ketahui, yang pastinya petani dalam satu tahun ini dengan biaya yang sangat besar hanya mampu berproksi yang sangat kecil dalam setahun atau sekali musim panen. Kalau seperti ini terus, saya menyakini dimasa habis masa HGU jika perusahaan juga belum mau memperhatikan petani dan tidak mau mengembalikan tanah petani seutuhnya dengan desakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal maka akan kembali sesuatu masalah yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya.

4). Basir Tutu, Dg. Toro (66 Tahun)

Basir tutu Dg. Toro lahir di Bontoa, 1 November 1952, Beragama Islam, bertempat tinggal di desa Timbuseng, Pendidikan terakhir PGA (setingkat dengan SMP) selesai pada tahun 1972. Kepala keluarga dari dua orang istri, dan sudah memiliki 4 anak. Sebelum akhir cerita panjang dari lahirnya kerjasama petani dengan PTPN. Dg. Torro Menceritakan, awal masuknya perusahaan masuk di polongbangkeng memiliki cerita lika-liku yang terutama tentang tanah yang orang disini tidak akan pernah melupakannya, seperti halnya saya secara pribadi, sebelumnya saya memiliki lahan yang tidak kurang dari 2 Ha, diatas tanah itulah saya mengantungkan hidupku. Namun ketika memasuki di tahun 1978, Program pembangunan negara berupa pabrik gula telah banyak menggeser kondisi kehidupan saya, terutama atas pemenuhan hidup sebagai petani. Dari pembangunan pabrik telah mengambil lahan dan menyisahkan tanah hanya 25 are

yang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti menanam tanaman pokok untuk makan itu tidak cukup, selebihnya masuk didalam pabrik untuk lahan tebu sebagai bahan baku gula. Sebagai akibat dari kurangnya dan bahkan banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan sama sekali, berbagai pekerjaan harus dilakukan agar bisa tetap bertahan hidup bahkan mencuri sekalipun tidak bisa dihindarkan, seperti setelah masuknya perusahaan marak terjadi pencurian ternak di daerah polongbangkeng itu sendiri bahkan diluar dari polongbangkeng seperti yang ada di jenoponto. Menurut Dg. Torro bahwa banyak informasi pencurian yang kerap terjadi di daerah luar seperti jenoponto, tidak jarang berasal dari daerah sini.

Dalam awal pembebasan lahan juga terjadi berbagai bentuk kejanggalan seperti ganti rugi yang tidak manusiawi, Dg. Torro menuturkan bahwa masuk PT. Madu Baru tidak bertahan lama karena akibat dari masalah internal perusahaan itu sendiri dan sistem ganti rugi ke pemilik lahan yang sangat tidak sesuai, seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa selain kehilangan lahan, ganti rugi lahan juga sama sekali tidak sepadan dengan biaya pengkuran lahan yang dibanyakan oleh masyarakat. Ganti rugi lahan hanya ditaksir dalam realisasinya dari Rp. 10- Rp. 20/ Meter. Akibatnya , banyak masyarakat yang mulai berani menolak dengan sedikit terbuka, karena desakan dari masyarakat dan terjadinya korupsi di internal dari PT. Madu Baru itu sendiri, sehingga pada tahun 1981-82 digantikan oleh PTP 24-25 yang melanjutkan pembebasan dan memperluas area pembebasan lahan dengan tetap mengacu pada SK Pemberian izin dari Bupati Takalar untuk PT. Madu Baru. Sejak masuknya PTP 24-25 Tekanan semakin menguat, jika ada petani yang menolak untuk dimasukkan lahannya dalam daftar pembebasan lahan

maka dihadapkan dengan TNI dan Polisi pada saat itu. Selain itu, sosialisasi bahwa tanah mereka hanya dikontrak selama 25 tahun dan dijanjikan akan lapangan pekerjaan setelah terbangunnya pabrik, membuat mereka surut karena ditambah dengan tekanan, maka mau tidak mau, mereka harus relakan lahan untuk pembangunan perusahaan perkebunan pabrik gula takalar. Setelah pembebasan lahan di tahun 1982, kenyataan justru menjadikan masyarakat tidak memiliki kepastian atas sumber kehidupan, banyak di antara kami yang bekerja serabutan, menjadi buruh tani, buruh tambang batu, buruh bangunan dan berbagai pekerjaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga itu teramat sulit. Sehingga banyak masyarakat yang menjadi pencuri ternak, keluar merantau di daerah lain dan sampai merantau keluar negeri seperti ke malaysia. Dg Torro menceritakan berbagai pengalaman kerja pribadinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti di tahun 1981 bekerja sebagai buruh tani dan mengejarkan/memanfaatkan lahan-lahan pinggiran tebu dengan menanam tanaman umbian, dari 1981 Sampai 1993 mulai bekerja tidak tetap, bekerja sebagai pekerja bangunan, dan berpindah-pindah tempat tergantung panggilan teman-temannya, yang pernah dia kunjungi sebagai pekerja bangunan (palu dan palopo) dan menjadi buruh tani di kabupaten sidrap, yang hasil penghasilannya paling untuk hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk makan, pada tahun 1993 dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit, dia mencoba mengadu nasib di kota makassar dan bekerja sebagai security di rumah sakit wahidin dengan upah pas awalnya sebanyak 75.000/bulan dan terus meningkat 2 tahun sekali sebanyak 50.000 dan baru bisa mencapai 900.000/bulan di saat dia mendekati pensiun

kerjanya. Saat pensiun dia mendapat pasongan Rp.3 juta dan itulah yang mengantarnya bisa sedikit memperbaiki rumahnya.

Dg. Torro setelah tahun 2007 mulai kembali kekampung dan aktif berdiskusi dengan masyarakat yang lain dan mencoba mempertanyakan “kenapa lahan belum dikembalikan padahal kontraknya sudah selesai” dan di tahun 2008 mulai mengerjakan lahan-lahan pinggiran perkebunan tebu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, hal ini dilakukan tidak lepas dari masalah utamanya adalah tekanan ekonomi yang semakin mencekik dan perusahaan tidak ada tanda-tanda untuk mau mengembalikan lahan-lahan masyarakat, sehingga beberapa kali berbagai kelompok yang dibangun oleh masyarakat masuk ke PTPN dan mempertanyakan tentang masa habis HGU. Dg. Torro mengatakan sejak tahun 2008 hingga tahun 2009 berbagai cara dilakukan masyarakat agar perusahaan segera mengembalikan lahannya, seperti melakukan pembakaran tebu, memasukan ternak masuk dikawasan tanaman tebu, sehingga pada tahun 2009 peristiwa besar terjadi yang masyarakat menyebutnya” Peristiwa Pakkawa” peristiwa di mana masyarakat berhadapan-hadapan langsung oleh pihak perusahaan dan TNI bersama Polisi, peristiwa di mana setidaknya 3 masyarakat terkena tima panas, 1 masuk dalam penjara dan puluhan di kriminalisasi.

Peristiwa yang terjadi di tahun 2009 adalah peristiwa yang membawa masyarakat semakin terpuruk, Dg. Torro mengatakan bahwa setelah peristiwa itu, banyak masyarakat yang semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan mendasarnya, banyak masyarakat yang di Intimidasi sampai kerumah-rumah, sehingga ketenangan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sangat terasa pada saat

itu. Pecahnya peristiwa Pakkawa yang ke gagalannya bagi petani tidak lepas dari dari beberapa anggota yang memiliki posisi yang sebelumnya berjuang bersama dan pada saat itu mereka terangkat jadi anggota dewan dan menerima tebus rakyat sebagai jalan keluar dari masalah yang ada, sehingga masyarakat yang masih konsisten berjuang atas tanahnya terpecah-pecah dan banyak yang lari ke gunung dan sekali-kali kembali ke rumah mereka, di gunung mereka menanam padi gogo akan tetapi mereka juga dihadapkan dengan konsesi hutan pemerintah. Ketidakamanan dan tekanan ekonomi membuat mereka bersatu dan membentuk satu organisasi mereka namakan organisasi Serikat Tani Polongbangkeng yang di singkat STP-Takalar. Dari organisasi inilah perjuangan atas tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka intensifkan, hingga pada tahun 2012 mereka telah mampu menguasai lahan mereka dan menanam tanaman seperti padi dan tanaman lainnya hingga tahun 2014, kondisi ekonomi pada saat menguasai lahan sangat drastis membaik mereka rasakan. Dg. Torro mengatakan bahwa setelah menguasai lahan mereka bisa menanam padi dan jenis tanaman lainnya, beberapa anggota telah mampu membeli kendaraan dan menyekolahkan anaknya, secara pribadi di tahun 2013 saya telah mampu membeli 1 kendaraan berupa motor. Selain itu ada beberapa kebudayaan gotong royong telah kembali ditengah-tengah kami, tahun 2014 bersama ribuan petani sempat sekali melakukan pesta panen raya padi, akan tetapi hal ini tidak begitu bertahan lama, berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan terus dilakukan, ada beberapa lahan anggota yang didalamnya terdapat jenis tanaman plawija diolah secara paksa oleh pihak perusahaan dengan menggerakkan brimob didalamnya. selain itu, upaya perusahaan melibatkan petani

dalam penyelesaian sengketa seperti melibatkan petani didalam study banding di Telung Agung Jombang, Dg. Torro mengatakan, saya merupakan salah satu perwakilan dari STP yang ikut didalam study banding, dalam studi banding juga mengajarkan bagaimana proses kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat dalam bentuk kemitraan terbagun dengan harmonis didalamnya, di mana pihak masyarakat menanam tanaman tebu sebagai dasar bahan baku gula untuk perusahaan. Akan tetapi pada, setelah dari studi banding, tidak ada kejelasan dari pemda maupun pihak perusahaan untuk menjalankan dengan baik akan hal tersebut. Justru perusahaan terus melakukan pengolahan lahan yang didalamnya terdapat berapa jenis tanaman petani seperti tanaman Plawija, Ubi jalar, dan lain-lain. Kata Dg. Torro dari luas lahan HGU yang sangat luas, masih banyak yang mereka tidak bisa olah dan tanami, anehnya mereka tetap menarget lahan yang kami tanami sedangkan masih sangat banyak lahan HGU yang masih kosong. Selain itu, masyarakat yang mempertahankan tanaman di atas lahan tersebut terus mengalami kekerasan dan intimidasi, parahnya yang melakukannya adalah dari aparat kepolisian dan ketua DPRD Kota pada saat itu, namanya H. Bonto. Haji Bontoh dengan beringas memukul salah satu warga perempuan yang bertahan di atas lahan yang di olah secara paksa. Keadaan demikian terus memanas, hingga pada tahun 2015 barulah ada sedikit gambaran akan dijalannya skema kemitraan. Drafnya telah dibuat akan tetapi beberapa isisnya memberatkan petani baik dari segi atas penguasaan atas lahan maupun objek lahan yang tidak memadai yang hanya 125 Ha untuk ratusan kepala keluarga dan lahan yang ditunjuk adalah lahan yang juga masih bermasalah yang pihak perusahaan saja

tidak berani untuk menanam tebu diatasnya. Karena situasi kehidupan ekonomi yang kembali mulai memburuk kami melakukan reklamasi lahan dan bersepakat akan menanam tebu jika ini didukung oleh pemerintah maupun dari perusahaan itu sendiri. Draf kerjasama kemitraan yang menjelaskan bahwa pihak perusahaan memfasilitasi petani dalam bentuk pelatihan teknis dari proses pengolahan sampai panen dan pemda memberikan bantuan anggaran untuk modalnya akan kami sangat terima.

Hingga pada tahun 2018 ini, Dg. Torro mengatakan, Draf yang ada tidak pernah ditandatangani dari pihak pemda maupun dari perusahaan, Padahal kami telah mengikuti segala arahan dari mereka, mulai dari tidak menanam lagi jenis tanaman lain selain tebu, memberuk koperasi, hingga kelompok tani kami lakukan. Hingga pada awal akhir tahun 2015 sebagian dari kami mencoba mengolah lahan sendiri dan mencari pinjaman sebelumnya dengan harapan selanjutnya pemerintah beserta perusahaan akan benar-benar mau bekerjasama dengan melihat kondisi kami secara benar.

C. Kondisi Kehidupan Ekonomi Petani Sebelum dan Setelah Adanya PTPN

XIV

1. Kondisi Kehidupan Ekonomi Petani Sebelum Adanya PTPN XIV

Sawah terhambar luas, kebun yang menyediakan buah-buah, dan hutan masih terdapat banyak pohon besar yang rantingnya bisa menjadi sumber pengasapan dapur yang mengepul bagian belakang rumah-rumah panggung. Kalimat yang sedikit bisa menggambarkan aktifitas masyarakat desa ko'mara kecamatan polongbengkeng utara dalam menjalani aktifitas kehidupannya dalam

memenuhi isi dapur secera sederhana dan mengantungkan hidup dengan bekerja sebagai seorangpetani, terutama dalambertani fokus pada komoditaspadi yang menjadi sumber kehidupan mereka utama/sehari-hari.Selain itu, sapi dan kerbau yang digembalakan juga ikut melengkapi dan menambah ciri khas keseharian para petani dalam menjalani segala aktifitas kesehariannya. Singkatnya, kalimat ini juga adalah bagian terkecil yang setidaknya sedikit bisa menggambarkan kehidupan ekonomi petani sebelum adanya PTPN XIV. Seperti yang akan digambarkan oleh Dg. Ngampa (87 tahun), sebagai berikut:

“Di sini dulu, sejak zaman belanda ada memanmi sawah, apalagi kebun. Kalau orang dulu, tidak tinggal seperti sekarang ini, kita tinggal dan bangun rumah dekat-dekat kebun atau pun sawah, jadi pisah-pisah. Tahun 1960 an disini ada di buka jalanan oleh pemerintah dan masyakat mulai membangun rumah mengikuti garis jalan. Tahun 1980 an sudah ramaimi rumah di sepanjang jalan. Lebih dari 4 ha lahanku yang kebanyakan adalah sawah, selain itu peliharaka juga kerbau, ada 9 ekor kerbauku. Jadi kalau untuk makan tidak susah ji orang, apalagi ditanam sendiri ji” (wawancara pada tanggal 14 April 2018)

Selain Dg. Ngampa, Kondisi kehidupan ekonomi petani juga digambarkan oleh Idris Dg. Nyaling (45 tahun), dia menceritakan bahwa:

“ Tidak ada susah dulu, kami bisa menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk menanak nasi di rumah dan untuk makan kami tinggal tanam dan ambil sendiri diatas lahan. Lahan orang tuaku 4 Ha lebih yang hambir seluruhnya di tanami padi, walau padi hanya sekali setahun akan tetapi hasilnya masih sangat bagus, belum ada penyakit tanaman padi seperti yang sekarang ini, setelah panen padi, lahan bisa ditanami lagi jagung, ubi jalar dan lain-lain. Kami juga memelihara beberapa ekor sapi. Selain itu, dari tingkat pendidikan setidaknya orang tuaku bisa menyekolahkan kami semua 7 orang bersaudara. kakak tertua di keluarga sampai Sekolah Pendidikan Guru (SPG), anak kedua tamat SMA, anak ketiga tidak tamat SMA, saya dan anak kelima tamat SMP, dan yang keenam dan ketujuh Cuma tamat SD” (wawancara pada tanggal 30 Maret 2018)

Dan kaitannya dengan masyarakat sekitar perusahaan/perkebunan dalam konsep kedaulatan pangan digambarkan oleh Jennifer del Rosario (2007:6) bahwa kebebasan dan kekuasaan rakyat serta komunitasnya untuk menuntut dan mewujudkan hak mendapatkan dan memproduksi pangan sendiri dan tindakan berlawanan terhadap kekuasaan perusahaan-perusahaan serta kekuatan lainnya yang merusak sistem produksi pangan rakyat melalui perdagangan, investasi, serta alat dan kebijakan lainnya. Juga menjadi bagian dalam tolak ukur dalam menilai kesejahteraan masyarakat agraris seperti yang ada di Indonesia, jika dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan informan di atas, maka kondisi kehidupan ekonomi petani sebelum adanya perusahaan PTPN XIV masih tergolong cukup sejahtera, di mana penggunaan lahan seproduktif mungkin dalam memproduksi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menyangkut dengan subsistensi berupa jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk makan dan bahan makanan, seperti halnya padi yang bisa diolah secara langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Pengembalaan kerbau dan sapi menjadi bagian dalam tolak ukur bahwa masyarakat pada saat sebelum masuknya perusahaan masih tergolong cukup sejahtera, dan yang tidak kalah terpenting adalah bahwa mereka memiliki kedaulatan atas akses sumber agraria, terutama tanah yang menjadi sumber kehidupan utama bagi petani. Hal ini sangat terang, bahwa apa yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi walaupun masih sangat tradisional dan sangat sederhana, seperti halnya petani peasant pada umumnya, akan tetapi petani sama sekali tidak ada masalah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena beras, dan tanaman lainnya mereka produksi sendiri

di atas tanah mereka. Seperti yang telah digambarkan informan-informan di atas, bahwa untuk makan mereka tidak kekurangan sama sekali karena mereka menanam diatas tanah mereka. Selain yang terpenting adalah, control atas tanah yang menjadi sumber penghidupan dimana mereka bekerja ada di tangan mereka sepenuhnya. Selain itu, kebanyakan dari mereka memelihara ternak yang menjadi bagian dari sarana untuk prospek jangka panjang.

2. Kondisi Kehidupan Ekonomi Petani Setelah Adanya PTPN XIV

Sebagaimana yang telah di gambarkan di bagian awal didalam idenitas informan bahwa kehidupan setelah masuknya PTPN XIV tidaklah memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini bisa dilihat dalam gambaran Indris Dg. Nyaling yang menceritakan kondisi kehidupannya setelah masuknya Perusahaan :

“Sejak perusahaan masuk ditahun 1981, bapakku bekerja sebagai buruh tani, sedangkan ibunya bekerja serabutan, sempat beberapa kali ibunya jadi buruh pengaspalan di Gowa dan Takalar, dan kadang-kadang menjadi buruh tebang di perusahaan pas musimnya, karena sama sekali tidak memiliki lahan lagi selain lahan yang di tempati rumah, untuk tamat sekolah tingkat SMP saya harus berusaha mencari biaya sendiri, tidak jarang saya pergi ke gunung ambil bambu untuk di jual, dan tidak bisa ma lagi lanjut setelah tamat SMP, adekku yang dua orang lagi hanya bisa tamat sampai SD. Setamatku SMP, beberapa kali saya menjadi buruh tebang di pabrik gula, tp Cuma 1 tahun ji, masuk tahun 1992 keluarka merantau di Mamuju dan bekerja sebagai buruh perusahaan rotan (PT. Surya), tp tidak lama ja juga kerja disitu karena resiko yang tinggi dengan upah yang rendah, dan yang tidak bisa kulupa saat saya pergi merantau di Malaysia di tahun 1993, bersama dengan empat temanku saat itu di janji akan di pekerjaan di perusahaan sawit dengan gaji yang besar, kami dikirim ke Malaysia kayak binatang, di ikat di perut kapal, dan di pekerjakan tanpa gaji disana, kami hanya kerja beberapa bulan saja dan kami melarikan diri masuk dalam hutan sampai 3 hari lamanya, itupun setelah melarikan diri karena tidak bisa tembus keluar hutan akhirnya kami memberanikan diri bekerja di perusahaan sawit dengan mandor yang berbeda, setelah sakit malaria selama satu bulan di tahun 1994 baru saya di kirim ke Indonesia. sekembalinya di makassar saya tetap menjadi buruh di PT. Barawaja (perusahaan besi) di

Makassar, namun tidak sampai satu tahun di berhenti maka karena minimnya upah yang dia terima. Menjadi tukang becak tukang becak di Makassar “

Hal serupa juga di ceritakan oleh Dg. Ngampa :

“ Dari dg. Ngampa menggambarkan kondisi kehidupannya setelah masuknya perusahaan, Dia menceritakan, kondisi pkehidupan ekonomi semakin sulit, bagaimana tidak, pekerjaan yang dijanjikan sebelum pembebasan lahan oleh perusahaan itu sama sekali tidak ada, Cuma pas di musim panen tebu saja bekerja sebagai buruh tebang dengan upah yang rendah, dan musim tebu itu hanya sekali dalam setahun, mau makan apa dari hasil kerja sebagai buruh tebang tebu yang hanya sekali dalam satu tahun itu. Akan tetapi saya lebih sedikit beruntung dibandingkan dengan tetangga-tetangga saya yang lain yang juga ikut di ambil lahannya oleh perusahaan, setidaknya saya masih memiliki 20 are lahan sawah, berbeda dengan dg. Rani yang rumahnya itu yang ada di depan (pas depan rumah dg. Ngampa), diambil lahannya sama perusahaan dan tidak ada sama sekali nasish, *lanu sannna kamase-mase tallasana, jai anak nanikatalasi, mingka akkokoji jamangna*”. (wawancara pada tanggal 14 April 2018).

Untuk menggambarkan secara komprehensif tentang penguasaan lahan petani, berikut adalah data luasan penguasaan lahan petani di desa Ko'mara yang masuk dalam skema perampasan lahan oleh perusahaan sejak tahun 1981-1982:

Tabel 4.3 Survei kepemilikan Lahan RT di desa Ko'mara yang bersengketa dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar:

Jenis Lahan	Jumlah Pemilik	Jumlah Kebun & Sawah	Luas Area (ha)
Kebun	18	20	12,1300
Sawah	42	134	76,3582
Tidak jelas	1	2	2,6000
Total	61	156	91,0882
Rata-rata Luas Lahan/Pemilik Lahan			1,4931

Sumber : Survei RT Petani Polongbangkeng Utara Oleh AGRA Sul-Sel Tahun 2013.

Dari tabel di atas terlihat dengan jelas bagaimana PTPN XIV memisahkan tanah dari petani, setidaknya rata-rata 1,4 Ha lahan masyarakat diambil alih oleh perusahaan. mereka para petani kehilangan sumber penghidupannya yang utama untuk selanjutnya bisa bekerja dengan baik untuk mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Tanah bagi petani adalah sesuatu yang sangat krusial, hal ini juga bisa dilihat dari gambaran perjalanan hidup dari Dg. Ngampa, Dg. Torro yang terdapat dalam identitas informan sebelumnya yang setelah di rampas tanahnya mereka bekerja serabutan sampai keluar merantau.

Seperti yang telah dimaksud oleh James C.Scoot (1981:124) bahwa akibat dari kehilangan tanah maka petani hanya memiliki beberapa jalan, yaitu bertahan dengan bekerja sebagai seorang penggarap lahan, menjadi buruh tani atau bermigrasi ketempat lain untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup. Hal serupa juga digambarkan oleh frida bahwa setelah masa orde baru sistem ekonomi yang tadinya adalah non kapitalis sekarang dirubah menjadi lebih kapitalis, dan pembangunan industri pertanian maupun perkebunan kerap meminggirkan petani dan tidak jarang menggunakan aparat militer diturunkan untuk mengamankan konsolidasi tanah. Seperti yang digambarkan didalam identitas dan informasi informan bahwa masuknya perusahaan juga telah melibatkan TNI dan seluruh aparat pemerintahan hingga desa untuk proses sosialisasi pembangunan pabrik gula di kecamatan polongbangkeng utara. Sehingga pada akhirnya telah menimbulkan konflik sampai dengan awal tahun 2015 silang.

Di dalam Mahzab Ekonomi Fisiokrasi, petani juga bagian dari negara yang sangat penting peranannya, terutama menyangkut ketersediaan makanan untuk

keberlangsungan hidup penduduk, dari hidup dan akhirnya mendorong adanya pertumbuhan penduduk menjadi penyebab peningkatan pendapatan suatu negara, dan tanah adalah sumber pendapatan utama untuk peningkatan suatu kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, praktek yang dijalankan oleh PTPN XIV terhadap petani, justru demikian sangat bertentangan didalamnya, PTPN XIV sebagai perkembangan dari industri perkebunan justru menjauhkan petani dari tanah yang menjadi sumber kekayaan suatu negara dengan lebih mengaju kepada ideologi kapitalis yang menjadikan petani sebagai objek dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, maka bisa dikatakan PTPN XIV menganut teori ekonomi *tetesan kewanabahan* yang terbukti tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat terutama kepada petani yang berada disekitar perusahaan. Selain dari menganut sistem kapitalis PTPN juga bertindak sebagai tuan tanah seperti ciri-ciri tuan tanah yang telah gambarkan oleh Institute For National and Democracy Studies (INDIES). Yang salah satu cirinya adalah Monopoli tanah, setidaknya PTPN XIV memonopoli tanah hingga 6,728.15 Ha yang terdiri dari HGU dan HGB.

3. Kondisi Kehidupan Ekonomi Petani Saat Ini

Perampasan tanah adalah bagian dari perjalanan petani dalam menggambarkan kondisi saat ini, akibat perampasan tanah, petani kehilangan sumber penghidupan utamanya, dan petani mau tidak mau masuk dalamenggolongan petani miskin dan bahkan hanya menjadi buruh tani. untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tidak jarang bagi mereka berutang dan menjerat mereka demi tetap bisa bertahan hidup. Utang bagi petani terhadap yang

memiliki luas lahan dan memiliki modal yang cukup besar membuat satu klasifikasi penggolongan didalam satu lingkup masyarakat itu sendiri.

Pendapat di atas selajan dengan Jemes C. Scott (1981:124) yang menggambarkan bahwa selain akan keperluan akan uang tunai untuk biaya produksi, pajak, juga kebutuhan konsumsi yang cenderung mengalami kenaikan yang mantap, menyebabkan petani banyak yang berutang. Untuk menggambarkan secara komprehensif maka akan dimunculkan beberapa petani yang mengantungkan hidupnya di atas tanah yang sempit berupa lahan sawah yang menjadi sandaran utamanya dalam menanam padi pada musim penghujan dan mengantinya menjadi tanamam jagung di waktu musim kemarau dan bekerja sebagai buruh tani demi memenuhi kebutuhan makan akan rumah tangganya di desa Ko'mara saat ini, mereka juga adalah yang terlibat dalam kerjasama dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar:

Tabel 4.4 Status Kepemilikan Lahan setelah bersengketa dengan PTPN XIV di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Tahun 2018

Status Kepemilikan Lahan	Jumlah	Luas Lahan (ha)
Pribadi	15 Orang	4,8700
<i>Akoko</i> (menggarap lahan orang lain)	2 Orang	1,1400
Tidak ada lahan	3 Orang	0
Total	20 Orang	6,0100 (6,01 ha)

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2018

Dari tabel di atas, tidak ada petani yang memiliki luasan lahan di atas 1 Ha, dan 3 di antaranya sama sekali tidak mengerjakan lahan atau memiliki lahan dan 2 diantaranya mengerjakan lahan akan tetapi bukan atas kepemilikan pribadi atau orang takalar biasa menyebutnya *Akoko* yaitu mengerjakan lahan orang lain

dengan sistem pembagian hasil tanaman yang pembagiannya disesuaikan dengan kebiasaan orang takalar yang ada sebelum-sebelumnya, pembagian ini biasanya dikenal dengan pembagian tiga, yaitu biaya produksi untuk mengelolah sampai panen terlebih dahulu di keluarkan, penggunaan seperti traktor, pupuk, racun sudah mencakup didalamnya, dan dari hasil bersihnya baru di bagi dua antara yang mengerjakan dengan pemilik tanah, ada juga dengan sistem *Akoko* dengan cara pengupahan yang ditentukan sejak dari awal, di mana mulai dari pengolahan tanah sampai panen tiba pekerja lahan hanya di upah dan biaya dan resiko gagal panen sepenuhnya di tanggung oleh pemilik lahan, tapi ini hanya berlaku untuk *koko jangke* pendek seja.

Kecilnya penguasaahaan atas tanah bahkan diantara mereka ada tidak memiliki tanah sama sekali untuk dikerjakan merupakan satu akibat dari perampasan lahan yang berkepanjangan. Dari perampasan lahan bisa dinilai secara bersama bagaimana kondisi kehidupan ekonomi mereka saat ini, jika di rata-ratakan untuk penguasahaan lahan yang hanya berkisar 30,95 are/orang maka untuk memenuhi kebutuhan untuk makan saja akan teramat sulit bagi mereka terlebih dalam menuhi kebutuhan seperti membiaya anak mereka yang menempuh pendidikan saat ini yang juga merupakan kebutuhan pokok dalam menjalani kehidupan. seperti penggambaran kondisi kehidupan ekonomi Dg.Nyaling, Dia menceritakan:

“ Pasca tahun 2015 kondisi ekonomi di keluarga sangatlah parah, tidak ada tanah yang disisahkan oleh perusahaan untuk saya kerja, akibatnya, anak pertama yang harapan terbesarnya bisa menguliahkannya sampai di perguruan tinggi harus pupus, saya mengingginkan anak pertama saya (Jafar namanya) bisa kuliah dan mengambil jurusan hukum biar nanti bisa membela orang yang selalu dibodohi hukum saat ini, tapi apa boleh

buat harapan tinggalah harapan, begitupun anak kedua saya kasian yang hanya tamat SMP dan tidak lanjut lagi ke SMA. Saat ini, saya hanya mengajarkan lahan milik orang lain berupa sawah yang luasannya hanya sekitar 25 are, banyak pekerjaan kembali saya lakukan seperti di awal-awal masuknya perusahaan. Saat ini saya kadang-kadang kerja penggemukan sapi, setidaknya-tidaknya bisa 2 ekor sapi dalam setahun saya kerjakan, syukurlah ada tambah-tambah untuk kebutuhan sehari-hari., perkerjaan yang sudah lama saya tinggalkan juga yang berjualan di pasar pa'baeng-paeng kembali saya geluti, terutama di hari-hari besar keagamaan”(wawancara pada tanggal 30 Maret 2018).

Kondisi serupa hampir menyeluruh dengan semua petani-petani yang ada di ko'mara bahkan sepolongbangkeng yang ikut dirampas lahannya oleh perusahaan telah menempatkan mereka hanya bekerja serabutan atau hanya mengerjakan sedikit tanah untuk menajalani keberlansungan kehidupan, seperti yang terjadi juga pada Dg. Nangga yang saat ini menyandarkan hidupnya hanya bekerja sebagai buruh tani, ketika ada yang memanggilnya pas musim-musim pertanian yang ada di ko'mara, seperti musim tebang tebu, menjadi buruh tebang tebu, musim panen padi dia menjadi buruh tebang padi.

Untuk menggambarkan lebih utuh mengenai pemanfaatan lahan kecil tersebut di atas, maka akan di gambarkan percampuran tabel sederhana berupa hasil produksi, biaya, dan pendapatan petani dari menanam padi di atas lahan 6.01 Ha dari 20 orang tersebut di atas, berikut adalah tabel hasil produksi, biaya dan pendapatan untu tahun 2017:

Tabel 4.5 Hasil Produksi, Biaya dan Pendapatan padi untuk tahun 2017

Hasil Panen (Ton)	42.060	
Harga Hasil Panen (Rp)		155.622.000
Biaya Pengolahan Lahan (Rp)	1.745.000	
Biaya Bibit (Rp)	-	
Biaya Pupuk (Rp)	6.830.000	
Biaya Racun (Rp)	1.780.000	
Total Biaya (Rp)		10.355.000
Hasil - Biaya (Rp)		145.267.000
Rata-rata (Rp)		7.645.632

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2018

Dari tabel di atas menggambarkan dari luas lahan 6.01 Ha dengan menanam padi setidaknya mampu memberikan 20 orang petani tersebut sebelumnya pemasukan bersih dengan rata-rata 7,6 juta sekali musim atau setidaknya lebih dari 15 juta dalam satu tahun jika dalam bentuk uang atau setidaknya bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari keterangan di atas, bertani padi yang umumnya 2 kali dalam satu tahun di desa ko'mara dengan mengikuti musim yang berlaku yaitu di musim penghujan saha dan pada saat tiba musim kemarau mereka akan mengantinya dengan tanaman seperti jagung juga akan memberikan pemasukan tambahan bagi petani dari luasan lahan yang menjadi topongan utama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ini mengartikan bahwa tanah yang luasan yang kecil tersebut masih sangat produktif bagi mereka.

D. Pola Kerjasama Kemitraan Antara Petani Dengan PTPN XIV

1. Embrio Lahirnya Kerjasama Kemitraan

a. Tekanan Ekonomi dan Lahirnya Kesadaran Atas Tanah

Perampasan tanah yang terjadi di awal tahun 1980 an yang dirasakan oleh masyarakat polongbangkeng terkhus di desa ko'mara yang menjadi perhatian

dalam penelitian ini, sesungguhnya menempatkan petani tercerabut dari alat produksinya yang vital, di atas tanah petani memperoleh sumber kehidupan dengan bercocok tanam dalam memenuhi kebutuhannya sebagai seorang manusia. Maka sudah pasti petani akan masuk dalam lembah tekanan ekonomi yang menjadikan mereka berusaha untuk tetap bertahan hidup dengan segala upaya yang dimilikinya. Tidak jarang bagi petani masuk dalam dunia hitam seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya akibat dari eksisnya perampasan tanah yang terjadi dalam kehidupannya. Hal ini tergambar jelas dalam kehidupan seorang petani yang bersengketa dengan perusahaan didalam identitas informan sebelumnya, Dg.Ngampa Misalnya dalam ceritanya:

“ pengambilalihan tanah secara sepihak betul-betul kami rasakan dampaknya, bagaimana tidak kami dengan susah payah mengupayakan lahan untuk bercocok tanam sebelum masa kemerdekaan, dengan kejamnya diambil secara paksa oleh perusahaan, hanya dari bertani lah di atas tanah saya selama ini tetap bisa bertahan hidup, janji-janji semu dan ganti rugi yang dipaksakan kami tidak bisa terima itu, tadinya saya bisa memelihara kerbau sekarang kerbau saya hampir semua raip di ambil pencuri, saya menyakini hal ini juga akibat dari banyaknya orang disini yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya karena tidak memiliki lahan lagi untuk menanam padi sehingga tidak sedikit yang menjadi pencuri”(wawancara pada tanggal 14 April 2018).

Seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa petani merupakan warisan dari nenek moyang yang mereka miliki, upaya memisahkan tanah dari mereka dengan janji pekerjaan lain diluar dari petani sama halnya mencerabut pokok pencaharian mereka, Hal demikian telah membawahkan petani masuk dalam gubakan yang menjerat dalam sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga akan menjadi dorongan tersendiri dalam peningkatan kesadaran petani untuk mengambil alih kembali tanahnya yang di rampas. Kesadaran atas tanah sejak awal sebelum masuknya perusahaan telah membudaya dalam kehidupan mereka,

ditambah lagi perampasan yang terjadi menjadikan mereka semakin menyadari bahwa tanah tidak bisa dipisahkan lagi dalam kehidupan mereka. Manisnya gula justru tidak semanis dengan kehidupan ekonomi petani, petani hanyalah menjadi objek dari massifnya eksploitasi dan ekspansi terhadap tanah-tanah masyarakat sejak masuknya perusahaan dari tahun 1980-1983. Perampasan tanah yang dilakukan oleh PTPN XIV dan tidak menyisahkan sejenkal tanah untuk bercocok tanam juga telah mendorong sebagian masyarakat menjual ternaknya dan terusir secara paksa dari kampung halamanannya, seperti yang dirasakan oleh informan Dg. Nyaling yang merelakan hidupnya tergelantung di daerah lain dengan pengalaman yang begitu pahit dan kembali ke daerah dengan tetap bekerja serabutan ; jadi buruh bangunan, tukang becak, penjual sayur keliling, hingga kembali kekampung dengan menjadi buruh tebang musiman dengan penghasilan yang untuk memenuhi kebutuhan makan terasa sulit, Dari hal tersebut sengketa lahan menjadi konflik yang eksis sejak tahun 1999.

b. Eksisnya konflik atas tanah

Akhirnya setelah menunggu selama 25 tahun lamanya, maka arena konflik terbuka antara masyarakat petani Takalar versus PTPN XIV terbuka lebar dan tidak bisa dihindari lagi. Konflik yang menjadikan warga berjuang dari individu-individu dengan cara-cara sporadis hingga berjuang bersama-sama dengan tuntutan yang sama yaitu berjuang atas tanah. Seperti yang di gambarkan oleh Dg. Torro :

“Konflik semakin nyata diawal tahun 1999 menjelang berakhirnya HGU. Akibat tekanan ekonomi dan proses penantian yang panjang hak atas tanah, menjadikan semangat yang kuat didada para petani Takalar untuk berjuang merebut kembali tanah-tanahnya menyala. Mulanya di kampung paccelakkang yang melakukan reclaiming kemudian dari

kejadian itu, beberapa warga desa ikut melakukan hal yang serupa yaitu reclaiming tanah perkebunan tebu PTPN XIV Takalar. Awalnya reclaiming yang terjadi adalah bentuk aksi individu yang tidak lagi sabar menanti habisnya HGU. Kami melakukan pembebasan lahan tebu dan menggantinya menjadi areal persawahan, palawija serta peternakan sapi. Masuk tahun 2015 reclaiming semakin membesar seperti yang dilakukan warga kampung lantang yang hampir mereclaiming lahan 100 Ha dan menanam dengan jagung hibrida, dan reclaiming pendudukan terbuka dan besar-besaran yang lebih dari ribuan massa di tahun 2007. Akan tetapi pihak perusahaan juga tidak tinggal diam dan belum terlihat ada niat untuk mengembalikan lahan masyarakat, mulai tahun 2008 tuntutan demi tuntutan terus dilakukan oleh warga melalui sederetan aksi-aksi demonstrasi di dalam perusahaan, DPRD, Pemda, hingga di provinsi. Di DPRD Kota Takalar pada aksi bulan April 2008 warga di janjikan bisa mengambil alih lahannya setelah panen tebu oleh perusahaan, akan tetapi pada perjalanannya, pada pertengahan tahun 2008 pihak perusahaan setelah panen justru tetap mendorong karyawannya untuk melakukan pemupukan tebu di beberapa blok seperti, di blok S di keluarahan parangluara, dan pengolahan tanaman warga pada malam hari sering dilakukan oleh pihak PTPN XIV. Pada kenyataannya kalau perusahaan mau melakukan pengolahan tanah di lahan-lahan kosong itu masih sangat luas, setidaknya perusahaan memiliki lebih dari 6.500 Ha HGU yang hanya dari setengahnya mereka bisa memanfaatkan dengan baik dalam menanam tebu, sehingga tahun 2008 merupakan tahun awal konflik memanas, di mana masyarakat sering berhadapan dengan karyawan yang di gerakkan perusahaan bahkan tidak luput keterlibatan Polres Takalar yang tidak netral dalam menangani konflik. Peristiwa penembakan 4 warga di Pakkawa pada tanggal 10 Oktober 2008 atau masyarakat mengengannya dengan istilah peristiwa Pakkawa di keluarahan parangluara menjadi bagian dari panasnya konflik saat itu, hingga pada tahun 2009 konflik terus memanas dan yang tidak kurang dari 20 petani di kriminalisasi dari berbagai desa yang ada di Polongbangkeng utara dan selatan. Panasnya konflik memicu beberapa resolusi yang salah satunya adalah lahirnya program tebu rakyat dari dorongan PTPN XIV bersama pemerintah untuk masyarakat” (wawancara pada tanggal 10 April 2018).

Dari keterangan di atas, bisa diidentifikasi bahwa konflik juga berasal dari tekanan ekonomi masyarakat yang memburuk akibat dari perampasan tanah yang membuat masyarakat kehilangan mata pencahariannya yang utama, dan dari itu, kedarasan atas tanah memicu beberapa warga melakukan reclaiming lahan dan diikuti ribuan warga dari berbagai desa yang ada di Polongbangkeng utara dan

selalatan hingga tahun 2008. Dari informasi Dg.Torro aset perusahaan PTPN XIV juga merupakan hasil dari peralihan aset yang terus berubah-ubah tanpa diketahui secara pasti oleh warga, sebelumnya adalah aset PTPN XXIV XXV dialihkan ke PTPNXIV pada tahun 1996. Diketahui luas lahan yang dikuasai PTPN XIV adalah seluas 6728.25 terdiri dari HGU dan HGB yang didasarkan atas kepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Takalar, berikut data HGU dan HGB PTPN XIV:

Tabel 4.6 Data HGU & HGB PTPN XIV Pabrik Gula Takalar

No	Tahun Penerbitan	Tahun Berakhir	Masa Berlaku	Lokasi	Luas (Ha)
01	09 Juli 1994	09 Juli 2024	30 Tahun	Pa’rappunganta, Moncongkomba , Ko’mara, Timbuseng, Baragaya	4562.95
02	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Barugaya	185.32
03	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Bontokandatto	370.92
04	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Bulukunyi	422.14
05	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Lassang	293.37
06	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Towata	128.15
07	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Towata	61.34
08	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Cakkura	148.48
09	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Lantang	101.32
10	23 Maret 1998	23 Maret 2023	25 Tahun	Mattompodalle	272.25
Total Luas HGU				6,546.22 Ha	
Sertifikat		Lokasi		Luas	
Sertifikat HGB No.01/1990		Mattompodalle		631,800 m2	
Sertifikat HGB No.01/1990		Pa’rappunganta		1,187,500 m2	
Total Luas HGB				1,819,300 m2 (181,93 Ha)	
Total Luas HGU & HGB				6,728.15 Ha	

Sumber : Dokumen AGRA Sul-Sel Tahun 2013

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa luas lahan HGU milik PTNP XIV begitu luas ditengah kemerosotan penghidupan ekonomi masyarakat dari perampasan lahan yang dilakukannya, dan menyisahkan masyarakat memiliki lahan sempit bahkan tidak bertanah lagi seperti pada gambaran kepemilikan lahan

di desa Ko'mara sebelumnya. Parahnya, dari operasi perusahaan sejak tahun 1980 an penerbitan alas HGU dan HGB baru terbit di tahun 1990 dan 1994. Akibatnya, telah memicu konflik yang berkepanjangan antara masyarakat dengan PTPN XIV. Konflik memuncak pada pertengahan tahun 2008 di mana pihak perusahaan terus melakukan pengolahan secara paksa tanaman-tanaman masyarakat yang sesungguhnya luasan HGU perusahaan masih yang belum di manfaatkan dengan baik atau kosong, hingga beberapa peristiwa warga berhadap-hadapan dengan perusahaan dan polisi yang terlibat didalamnya, hingga satu peristiwa besar terjadi yaitu penembakan terhadap 4 warga oleh polres takalar yang tidak netral dalam menangani kasus konflik yang ada. Berbagai upaya penyelesain konflik terus di upayakan yang salah satunya dalah program tebu rakyat, satu upaya pemerintah bersama dengan PTPN XIV untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat.

c. 2009 ; Lahirnya Program Tebu Rakyat

Memanasnya konflik antara masyarakat dengan PTPN XIV sampai dengan tahun 2009 dan upaya penyelesaiannya terus dilakukan, beberapa mediasi yang dilakukan pemerindah daerah maupun pemerintah provinsi sulawesi selatan dan aksi-aksi tuntutan yang terus dilakukan oleh masyarat di daerah maupun di tingakatan provinsi telah melahirkan salah satu resolusi pengembalian tanah seluas 10 % dari luas kebun yang ada di desa masing-masing. Pengembalian lahan tebu tersebut dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dengan PTPN. Kebun tebu yang dikembalikan tersebut kemudian disepakati untuk dikerjakan oleh masyakarot dengan sistem tebu rakyat (TR). Tiap hektar kebun tebu rakyat di berikan suntikan dana sebesar 9 juta dalam bentuk pinjaman. Dana itu diperuntukkan untuk membeli bibit, pestisida, pupuk dan biaya pengolahan

tebu. Akan tetapi Program Tebu Rakyat (TR) juga tidak menyentuh sama sekali tuntutan dari warga. Dalam penggambaran Dg. Nyaling ;

“ Tebu Rakyat (TR) sama sekali tidak memperhatikan seluruh kepentingan masyarakat yang bersengketa dengan PTPN XIV, akan tetapi hanya menyentuh sebagian dari kelompok saja, sehingga kebanyakan dari kami tidak menerimanya, terbukti setelah adanya program ini, perjuangan sejati menuntut pengambian hak atas tanah terpecah-pecah, hanya sebagian orang saja yang menerimanya atas hasil dari keputusan mereka sendiri-sendiri bukan atas kesepakatan bersama. Pengambilan tanah yang hanya 10 % saja dalam bentuk tebu rakyat hanya akan di nikmati oleh sebagian orang saja, bahkan cenderung mengikat. Selain itu Jika dihitung-hitung pemberian dana pinjaman 9 juta/ha tidaklah mencukupi untuk melakukan perkebunan tebu hingga saat panen nantinya. Sebab dana tersebut tidak mencukupi untuk membeli pupuk, pestisida serta biaya kerja pengolahan tebu mulai dari pembibitan hingga panen, hingga akhirnya mereka yang menerima program Tebu Rakyat (TR) berhenti berjuang dan kami tetap pada perjuangan kami, hingga konflik terus terjadi sampai tuntutan-tuntutan kami terpenuhi. Walaupun program tebu rakyat (TR) telah memecah sebagian dari kami, tapi perjuangan terus kami lakukan hingga pada tahun 2009 juga merupakan pembentukan organisasi STP-Takalar yang orang-orang didalamnya hanya berasal berasal dari petani miskin yang hanya sedikit memiliki lahan dan mereka yang sama sekali tidak memiliki lahan akibat di rampas oleh perusahaan, hingga pada tahun 2009 sampai dengan 2012 reclaiming terus kami lakukan untuk tetap bisa menanam yang menjadi toponim utama untuk bisa makan dan bertahan hidup” (wawancara pada tanggal 30 Maret 2018).

Dalam penggambaran Frida (1997:32) bahwa, program pengembangan tebu rakyat pernah lahir di tahun 1950-1957. Akan tetapi, program ini ditinggalkan karena pada prakteknya petani tebu yang sebelumnya menguasai tanah hanya ditempatkan sebagai penyewa tanah oleh pabrik gula. Dari keterangan di atas juga bisa disimpulkan bahkan program tebu rakyat (TR) merupakan program yang di dorong oleh pemerintah bersama PTPN XIV yang sejak dari awal kemunculannya juga pernah ditolak oleh masyarakat di masa orde lama, khususnya petani yang ikut terlibat didalamnya. Hal ini serupa yang dilakukan oleh masyarakat

Polongbangkeng yang juga menolak akan kehadiran program tersebut. Masyarakat menilai bahwa program tebu rakyat tidak sesuai dengan kepentingan atas perjuangan pengambilan tanah, Program tebu rakyat (TR) hanya kepentingan sebagian individu didalamnya, dilihat dari pengembalian tanah hanya 10% dengan bantuan berupa pinjaman sebanyak 9 juta/ha yang tidak cukup untuk biaya dari pengolahan lahan sampai dengan panen, selain itu program tebu rakyat sifatnya mengikat dan di yakini merupakan program yang memecah belah pada perjuangan atas pengembalian tanah yang seutuhnya.

d. 2012-2014 ; Reclaiming Untuk Perbaikan Taraf Hidup Petani

Dalam situasi kebutuhan akan sehari-hari seperti kebutuhan akan makanan terus mendesak, menjadikan petani belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa penting bagi pembentukan organisasi yang mampu memfilter kepentingan-kepentingan pribadi yang berasal dari sebagian orang dalam perjuangan yang ada. Pengalaman reclaiming dari 1999 yang akhirnya di manfaatkan pada penerimaan program tebu rakyat (TR) di tahun 2009 oleh petani-petani yang berasal dari golongan petani lahan yang luas telah mendorong kesadaran pembentukan organisasi lebih maju yang didalamnya hanya menghimpun betul-betul petani yang berasal dari petani lahan sempit dan petani yang tidak bertanah sama sekali dan mau berjuang atas pengembalian hak atas tanah. Pembentukan organisasi STP-Takalar juga menjadikan perjuangan lebih terorganisir yang dipimpin atas program perjuangan dari kepemimpinan pekerja harian pimpinan-pimpinan yang dipilih dalam agenda musyawarah secara demokratis, hingga pada prosesnya ribuan petani terus melancarkan perjuangannya hingga tahun 2012-2014 proses reclaiming telah membawa petani

pada masa jayanya dalam kemampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasarnya, seperti yang di gambarkan oleh Dg.nyaling :

“ Dari peristiwa tahun 2009 terus mendorong semangat dari kami untuk benar-benar memperbaiki perjuangan, mulai tahun-tahun selanjutnya proses reclaiming terus kami jalankan sebagai program bersama, hingga pada tahun 2012, ratusan anggota organisasi STP-takalar yang ada di desa ko'mara hampir-hampir mampu melakukan reklamasi dan menanam diatas tanah-tanah yang telah dirampas oleh perusahaan, seperti saya misalnya, lahan yang bisa saya tanami padi, jagung dan tanaman-tanaman lainnya hampir-hampir 2 Ha luasnya diakhir tahun 2012, tentu ini membahagiakan karena perubahan terlihat begitu baik, begitupun dengan anggota-anggota yang lainnya. Perubahan lainnya dapat dilihat yang dilakukan oleh ribuan warga polongbangkeng yang terhimpung dalam STP-Takalar pada saat melakukan kegiatan panen raya di tahun 2014, sebuah kebudayaan yang sudah lama hilang kembali dilakukan oleh organisasi yang disentralkan pada saat itu di desa Barugaya. Setidaknya untuk makan tidak susah mi orang, dan saya bisa membeli satu kendaraan motor dari hasil pemanfaatan lahan dengan menanam padi dan jenis tanaman lainnya, akan tetapi mulai tahun 2014 juga proses pengolahan paksa oleh perusahaan kembali dilakukan di beberapa tempat yang membuat situasi kembali memanas, parahnya proses pengolahan dilakukan perusahaan di atas tanaman-tanaman kami yang sesungguhnya kalau perusahaan mau menanam tebu masih sangat luas lahan yang tetap bisa ditanami tebu oleh mereka. Sejak masuk tahun 2014 merupakan puncak kembali memanasnya konflik dimulai, Hingga beberapa peristiwa terjadi seperti pengolahan paksa yang melibatkan aparat kepolisian yang mengendalikan mobil pengolahan dan merusak tanaman warga, peristiwa keterlibatan ketua DPRD Takalar dalam proses pengolahan paksa tanaman warga dan memukul salah satu warga perempuan dari desa ko'mara yang mencoba mempertahankan tanaman dengan menghalang mobil pengolahan”(wawancara pada tanggal 30 Maret 2018).

Dari keterangan di atas, beberapa hal juga di sampaikan Dg. Torro tentang situasi perjuangan setelah reclaiming dan proses menanam beberapa jenis tanaman terutama padi hingga kembalinya pihak perusahaan mengolah secara paksa tanaman-tanaman masyarakat yang melibatkan aparat kepolisian hingga TNI dan pihak DPRD kota, Dg. Torro menggambarkan:

“Tahun 2013 merupakan masa jaya petani, tahun 2013 bisa maki menanam padi dari proses reklamasi yang dilakukan, banyak mi anggota

organisasi yang menanam dan banyak yang membeli motor, selain itu, kita juga bisa melakukan pesta panen di tahun 2014 disini, itu sangat membahagiakan, akan tetapi tahun 2014 kembali ki mengolah PTPN di lahan yang sudah kami tanamai tanaman yang pada saat itu kebanyakan Plawija karna musim kemarau, dari situmi kembali memanans karena perusahaan tidak sedikit menyewa orang yang tidak kami kenal, dan brimob juga mendukung PTPN, masa brimob yang yang terlibat dalam mengoperasikan mobil pengolahannya PTPN. H. Bonto juga yang ketua DPRD kota takalar yang selama ini juga menerima Program tebu Rakyat (TR) di tahun 2009 itu, memukul anggota kami di lokasi pengolahan paksa, padahal kami hanya mencoba mempertahankan tanaman kami, selain itu yang membuat kami marah sekali karena masih sangat luas sekali ji lahannya PTPN yang masih kosong kalau mau ji menanam tebu. Padahal dengan menanam padi kondisi perekonomian kami sedikit-sedikit mulai membaik, mau memang tonji perusahaan nalihat ki sensara. Selain itu, beberapa kali juga saya di panggil dan didatangi rumahku polisi dan pihak PTPN, natawari ka tanah dan nasurah berhenti berjuang. Di tahun 2014 juga beberapa dari kami termasuk saya, H.Ila, Dg.Nyaling pernah di ajak studi banding ke Tulung Agung, disana juga ada pabrik gula , tapi disana tergolonn cangkik ki di pabrik gula, semua sudah memakai sistem komputerasasi dan prakteknya mamu mengakodasi kepentingan masyarakat sekitarnya, lahannya juga sedikit ji, tapi banyak masyarakat yang menanam tebu sebagai bahan baku gula. Kalau begitu sistemnya bagus ji saya lihat, dari hasil studi banding itulah yang kemudian dibawah dan di rencanakan akan di terapkan di takalar dalam menyelesaikan konflik yang ada” (wawancara pada tanggal 10 April 2018).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, proses proses penyelesainkonflik lewat program tebu rakyat (TR) di tahun 2009 bukanlah merupakan hasil dari aspirasi dari masyarakat yang bersengketa dengan PTPN XIV akan tetapi hanyalah kepentingan dari sebagian individu yang memanfaatkan situasi yang termasuk didalamnya adalah H.Bonto ketua DPRD takalar saat itu, Program tebu rakyat juga beriringan dengan pembentukan organisasi STP-Takalar yang sudah mulai melaukkan verifikasi penggolongan anggota yang bisa terbagun di dalamnya, sehingga hanya golongan petani yang memiliki lahan sedikit dan tak bertanahlah yang bergabung didalamnya. dari organisasi itu program demi

program disusun dan di perjuangan secara bersama, terakhir adanya reclaming besar-besaran yang terjadi setelah memasuki tahun 2012 yang menjadikan masyarakat polongbangkeng yang didalamnya juga termasuk desa ko'mara yang hampir mampu mereclaiming lahan dan menanam tanaman diatasnya seperti padi, jagung dan tanaman plawawija yang paling terakhir yang mendorong perekonomian warga semakin membaik, terbukti dari pengakuan salah satu informan dg. Nyaling yang setelah mampu menguasai lahan telah merubah sedikit kehidupannya dengan bisa membeli kendaraan berupa motor di tahun 2013, selain itu kebudayaan masyarakat seperti melakukan panen raya bersama atau pesta panen padi juga mulai terlihat, hal ini membuktikan bahwa pada tahun itu kondisi kehidupan ekonomi mereka mulai membaik, akan tetapi kondisi tersebut tidak begitu panjang, pengolaan tanaman masyarakat di atas lahan secara paksa yang dilakukan oleh pihak perusahaan menjadikan konflik kembali memanas, parahnya penrusakan tanaman masyarakat di atas lahan yang bersengketa di lakukan di saat masih luasnya lahan kosong yang bisa di oleh oleh perusahaan untuk menanam tebu, ditambah keterlibatan aparat kepolisian dalam mengemudikan mobil pengolahan telah membuktikan bahwa kepolisian dalam menangani konflik di lapangan tidaklah netral. Sehingga dari beberapa konflik yang memanas lahir kerjasama kemitraan yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan masyarakat saat itu, Seperti halnya praktek yang dilakukan di Tulung Agung yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan perusahaan.

2. Pembahasan; Lahirnya Kerjasama Kemitraan; Suatu Resolusi Atas Konflik

Diawali dari tawaran dari perusahaan untuk menjalin kerjasama dan hasil study banding petani di Tulungagung, yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten Takalar, petani melihat bagaimana praktek yang dilakukan perusahaan Tulungagung yang bisa bersinergi dengan petani yang berada di sekitar perkebunan, hal ini disebabkan karena HGU yang dimiliki oleh perusahaan tidak terlalu besar, akan tetapi bahan bakunya berupa tebu ditanam oleh masyarakat secara mandiri, perusahaan memberikan ruang kehidupan dan kontrol produksi bagi masyarakat, juga masyarakat bisa terlibat aktif sebagai pemasok bahan baku tebu bagi pabrik gula.

Beberapa prosedurpun dilakukan oleh petani seperti mendirikan koperasi sebagai syarat menjalin kerjasama kemitraan, sehingga koperasi “CINTA DAMAI SEJAHTERA” pada bulan Maret 2015 telah berhasil mereka dirikan, dan diikuti beberapa nama kelompok tani juga ikut dibentuk. Akan tetapi dalam proses pengurusan persyaratan kerjasama yang dilakukan oleh petani, beberapa pengolahan tanaman milik warga juga terus dilakukan oleh pihak PTPN yang terkesan bahwa penyelesaian konflik lewat kerjasama kemitraan tidak akan dijalankan oleh PTPN. Terbukti dengan belakang hadir draf perjanjian yang dibuat oleh PTPN pada dasarnya, luas area yang ingin dikerjasamakan hanya seluas 125 Ha itupun dengan status tanah tetap menjadi kepemilikan PTPN. Sehingga akhirnya, Permintaan warga untuk melepas lahan yang telah ditanami beberapa komoditas tanaman untuk kelangsungan hidup warga yang masuk dalam areal HGU perusahaan, justru terus dimassifkan praktek

pengolahan. akibatnya konflik terus terjadi, serupa dengan awal pembangunan pola kerjasama PIR yang gambarkan oleh Gunawan bahwa pada awal pembukaan pronyek PIR, ada beberapa kejadian yang mengakibatkan kontak fisik antara petugas dengan masyarakat. Hal ini juga terjadi di polongbangkeng utara yang di gambarkan oleh H.Ila sebagai berikut:

“ Proses kerjasama kemitraan yang ingin di dorong dalam menyelesaikan konflik terlihat tidak menjadi perhatian dari pihak PTPN, kami meminta pengembalian lahan seluas 1.000 Ha untuk dimitrakan dengan menanam bahan baku gula berupa tebu, akan tetapi mereka membuat drafnya sendiri yang isinya sangat tidak sejalan dengan tuntutan kami, selain itu isi draf sesungguhnya akan mengigat warga dalam bentuk pembagian hasil yang menurut kami itu sangatlah tidaklah adil, selain itu luas lahannya hanya 125 Ha yang ditawarkan dan satu titik di lahan yang bermasalah yaitu lahan BB4O yang klaim atas lahan itu juga masih belum selesai dan selama ini perusahaan tidak berani mengolahnya. Hal tersebut tidak akan mampu mengakomodasi keseluruhan dari kami untuk bisa memperoleh lahan untuk menanam tebu, melihat sempitnya lahan yang di tawarkan sedangkan kami ratusan kepala keluarga yang berisi tidak kurang dari seribu anggota yang harus dihidupi, tentu ini sangat berbeda dengan kemitraan yang terbangun di tulung agung, justru ini tidak jauh berbeda dengan program tebu rakyat (TR) di tahun 2009 silam yang juga kami tolak karena tidak memperhatikan seluruh kepentingan warga dan menjadi pemicu konflik horisontal di antara warga yang berjuang selama ini. Sehingga pada perjalanan draf demi draf terus diperbaiki, dan kami meminta untuk tidak di sentralkan di lahan yang bermasalah itu. Parahnya ditengah penyelesain sengketa, pihak perusahaan terus memaksakan pengolahan tanaman-tanaman milik warga dari hasil reclaiming lahan yang selama ini telah mampu sedikit demi sedikit merubah kondisi ekonomi kami, sehingga konflik terus memanass” (wawancara pada tanggal 12 April 2018).

Dari keterangan di atas bisa di simpulkan bahwa lahirnya program kotrak kerjasama kemitraan adalah bagian dari resolusi konflik yang berkepanjangan selama ini, akan tetapi pada perjalannya, kotrak kerjasama kemitraan hanya menjadi wacana, di lain sisi, draf yang dibuat oleh pihak PTPN XIV sama sekali tidak memperhatikan tuntutan-tuntutan masyarakat selama ini, pihak PTPN terus

memaksakan pengolahan lahan yang di atasnya terdapat tanaman milik warga atas hasil reclamation yang dilakukan selama ini oleh warga yang di polongbangkeng utara.

Keterangan di atas juga ditambahkan oleh dg. Torro. Dia menggambarkan proses kerjasama kemitraan yang coba dibangun untuk dapat menyelesaikan konflik yang berkepanjangan :

“Proses penyelesaian sengketa lahan lewat kerjasama kemitraan pada perjalannya tdk berjalan dengan baik, kami meminta 1.000 Ha untuk dikeluarkan dari HGU tapi PTPN XIV hanya mau mengeluarkan 125 Ha di lahan yang bermasalah lagi yang dituntut, selain dari hanya 125 Ha itu, kerjasama kemitraannya sangat jauh dari memberikan sepenuhnya lahan kepada kami, drafnya mengikat pebagian yang sangat besar dari PTPN. Di drafnya sendiri PTPN XIV hanya menjadi sebagai pemilik Aset berupa lahan dan selebihnya masuk dalam PTPN X. Yang punya Pabrik di perusahaan itu bukan mi lagi PTPN XIV sejak masuk tahun 2010, punyanyami PTPN X, itu jelas terlihat dari segala pengoperasian dan administrasi ditangani semua PTPN X. Jadi bukan cuma PTPN XIV yang sebagai dalam Program Kerjasama kemitraan yang masuk didalamnya tapi PTPN X juga. Beberapa kali kami menuntut bahwa lahan 125 Ha itu tidak cukup untuk seluruh anggota dan kami meminta untuk tidak di tempatkan di lahan satu sentral di BB 40 itu karena bermasalah, beberapa kali drafnya di rubah-rubah. Kami terus pengupayakan kerjasama kemitraan itu tetap berjalan dengan harapan bisa seperti yang ada di tulong agung, kami mengikuti terus syaratnya yang diberikan PTPN maupun Pemda Kota takalar, tapi di tengah penyelesain sengketa lahan, PTPN terus tidak melakukan pengolahan lahan yang sudah kami tanami beberapa jenis tanaman, PTPN kelihatannya tidak bersungguh-sungguh mau menyelesaikan sengketa yang ada, dan tetap mempertahankan lahan HGU” (wawancara pada tanggal 10 April 2018).

Proses penyelesain konflik lewat program kotrak kemitraan juga merupakan hal sebenarnya sudah lama terjadi, seperti yang dalam Frida (1997:52) bahwa, proses kerjasama produksi, tampak potensial menempatkan petani yang sebelumnya menguasai atau memiliki tanah menjadi semata-mata hanya sebagai pekerja di atas tanah sendiri. dalam kesepakatan yang berbentuk kontrak produksi,

(hampir) semua keputusan berkaitan dengan produksi, pemasaran, dan pengalokasian sumber daya berada pada pihak inti; sementara dalam integrasi vertikal posisi petani tidak lebih seperti manajer atau buruh upahan yang dipekerjakana pihak inti. Seperti hal dalam keterangan informan di atas, bisa di simpulkan bahwa resolusi penyelesain konflik lewat kerjasama kemitraan pada mulanya bagaimana masyarakat atau petani yang berada di sekitar perkebunan dapat bersinerji dengan perusahaan. Akan tetapi, pada prakteknya, kemitraan memberatkan warga karena posisi yang tidak berimbang. permintaan warga untuk menyerahkan tanah dan menjamin untuk segala biaya pengolahan tanah sampai penen untuk mendukung pasokan tebu perusahaan tidak di penuhi oleh PTPN XIV akibatnya, konflik terus memanas hingga pertengan tahun 2015. Warga melakukan reklamaing lahan sendiri dan tetap menanam beberapa jenis komoditi seperti jagung, warga juga mengusahakan biaya pengolahan lahan dan bibit tebu yang akan menjadi pasokan tebu sembari tetap mendorong draf kerjasama kemitraan untuk penyelesain konflik. Beberapa persyaratan seperti pembentukan koperasi terus di upayakan oleh warga yang tergabung dalam serikat tani polongbangkeng atau biasa disingkat STP-Takalar. Dari upaya-upaya warga dalam penyelesaian konflik hingga terbentuk koperasi “cinta damai sejahtera” yang diharapkan akan menjadi saranan anggaran untuk seluruh biaya dalam membudiyakan bahan baku gula berupa tebu dari pemerintah daerah sesuai dengan isi draf yang belum di tandangani oleh pihak-pihak yang terkait.

3. Pola Kemitraan yang Terbangun Antara Petani Dengan PTPN XIV

Pemahaman warga yang bersengketa dengan PTPN XIV bahwa syarat yang harus terpenuhi dalam mendorong kontrak kerjasama kemitraan haruslah

membentuk satu unit Koperasi, dan mendata seluruh anggota yang akan masuk dalam skema kerjasama. Hal ini tentu adalah sesuatu yang baru yang akan dijalani oleh masyarakat, baik secara komoditi pertanian yang akan ditanam yaitu tebu itu sendiri sebagai komoditas bahan baku gula yang akan di kerjasamakan, maupun pola kerjasama yang akan coba dibangun. Maka pada tahun 2015, terbentuklah satu unit koperasi yang masyarakat menamainya dengan nama koperasi Cinta Damai Sejahtera yang masyarakat menganggapnya sebagai naungan dari beberapa kelompok tani yang termasuk 2 kelompok tani yang ada di desa Ko'mara, sesuai dengan Surat Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi "CINTA DAMAI SEJAHTERA" Nomor : 03/KCDS/DST-TKL/IV/2015. Tanggal 25 Maret 2015 dan SK Pengesahan Akta Pendirian Koperasi NO. 36 TGL. 24 APRIL 2015. Untuk menjelaskan mengenai pendirian koperasi ini sebagai bentuk dari prosedural untuk menjalankan kerjasama kemitraan maka hal ini akan di gambarkan oleh H. Ila yang juga sebagai Bendahara Koperasi :

"Koperasi ini untuk penyaluran anggaran, kami tidak ada pengalaman dalam mengoperasikan koperasi, jadi koperasi ini adalah dorongan dari pemerintah daerah sebagai penyalur anggaran nantinya untuk seluruh biaya yang dibutuhkan petani yang akan menjalin kerjasama dengan PTPN XIV, kami di janjikan akan mendapat anggaran 3 Milyar dari PEMKAB. Untuk Kerjasama kemitraannya, Draf yang dibuat oleh PTPN sendiri dan kami terus memintah perubahannya, sehingga beberapa kali juga telah dirubah akan tetapi hanya soal titik lahan saja yang mereka mau rubah sedangkan luasannya tetap 125 Ha, dari 125 Ha tentu akan masih banyak anggota yang belum kebagian lahan, kami mencatat setidaknya 289 KK yang harus menerima lahan, dalam Draf juga ada sistem pembagian, 45% ke PTPN dan 55 % ke PEMKAB, pembagiannya ke PEMKAB karena PEMKAB yang mewakili petani sebagai yang bekerjasama. tapi ada juga draf yang berisi 55 % ke PEMKAB sebagai perwakilan petani, 10 % untuk pihak pertama yaitu PTPN XIV, dan 35% untuk Pihak Kedua yaitu PTPN X. Pada intinya ada pembagian hasil yang akan bermitra dengan PTPN, selain itu, kalau melihat draf yang dibuat, menurut kami itu bukan draf kerjasama kemitraan karena banyak

isinya yang memojokkan petani.” (wawancara pada tanggal 12 April 2018)

Dari keterangan di atas, pembentukan koperasi adalah bagian dari dorongan pemerintah kabupaten takalar sebagai kewajiban didalam memunuhi tugasnya sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh PTPN, bahwa Pemkab-Takalar bekewajiban dalam urusan pembiayaan budidaya tebu yang akan dilakukan oleh petani, selain itu, yang paling terpenting adalah adanya pembentukan kelompok tani yang akan menerima lahan, karena pada faktanya dalam draf kerjasama yang ada, menempkan PTPN adalah sebagai pemilik lahan yang ter HGU kan dan berkewajiban menyediakan lahan seluas 125 Ha tersebut untuk calon penerima lahan yang sudah di bentuk didalam satu kelompok tani. Jika kembali dilihat dari beberapa isian draf, termasuk didalam Kop. Surat Perjanjian Kerjasama yang tertulis adalah *Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan Dan Penanaman Tebu Pada Lahan HGU Pabrik Gula Takalar*, dapat dinilai bahwa perjanjian ini lebih tepat dinamakan perjanjian untuk tidak mengganggu lahan HGU lagi oleh masyarakat yang menuntut pengembalian lahan, ketimbang Kerjasama Kemitraan yang di kenal oleh masyarakat selama ini. Selain itu, draf ini baru dibuat di tahun 2016 dan di perbaiki kembali dengan isian tetap sama di tahun 2017 ketika masyarakat sudah lama membentuk satu unit koperasi dan kelompok tani dan sebagian masyarakat telah mengusahkan lahan dan biayanya sendiri dalam proses menjalankan kerjasama tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh Idris Dg. Nyaling sebagai berikut :

“ wacana kemitraan sudah ada sejak tahun 2013 untuk menyelesaikan konflik yang ada, tapi praktek yang terus dilakukan PTPN tidak terlihat saya sama sekali untuk menyelesaikan konflik yang ada, ini bisa dibuktikan

dengan tidak membiarkan kami memanfaatkan lahan yang mereka juga tidak bisa olah semua selama ini, mereka terus melakukan penrusakan tanaman milik kami hingga tahun 2015. kami betul-betul mengupayakan agar kerjasama kemitraanya bisa berjalan dengan baik hingga pendirian Koperasi cinta Damai sejahtera dan kelompok tani kami semua bentuk, mereka terus mengajukan draf kepada kami yang isinya sangat memojokkan kami, lahan yang ditunjuk pun adalah lahan bermasalah dengan luasan yang begitu kecil, terakhir saya baca lahannya di tambah titiknya yang tadinya hanya di BB40, sekarang sudah ada dua titik lagi yaitu NM dan AA10 dengan luasan yang tetap sama. Penambahan titik lahan itupun karena kami melakukan reklaiming lahan sendiri, di Ko'mara, kami reklaiming Blok N. Setelah menunggu-nunggu janji pemerintah mau kasih bantuan dana yang 3 M itu karena adami Koperasi, na biar 1 rupiah tidak ada, terkahir najanji ki lagi 500 juta, yang ada itu cuma janji ji. Parahnya kami mi juga yang harus sediakan seluruh biaya mulai dari pengolahan sampai dengan panen. Sebelum kelompok kami menanam tebu, kami menanam jagung dulu di lahan reklaiming yang sudah dilakukang pengolahan, kami mengolah sekitar 25 Ha dari hasil pinjaman, tapi kami tanami jagung dulu sebagian dengan harapan setelah penen itu bisa di peke beli bibitnya, tapi baru berusia 2 bulan kasiang narusak mi lagi PTPN dan lahannya langsung di tanami tebu, padahal kami sudah berutang untuk biaya pengolahannya ” (wawancara pada tanggal 30 Maret 2018).

Seperti dalam penggambaran frida sebelumnya bahwa, hubungan vertikal dalam menjaling kotrak kerjasama cendrung menempatkan petani hanya sebagai pekerja di atasnya, sehingga kotrak formil tidak menjadi utama didalamnya, sehingga dari keterangan di atas juga bisa disimpulkan, bahwa pola kerjasama yang ingin dibangun dalam menyelesaikan sengketa lahan yang ada merupakan sistem yang tidak memiliki dasar yang formil, hal ini bisa dilihat dari draf kerjasama yang belum di sahkan, selain itu, draf itu juga tidak menunjukkan bahwa kerjasama yang di bangun adalah kerjasama kemitraan, akan tetapi, melainkan perjanjian sepihak yang di buat oleh pihak PTNP dalam mejaga HGU tetap aman. selain itu, posisi masyarakat hanya ditempatkan sebagai pekerja lahan HGU milik PTPN untuk menanam bahan baku gula berupa tebu, pembuatan

koperasi hanya formalitas belaka begitupun dengan pembentukan 14 kelompok tani di 8 desa yang termasuk didalamnya 2 kelompok tani yang berasal dari desa Ko'mara. Untuk menunjukkan secara jelas, berikut adalah nama-nama kelompok tani dari berbagai desa di bawah naungan Koperasi CINTA DAMAI SEJAHTERA yang didalamnya memuat Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) beserta realisasi atas distribusi lahan khusus di desa Ko'mara :

Tabel 4.7 Daftar Nama Kelompok Tani dan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL)

No	Desa/Kelurahan	Nama Kelompok Tani	CP	CL (Ha)
1.	Ko'mara	Julu Te'ne	23	12
		Julu Kana	22	12
2.	Kampung Beru	Te'ne Pa'mai	24	14,70
		Baji Pa'mai	20	10,75
3.	Towata	Je'ne Limbua'	19	6
4	Parangluara	Sipakainga	16	6
5	Timbuseng	Taipa Sipokoka	20	8,5
		Je'ne Mattallasa	18	8
		Mangngai Te'ne	20	7,5
6	Barugaya	Bungung Cendana	20	8
		Bungung Tallua	21	8
		Bungung Bangkala	25	8
7	Massamaturu	Je'ne Dinging	19	8
8	Ballangtanaya	Minasa Subur	22	8
Jumlah			289 Orang	125 (Ha)

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2018

Dari tabel di atas, menggambarkan perencanaan yang di susun oleh petani setelah membentuk koperasi dan kelompok tani sejak tahun 2015. Di dalamnya menyusun 14 kelompok tani dari 8 desa dengan total anggota keseluruhan sebanyak 289 orang yang akan mendapat lahan. Jika dari 289 orang tersebut di bagikan dengan luas lahan yang di tawarkan oleh PTPN seluas 125 Ha tersebut,

Maka terlihat petani hanya akan mendapat luasan lahan akan di kerjasamakan yang sangat sempit, petani hanya akan mendapat rata-rata 0,43 Ha/Calon Penerima Lahan.

Tabel 4.8 Realisasi luas lahan dari 2 kelompok tani di desa ko'mara yang menjalin kerjasama dengan PTPN XI Pabrik Gula Takalar tahun 2016

Nama kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas Perencanaan Lahan (ha)	Jumlah Yang Dapat Lahan	Luas Realisasi Lahan Yang di Kerjakan (ha)
Julu Te'ne	23 Orang	12 ha	10 orang	6,08 ha
Julu Kana	22 orang	12 ha	9 orang	6,01 ha
Total	45 orang	24 ha	19 orang	12,09 ha

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2018

Dari tabel di atas, tabel yang menunjukkan 2 kelompok tani yang ada di desa Ko'mara yang masing-masing adalah kelompok tani Julu Te'ne yang beranggotakan 23 orang calon penerima lahan yang disusun sesuai dengan keputusan bersama dengan total kebutuhan lahan seluas 12 Ha dan kelompok tani Julu Kana yang beranggotakan 22 orang calon penerima lahan dengan kebutuhan lahan seluas 12 Ha. Dari 2 kelompok tani yang ada di ko'mara semua di sesuaikan dengan total keseluruhan kelompok tani dari 8 desa/kelurahan yang menerima lahan seluas 125 Ha tersebut. Pada realisasinya hanya 19 orang saja dari 45 orang dengan total lahan 12,09 Ha yang bisa melakukan kerjasama dengan PTPN. Hal ini di sebabkan karena besar biaya dalam budidaya tebu tidaklah murah. Padahal pada keseluruhan dari 45 anggota kelompok tani tersebut telah melakukan pengolahan dengan total keseluruhan 25 Ha dengan penuh resiko berutang. Mereka telah melakukan pengolahan sebelumnya dan menanam jagung sebagai modal untuk pembelian bibit selanjutnya setelah penen, akan tetapi, harapan

mendapat modal dari hasil penen jagung kandas akibat jangun yang baru berusia 2 bulan telah di olah kembali PTPN dan mengambil alih kembali lahan karena di anggap telah melanggar perjanjian kerjasama.

Hak PTPN di dalam draf yang belum di sahkan tetap di jadikan patokan untuk mengamankan aset berupa tanah, sedang kewajiban tidak di jalankan, salah satu kewajiban PTPN adalah memberikan bantuan teknis dan manajemen dalam penenanam, pemeliharaan, dan penebangan tebu kepada kelompok tani. Selain itu penarikan bagi hasil dari hasil penen tebu petani tetap berlaku. Seperti yang akan di gambarkan oleh dg.nyaling sebagai berikut:

“ setelah mereklaiming lahan sendiri, mengupayakan biaya pengolahan lahan dan pembelian bibit yang tidak murah, beserta pemeliharaan sampai menebang, mencari mobil angkut hasil penen untuk disalurkan ke pabrik, tiba di pabrik kami harus rela antri yang bisa sampai 3 hari lamanya baru hasil penen di timbang dan menunggu lagi kapan akan di giling dengan alasan pabrik sudah tua, jika belum dapat di giling maka akan tinggal di gudang dengan di kenakan sewa, dan dari hasil pengilangan tebu yang berat 1 ton hanya menjadi 1 zak gula yang timbangan 50 Kg dan di hargai 450-500 ribu/50 kg. Jadi yang kami tahu dalam 1 ton tebu hanya menghasilkan 50 kg gula dan di hargai 450-500 ribu saja, kami menduga bahwa terjadi pemotongan hasil tebu didalamnya karena rendemen tebu juga kami tidak pernah tau pasti, tidak masuk akal 1 ton tebu hasilnya hanya 50 kg gula, kami belajar dari tulung agung kalau 1 ton gula paling sedikit hasilnya itu 70 kg gula, itu yang paling sedikit” (wawancara pada tanggal 30 Maret 2018).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama tetap berjalan, petani yang di reklaiming lahan dan mengusahakan segala pembiayaannya tetap di masukkan dalam perjanjian kerjasama oleh pihak perusahaan, kedudukan PEMKAB disini tidak terlihat sama sekali sebagai penyedia biaya budiya tebu. selain dari perjanjian kerjasama tetap di jalankan proses setelah panen tebu juga menemui beberapa masalah yang dirasakan oleh kelompok tani yang salah

satunya mereka tidak mengetahui berapa hasil sesungguhnya dari 1 ton tebu dan memiliki rendemen berapa, mereka hanya menerima hasil bersih 50 kg/ton hasil tebu dan di hargai dengan 450-500/50 kg dari hasil gula tersebut.

Untuk memahami lebih jelas tentang besar rendemen tebu dan kisaran gula dalam satu ton tebu milik PTPN, beberapa pemberitaan media online yang telah di kumpulkan sebagai data pendukung, maka akan dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9 Berita-berita media mengenai rendemen tebu Pabrik Gula Takalar dari tahun 2015-2017

Sumber Data	Deskripsi
Makassar, Bkm, 16 Februari 2017. Judul : 2020, Sulsel Target Swasembada Gula	Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan penanaman tebu yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, Kalau dulu ditanam di awal musim hujan, sekarang tanam di musim kemarau. Sehingga pada saat tanam nanti, 11 hingga 12 bulan kemudian kembali kena musim kemarau sehingga rendemennya bisa optimal. Menurutnya, dukungan pusat sangat dibutuhkan dari sisi penyediaan sarana pengolahan hasil seperti traktor, dozer, alat panen dan lainnya. Saat ini, produksi tebu rata-rata per hektare sekitar 5 hingga 6 ton. Itu jauh dari ideal. Di Jawa dengan rendemen yang lebih tinggi dengan rendemen sampai 10, bisa sampai 10 ton per hektare. “Rendemen yang kita capai saat ini, khususnya di Pabrik Gula Camming sampai 7,8 persen mendekati delapan, sementara Pabrik Gula Takalar kisaran 6 persen sajarendemennya,”
Bisnis.com , 17 Desember 2015. Judul : Kinerja Tiga Pabrik Gula PTPN X Melampaui Target	Kinerja tiga Pabrik Gula (PG) PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) pada akhir 2015 melampaui target yang ditetapkan sebelumnya, dengan rata-rata rendemen mencapai 8,01 persen, dari target yang ditetapkan sekitar 7%. Direktur Produksi PTPN X, T Sutaryanto, di Surabaya, Rabu, mengakui tahun ini merupakan tahun terbaik kinerja tiga PG yang lokasinya di Sulawesi Selatan yakni PG Bone, PG Camming, dan PG Takalar. Ia menjelaskan tiga PG yang pengelolaanya dikerjasamakan antara PTPN XIV dengan PTPN X tersebut mampu memproduksi gula 35.120 ton, atau meningkat 27,4 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2014 yang sebesar 27.552 ton.

Sumber : Data di peroleh dari beberapa media online

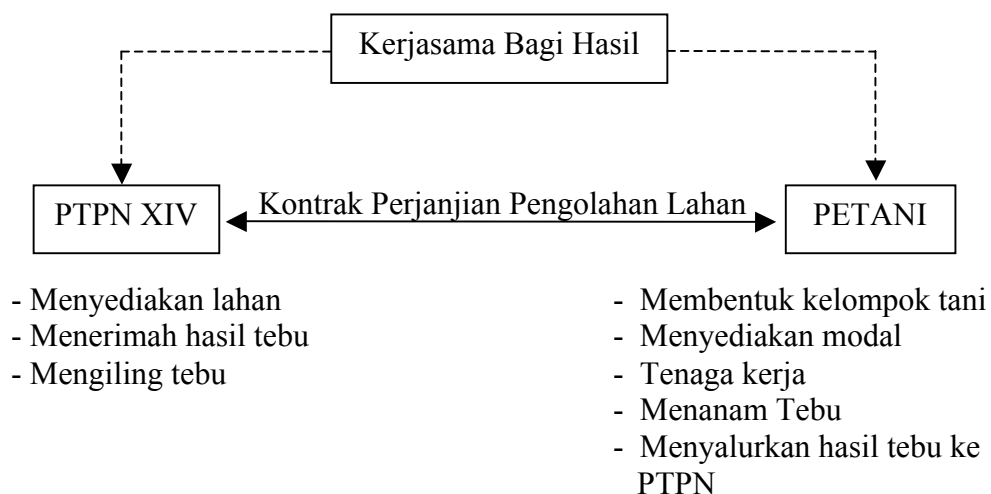
Keterangan di atas setidaknya dapat menggambarkan tentang rendemen tebu di Pabrik Gula Takalar yang berada di kisaran 6-8, itu artinya bahwa hasil tebu dalam 1 ton juga paling rendah berada di kisaran 60 Kg. Dari hal itu kemudian bisa di pastikan bahwa pemotongan tetap dilakukan dari pihak PTPN terhadap produksi tebu dari kelompok tani. Akibat ketidak jelasan informasi mengenai hasil sesungguhnya dari hasil berat 1 ton tebu menghasilkan berapa kg gula, Maka hal ini akan rawan adanya manipulasi yang tentu akan merugikan kelompok tani.

Dari berbagai penjelasan di atas, dan sejalan dengan praktek yang dijalankan oleh PTPN, maka bisa di pastikan bahwa kerjasama yang terbagun adalah kerjasama sepihak yang menempatkan PTPN XIV sebagai pemilik aset berupa lahan seluas 6,546.22 Ha untuk HGU, sedangkan PTPN X sebagai pemilik pabrik yang membiayai dan menjangkau segala administrasi dan operasional Pabrik Gula dan mendapat pembagian didalam sistem perjanjian kerjasama. Petani dalam kerjasama ini semakin jauh dari kontrol produksi terhadap tanah dan menempatkannya sebagai penyewa lahan PTPN XIV yang pembayaran sewa dilakukan di setiap panen tebu. Maka kerjasama kemitraan itu lebih tepat penyebutannya dengan sistem kontrak dengan pembagian hasil tebu dari petani ke PTPN.

Dalam pendapat James C. Scott di dalam bukunya *Moral Economy* yang menjelaskan mengenai kesejahteraan petani khususnya golongan petani penggarap, petani kecil, buruh tani akan selalu tergantung pada mekanisme harga pasar yang berlaku pada ketetapan sewa, pajak, bunga yang di berlakukan oleh

pemilik tanah dan tuan tanah. Hal ini terjadi di sebabkan hasil-hasil keringat petani dinilai menurut harga-harga yang berlaku untuk keperluan pembayaran sewa, bagi hasil, bunga, dan pajak yang juga mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. PTPN yang memiliki luasan lahan lebih dari 6 ribu ha juga bertindak seperti tuan tanah begitupun dengan dg.bani sebagai pemberi utang juga bagian dari tuan tanah yang akan terus menerus mengikat petani untuk tetap mengalami ketergantungan.

Berikut adalah pola kerjasama yang terbangun antara petani dengan PTPN :



Gambar 4.1 Pola Kerjasama Bagi Hasil

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa pola kerjasama kemitraan yang terbangun juga adalah kerjasama kontrak perjanjian pengolahan lahan dengan menanam tebu dengan sistem bagi hasil dalam budidaya tebu, di mana petani mengerjakan lahan milik PTPN XIV untuk menanam tebu sebagai bahan baku gula yang dibutuhkan oleh pabrik dengan segala pembiayaan diusahakan atau di tanggung oleh petani. Maka kerjasama yang terbangun juga tidak bisa di katakan sebagai kerjasama kemitraan akan tetapi ini lebih tepat di sebut kerjasama kontrak

Pengolahan lahan dalam menanam tebu dengan sistem bagi hasil. PTPN sebagai industri nasional dalam kerjasama ini pada prakteknya tidak jauh berbeda dengan tuan tanah yang menguasai atau memonopoli lahan lebih dari 6 ribu ha sedangkan di sisi lain banyak petani yang hanya memiliki lahan kecil dan bahkan tidak sedikit juga yang tidak bertanah sama sekali.

4. Dampak Kerjasama Kemitraan Terhadap Kehidupan Ekonomi Petani

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa komoditas tebu didalam pengalaman bertani masyarakat tentu adalah sesuatu yang baru maupun pola kerjasama yang terbangun didalamnya, tebu merupakan tanaman yang membutuhkan biaya besar tapi memiliki usia produktif sekali pengolahan dan pembibitan 5-6 tahun. untuk mengukur sejauh mana kerjasama ini berdampak terhadap kehidupan ekonomi petani maka akan di gambarkan sebelumnya luasan lahan yang mereka kerjakan sebagai berikut :

Tabel 4.10 Luas Lahan Tebu kerjasama Kemitraan di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tahun 2018

Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Kepemilikan Lahan	Luas Lahan (ha)
Julu Te'ne	10 orang	Milik PTPN XIV	6,08 ha
Julu Kana	9 orang	Milik PTPN XIV	6,01 ha
Total	19 orang	Milik PTPN XIV	12,09 ha
Rata-rata Luas Lahan			0,63 ha

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2018

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan hanya 19 petani saja yang melakukan kerjasama dengan PTPN XIV dengan luas 12, 09 Ha atau dengan rata-

rata luasan lahan yang mereka kerja seluas 0,63/Petani. Semua lahan adalah milik dari PTPN XIV dan petani hanya bertindak sebagai orang yang mengerjakan lahan dengan sistem pembagian hasil yang telah di jelaskan sebelumnya.

Untuk mengukur sejauh mana kerjasama ini berdampak terhadap kehidupan ekonomi petani maka berikut adalah penghasilan dan biaya yang harus di keluarkan petani selama melakukan kerjasama dengan menanam tebu tersebut :

Tabel 4.11 Hasil dan Biaya Produksi Tebu pada tahun 2017

Item	Nilai	
Luas Lahan (Ha)	12,09	
Hasil Penen		
Hasil Gula (Kg)	5.300 Kg	
Toral Hasil Panen (Rp)	53.250.000	
Rata-rata Rp. 53.250.000/19 orang	2.802.632	
Biaya-Biaya		
Pra & Musim Tanam		
Biaya Pengolahan Lahan	24.180.000	
Biaya Bibit Tebu	33.000.000	
Biaya Buruh & Mobil Angkut Bibit	8.800.000	
Biaya buruh Tanam	9.500.000	
Pemeliharaan & Panen		
Biaya Pupuk	10.225.000	
Biaya Racun	10.580.000	
Biaya Buruh Panen	4.800.000	
Biaya Mobil Angkut Hasil panen	7.190.000	
Total Biaya		108.275.000
Hasil Panen – Biaya-Biaya : (53.250.000 - 108.275.000)		-55.025.000
Rata-rata tanggungan utang biaya dari produksi dari 19 orang		2.896.053

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2018

Dari tabel diatas, menggambarkan dari total luas lahan 12,09 ha pada pas panen pertama yang di lakukan oleh petani hanya menghasilkan 5.300 Kg gula atau senilai saja Rp. 53.250.000 dengan biaya produksi yang sangat besar yaitu Rp. 108.275.000. bukan untung yang diterima oleh petani justru petani harus

menanggung beban biaya kerugian sebesar Rp. 55.025.000 atau masing-masing menanggung biaya kerugian sebanyak Rp. 2.896.053/ orang.

Selain rugi dari hasil kerjasama yang di alami oleh petani juga didapatkan bahwa hasil pengolahan lahan dan pembelian bibit juga bersumber dari utang dan tersentral pada satu sumber. Seperti yang di gambarkan oleh dg. Nyaling sebagai berikut :

“ Kami mengutang untuk mengolah lahan dan biaya bibitnya, mobil traktor pengolahan hanya Dg. Bonto dan Dg. Bani yang punya serta pabrik itu sendiri. Kami berutang mengolah lahan ke Dg. Bani yang hitungannya masing-masing 2 Juta/Ha untuk biaya pengolahan lahan, dan pembelian bibit 500 ribu/ton belum termasuk biaya mobil angkut dan buruhnya, semua utang untuk pengolahan dan pembelian bibit yang ada di kelompok tani kami bersumber dari dg. Bani salah satu warga polongbangkeng selatang yang memiliki Traktor dan lahan tebu yang luas. Kami baru bisa menanam di tahun 2016 kemarin karena besarnya biaya itu, dan dari hasil panen pertama kami masih rugi, tapi kami berharap di tahun kedua untuk masa panennya itu setidaknya sudah bisa menutupi utang kami, kami sudah tidak harus mengolah lahan dan membeli bibit lagi untuk panen kedua samapai dengan panen kelimanya”(wawancara pada tanggal 30 Maret 2018).

Dari keterangan di atas, selain produksi tebu yang sangat kecil di tahun 2017 petani yang menjaling kerjasama dengan menanam tebu tersebut juga mengalami masalah yang begitu besar, selain mendapat kerugian mereka juga harus terbebani dengan utang pengolahan lahan dan pembelian bibit yang begitu besar dan terpusat di satu orang yaitu dg bani yang juga merupakan pemilik lahan yang luas serta segala alat produksinya.

Untuk menggambarkan secara jelas tentang besar utang dari biaya pengolahan dan biaya bibit berikut adalah tabel perkiraan utang dari pengolahan lahan dan bibit petani :

Tabel 4.12 Utang pengolahan lahan dan biaya bibit petani yang melakukan kerjasama dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar

Jumlah Petani	Biaya Pengolahan	Biaya Bibit	Biaya Buruh dan Mobil Angkut Bibit	Total Biaya
19 kk	Rp.24.180.000	Rp.33.000.000	Rp.8.800.000	Rp.65.980.000

Sumber : Diolah dari data primer tahun 2018

Dari tabel di atas menggambarkan bagaimana petani yang menjaling kerjasama dengan PTPN harus terbelit utang pengolahan lahan dan pembelian bibit serta biaya buruh dan mobil angkutnya yang mencapai Rp.65.980.000. dari angka sebesar itu semua bersementera dari utang yang didapatkan dari tuan tanah seperti dg. Bani.

E. Kelebihan dan Kekurangan Pola Kerjasama Kemitraan yang Terbangun dan Keberlanjutannya.

Seperti yang telah di terangkan sebelumnya, bahwa kerjasama yang terbangun juga merupakan bagian dari penyelesaian konflik antara petani dengan PTPN XIV yang juga merupakan industri milik negara, sehingga terlihat prinsip yang sesungguhnya terdapat didalam satu pola kerjasama tidak terbenuhi secara baik. Seperti prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan, akibatnya petani yang sebelumnya menguasai lahan sebelum masuknya perusahaan hingga pada pengambilan kesepakatan hanya terlihat sebagai pekerja semata didalam hubungan kerjasama yang terbangun, di tambah lagi, beban biaya produksi dalam budidaya tebu sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani, sehingga tidak sedikit petani harus mencari bantuan pinjaman didalam

pembiayaannya, adapun kekurangan dan kelebihan dalam pola kerjasama yang terbangung :

1. Kelebihan pola kerjasama kemitraan yang terbangun antara petani dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar.
 - a. Mampu meredam untuk sementara waktu konflik atas sengketa lahan anatara petani dan PTPN XIV
 - b. PTPN bisa lebih fokus pada pemberbaikan kualitas pabrik untuk bisa lebih banyak memproduksi gula
 - c. Tersedianya bahan baku gula berupa tebu yang di kerjakan langsung oleh masyarakat itu sendiri
2. Kekurangan pola kerjasama kemitraan yang terbangun antara petani dengan PTPN XIV Pabrik Gula Takalar.
 - a. Kontrol atas tanah tidak di miliki oleh masyarat/kelompok tani
 - b. Besarnya biaya produksi yang harus di tanggung oleh masyarakat / kelompok tani
 - c. Tidak adanya bantuan kepada kelompok tani berupa teknis dan manajemen dalam pengelolaan budidaya tebu
 - d. Besarnya hasil tebu kurang baik
 - e. Akses informasi yang di terima petani terhadap rendemen tebu tidak trasparan.
 - f. Sistem pembagian hasil tebu tidak trasparan dan memberatkan petani.
 - g. Hasil tebu kelompok tani terkadang harus atri selama 2-3 hari sehingga itu mempengaruhi turunya berat tebu.

Dari kelebihan dan kekurangan di atas adalah bagian dari penilaian untuk dapat merumuskan perencanaan untuk keberlanjutan pola kerjasama kemitraan yang terbangun untuk dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana kerjasama berlaku pada umumnya, bahwa sudah menjadi perhatian bagi yang melakukan kerjasama untuk tidak merugikan satu sama lain. Maka keberlanjutan pola kerjasama ini bisa bertahan lama jika memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan akses lahan sepenuhnya di bawah kontrol petani agar benih-benih konflik tidak muncul kembali
2. Bantuan biaya budidaya tebu harus diperhatikan sepenuhnya oleh pemerintah setempat terutama oleh Pemerintah Daerah Takalar yang dalam kerjasama telah disebutkan sebelumnya bahwa memiliki kewajiban memberikan permodalan budidaya tebu kepada masyarakat/kelompok tani agar mampu meningkatkan produksi tebunya dan tidak terlilit utang.
3. Pihak PTPN harus menjalankan/memberikan bantuan teknis dan manajemen budidaya tebu kepada kelompok tani yang bermitra dengannya agar petani dapat meningkatkan produksinya dan perusahaan terjaga bahan bakunya.
4. Keterbukaan informasi harus dijalankan oleh pihak PTPN sebagai yang menerima dan menggiling tebu petani agar pembagian dapat diketahui secara jelas oleh kelompok tani.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi kehidupan ekonomi petani di desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar:

Kehidupan ekonomi petani sebelum masuknya perusahaan bersumber dari penguasaan tanah rata-rata di atas 1,49 Ha/KK, terdiri dari 20 kebun dengan total luas 12,13 Ha, 134 petak sawah dengan total luas 76,35 Ha dan lahan lainnya dengan luas 2,60 Ha. Petani juga menerapkan pertanian peasant di mana petani masih menggunakan cara-cara tradisional. Setelah masuknya perusahaan, juga merupakan masa-masa sulit bagi petani, dimana, sulitnya pekerjaan, kehilangan tanah pertanian dan perkebunan menjadi lahan perkebunan tebu, dan kesejahteraan yang makin rendah dengan demikian kehadiran industri gula justru menjadi petaka atas kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak sedikitnya anak dari petani yang putus sekolah, dan juga tidak sedikit masyarakat yang harus meninggalkan kampung menuju ke kota ataupun merantau ke luar negeri untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. PTPN XIV sebagai industri nasional justru mempraktekkan monopoli tanah, disini lain banyak petani yang kehilangan tanah. sehingga PTPN

XIV yang ada di polongbangkeng utara juga bisa disebut sebagai tuan tanah tipe baru.

2. Pola kerjasama kotrak/kemitraan yang terbangun antara petani dengan PTPN XIV :

Pola kerjasama yang terbangun adalah pola kerjasama pengolahan tanah untuk menanam tebu, di mana petani yang sebelumnya menguasai atau memiliki tanah menjadi semata-mata hanya sebagai "pekerja" di atas tanahnya sendiri. Dalam kesepakatan yang berbentuk kontrak pengolahan tanah untuk produksi tebu, petani juga sepenuhnya dibebankan keseluruhan atas biaya produksi sehingga hal ini menambah beban mereka, akibatnya tidak sedikit dari mereka yang harus meminjam untuk membiaya produksi, Gambaran ini menjelaskan bahwa petani tidak mempunyai "kekuasaan" lagi atas tanah yang dikuasainya. Semuanya tergantung pada instruksi yang diberikan pihak PTPN sebagai pihak inti. Hal ini menegaskan kembali bahwa dalam pertanian kerjasama kontrak, meskipun tidak menguasai tanah secara langsung, pihak inti mempunyai akses besar terhadap tanah yang (sebelumnya) dikuasai atau dimiliki petani.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis kiranya penting memberikan saran demi keberlanjutan kerjasama yang ada sebagai masukan dan perhatian agar kerjasama sama ini bisa saling menguntungkan dan mencegah

benih-benih konflik lahir kembali. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada seluruh elemen yang terkait khususnya pemerintah Kabupaten Takalar, agar dapat memperhatikan petani terutama mengenai bantuan pembiayaan budidaya tebu yang dalam kerjasama telah di sebutkan sebelumnya, bahwa pemerintah Kabupaten Takalar memiliki kewajiban memberikan permodalan budidaya tebu kepada kelompok tani agar mampu meningaktan produksi tebunya.
2. Kepada Pihak PTPN XIV agar dapat menjalankan bantuan teknis dan manajemen budidaya tebu kepada kelompok tani yang bermitra dengannya ,agar petani dapat meningkatkan produksinya dan perusahaan terjaga bahan bakunya. Selain itu, keterbukaan informasih mengenai rendemen tebu kepada petani juga penting untuk dijalankan oleh pihak PTPN XIV.
3. Diharapkan kepada pengurus Koperasi Cinta Damai Sejahtera agar dapat memperhatikan semua kelompok tani yang berada dibawah tanggung jawabnya. Hal ini penting agar dapat meningaktan produksi tebu yang menjadi bagian dari kerjasama dengan PTPN XIV.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2010. *Research Design*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabate
- Boomgaard, Peter, dkk. 1996. *Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad Ke-20*. Bandung, Gadjah Mada University Press
- Fauzi, Nour. 1994. *Petani dan penguasa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hasan, Muhammad, dan Azis, Muhammad. 2018. *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal (Edisi Kedua)*. Makassar: CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Hasan, Muhammad. 2018. *Pendidikan untuk Semua: Pembangunan dan Pendidikan dalam Perspektif Ideologi-ideologi Pendidikan, Prosiding Seminar Nasional Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pendidikan Hotel Remcy, Makasar, April 21, 2018 ISBN: 978-602-52158-0-3*.
- Munarfah, Andi, dan Hasan, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Pratika Akasara Semesta.
- Poli, W.I.M. 2010. *Tonggak-tonggak Pemikiran Ekonomi*. Surabaya, Brilian Internasional
- Setiawan, Bonnie. 2013. *WTO dan Perdagangan Abad 21*. Yogyakarta. Resist Book.
- Susanto, dkk. 2006. *Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Jakarta. Kompas.
- Tahir, Thamrin, and Hasan, Muhammad. 2018. *Poverty's Characteristics and its Reduction Strategies: A Case Study*. European Research Studies Journal, XXI (2). pp. 426-440.
- Baswir, Revrissond. 2016. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ulyanov, V.I. 1917. 2017. *Imprealisme: Tahap Tertinggi Perkembangan Kapitalisme*. Yogyakarta, Penerbit Buku Marxist

- Zakaria, Fauzan. 2015. *Pola Kemitraan Agribisnis*. Gorontalo. Ideas Publishing.
- Frida, dkk. 1997. *Usaha pertanian kontrak*. Bandung, Yayasan AKATIGA
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta, LP3ES
- Sajogjo.1996. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Yogyakarta, Aditya Media

Hasil Penelitian

- Lintar, dkk. 2013. *Analisis Kemitraan antara PG. Candi Baru dengan Petani TebuRakyat Kerjasama Usaha (TRKSU) di Kecamatan Candi Kabupaten sidoarjo*. Malang. FPertanian-UBM.
- Fadilah, Ratna. 2010. *Analisis kemitraan antara pabrik gula Jatitujuh dengan petani tebu rakyat di Majalengka, jawa barat*. Bogor. FEM-IPB
- Hamid, ismar. 2015. *Konflik Agraria dan Jalan Keluarnya (Studi Kasus Konflik Antara PTPN XIV Dengan Masyarakat Polombangkeng Takalar dan Keera Wajo)*. Tesis, UNHAS
- Budianto. 2015. *Perlawanan Petani Dalam Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Agraria Masyarakat Takalar dengan PTPN XIV Kabupaten Takalar*. Tesis, UNHAS.

Sumber Lain

- Aliasi Gerakan Reforma Agrari (AGRA). 2014. *Naskah Pembaruan Agraria*
- Institute For Nasional And Democracy Studies (INDIES). 2014. *Penindasan Feodal dan Setengah Feodal*
- Wiradi, Gunawan. 2015. *Reforma Agraria dan Pembangunan di Pedesaan*
- Gelora 28. 2016. *Melawan Neoliberalisasi Pendidikan*. Jakarta. FMN
- Peraturan Pemerintah RI No. 44 tahun 1997 Tentang kemitraan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960

Sumber Online

<http://www.bps.go.id/pressrelease/2017/07/17/1379/persentase-penduduk-miskin-maret-2017-mencapai-10-64-persen.html>(Diakses 3 September 2017)

<http://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>(Diakses 10 Februari 2018)

LAMPIRAN